

MAKAN GRATIS PAKAI UANG PRIBADI PRABOWO



Rp75.000,-

**HERMAN DERU
SEGERA WUJUDKAN
JANJI SUMSEL MAJU
TERUS UNTUK
SEMUA**

**CATATAN
AWAL
PROGRAM
MAKAN
BERGIZI
GRATIS**

**RESOLUSI AHY
2025,
INTEGRASIKAN
PEMBANGUNAN
NASIONAL**

**LOMBOK JADI
DESTINASI
WISATA
TERBAIK
DUNIA 2025**

**CIPTAKAN
EKONOMI
BARU
KAWASAN
TRANSMIGRASI**

**INFRASTRUKTUR
DAN SDM FONDASI
KUAT MEMBANGUN
PEREKONOMIAN
OGAN ILIR**



info indonesia

www.infoindonesia.id

Network

INOVASI UNTUK NEGERI



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat

Koran Cetak Info Indonesia



JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781

Email : redaksi@infoindonesia.id



LAPOR MAS WAPRES

PENGADUAN:

LANGSUNG DATANG KE ISTANA WAPRES 📄
SENIN - JUMAT, JAM 08.00 - 14.00 WIB

KONTAK KE WHATSAPP 📄

08111 704 2207

ALAMAT 📍

ISTANA WAKIL PRESIDEN RI,
JLN. KEBON SIRIH NO. 14, JAKARTA PUSAT

EDISI
BULAN
JANUARI
2025

DAFTAR ISI



7

INFO UTAMA

Baru sampai putusan Mahkamah Konstitusi. Tantangan untuk para penyusun Undang-Undang di Lembaga Legislatif.



22

INFO SUMSEL

Pengendalian transportasi di Sumatera Selatan sudah berjalan cukup baik. Hasil evaluasi Kementerian Perhubungan menyebutkan, kondisi transportasi di Bumi Sriwijaya masuk kategori baik.



46

INFO DAERAH

Provinsi Kalimantan Timur merayakan Hari Ulang Tahun ke-68 pada 9 Januari 2025. Upacara perayaan pun digelar di Stadion Kadrie Oening dengan tema "Mambangun Kaltim untuk Nusantara".



70

INFO NASIONAL

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyatakan bahwa 2025 menjadi resolusi untuk mengintegrasikan pembangunan secara nasional.



58

INFO EKONOMI

Perjalanan 2025 baru saja dimulai, namun ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal telah menghantui banyak pekerja di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga melanda perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia, menggambarkan tantangan besar yang dihadapi sektor ketenagakerjaan.



66

INFO ISTANA

Presiden Prabowo Subianto berencana menggelar retreat dengan mengumpulkan seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Retreat pertama kali digelar untuk Kabinet Merah Putih di Akademi Militer sepekan setelah dilantik pada Oktober tahun lalu.



87

INFO KHUSUS

Program makan bergizi gratis mulai bergulir sejak 6 Januari 2025. Terlalu dini mengemukakan penilaian (assessment) untuk program, kegiatan yang mencakup skala masal dengan rentang waktu relatif panjang dibandingkan misalnya sebuah proyek. Berikut catatan awal pelaksanaannya.

3 DARI REDAKSI

20 OPINI

50 INFO WISATA

54 INFO OLAHRAGA

86 KAJI

76

INFO NASIONAL

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan dana Rp45 triliun untuk membantu mengatasi masalah pekerja migran Indonesia, terutama biaya pemberangkatan, pelatihan dan pemberdayaan.



2025

Selamat memasuki 2025 dengan berbagai kemungkinan positif maupun negatif. Positif berarti memberi manfaat, sedangkan negatif mengurangnya. Itu pun bisa berbeda-beda antarperorangan maupun lembaga, mulai dari tingkat keluarga hingga dinamika pergaulan antarnegara di pentas global.

Di dalam negeri, tingkat nasional, sudah terasa dinamika yang intensif di ranah politik. Pergantian pemerintahan di berbagai tingkatan mulai menunjukkan efektivitasnya. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang telah dilantik pada 20 Oktober 2024 mulai menjalankan mandatnya dengan membentuk kabinet dan menunaikan janji-janji kampanyenya.

Salah satu janji kampanye Prabowo-Gibran yang paling menyentuh kepentingan warga negara adalah program makan bergizi gratis (MBG). Kita berharap program MBG berlangsung tanpa banyak kendala dan berhasil mencapai tujuannya.

Program MBG, mengutip beberapa sumber, merupakan inisiatif yang bertujuan menyediakan makanan sehat dan bergizi kepada kelompok yang membutuhkan, dengan fokus pada anak-anak atau kelompok rentan lainnya. Program ini merupakan bagian dari pelayanan lembaga IFSR (Indonesia Food Security Review) dan bekerja sama dengan pihak United Nation World Food Programme dan menjadi bagian dari School Meals Coalition yang diselenggarakan dengan tujuan untuk mengatasi masalah kelaparan, kurang gizi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat.

Jadi jelas bahwa MBG adalah program yang bersambung dengan lembaga-lembaga internasional di tingkat global. Dalam program ini, makanan yang disediakan mengikuti standard gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi.

Program MBG di Indonesia menyasar pelajar di sekolah-sekolah atau anak-anak dalam komunitas yang mungkin tidak memiliki akses yang memadai terhadap makanan bergizi. Dengan menyediakan makanan yang sehat dan bergizi secara gratis, program ini diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan kelompok yang dilayani, serta membantu menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka.

Sebagai catatan, program ini baru dimulai pada awal Januari 2024. Tentu saja sebagai program, yang baru memasuki tahap permulaan, akan banyak kekurangan yang memerlukan tambahan atau perbaikan. Kita menyaksikan jumlah dapur penyedia MBG pada peluncuran perdana MBG baru berjumlah 190 unit tersebar di 26 provinsi.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi MBG, SPPG juga bertugas mengawasi standard kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat.

Akhirnya, di awal 2025, kita berharap dan, jika mungkin, ikut berpartisipasi menerapkan program MBG dengan sebaik-baiknya. Untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

● TELP 021-791 96781
● FAX 021-791 96786

Twitter : @infoindonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.idn

Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

PENDIRI: Usman Rizal

DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM: Rusdiyono

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Nur Aisah

PEMIMPIN REDAKSI: Gunawan Effendi

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Irma Yani

REDAKTUR : Melati Tagore, Nina Erlina, Ega Tri Gustina

REPORTER: Mario CH, Budi Prasetya, Indra Hadi, Muhammad Moeslim, Reno, Rasmiadi, Ida Iryani, Yadh, Muhammad Fikri

EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali

KEUANGAN: Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI** : Nur Aisah

PENGEMBANGAN BISNIS: Ega Tri Gustin, Nur Aisah **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar

BANK ACCOUNT: A/N PT. Wahana Multimedia, BCA No Rek: 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



MAHKAMAH KONSTITUSI

Pilpres 2029

TANPA AMBANG BATAS MINIMAL PEROLEHAN SUARA

Baru sampai putusan Mahkamah Konstitusi.
Tantangan untuk para penyusun Undang-
Undang di Lembaga Legislatif.

Perjalanan 2025 baru memasuki hari kedua saat Mahkamah Konstitusi membacakan putusan penghapusan ambang batas perolehan suara untuk calon presiden di pemilihan berikutnya. Tahun baru, aturan pemilihan Presiden yang terjadwal empat tahun ke depan, 2029, pun baru: Tanpa ambang batas minimal perolehan suara partai atau gabungan partai.

Suasana hari kerja pada Kamis, 2 Januari 2025 itu terbilang santai. Namun, Mahkamah Konstitusi justru menggerakkannya dengan putusan yang sangat serius: Menghapus

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suharto saat membacakan amar putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis, 2 Januari 2025..

Dalam pertimbangan putusan, Wakil Ketua MK Saldi Isra mengemukakan bahwa, merujuk risalah pembahasan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu merupakan hak konstitusional partai politik. Pada konteks tersebut,

ya, disadari atau tidak, partai politik baru yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu serta-merta kehilangan hak konstitusional untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden," ujar Saldi

Dalam batas penalaran yang wajar, sambungnya, MK memandang presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 menutup dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki persentase suara sah secara nasional atau persentase jumlah kursi di DPR pada pemilu sebelumnya untuk mengusulkan pasangan



ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Alas hukum putusan itu tentu saja sebagaimana lazimnya putusan MK yang merujuk langsung konstitusi: bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah menilai gagasan penyederhanaan partai politik dengan menggunakan hasil pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya sebagai dasar penentuan hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan bentuk ketidakadilan.

"Selain itu, dengan menggunakan hasil pemilu anggota DPR sebelum-

calon presiden dan wakil presiden.

Saldi mengatakan penerapan angka ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden terbukti tidak efektif dalam menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu. Di sisi lain, penetapan besaran atau persentasenya dinilai tidak didasarkan pada penghitungan yang jelas dengan rasionalitas yang kuat. "Dalam konteks itu, sulit

bagi partai politik yang merumuskan besaran atau persentase ambang batas untuk dinilai tidak memiliki benturan kepentingan,” imbuh Saldi.

MK mempelajari bahwa arah pergerakan politik Indonesia cenderung selalu mengupayakan setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya diikuti dua pasangan calon. Menurut MK, kondisi ini menjadikan masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang mengancam keutuhan Indonesia apabila tidak diantisipasi. Sekalipun pemilu presiden dilaksanakan serentak dengan pemilu anggota legislatif, masih menurut MK, sejatinya mandat rakyat atau pemilih diberikan secara terpisah.

Menurut Mahkamah, menggunakan presidential threshold berdasarkan perolehan suara atau kursi DPR memaksakan logika sistem parlementer dalam praktik sistem presidensial Indonesia. Oleh sebab itu, MK menyatakan presidential threshold yang ditentukan dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, tetapi juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

“Sehingga terdapat alasan kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya. Pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas, tetapi yang jauh lebih mendasar adalah rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden berapapun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945,” katanya.

Atas pertimbangan di atas, MK menyimpulkan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Toh masih dua hakim konstitusi yang berbeda pendapat, yakni Anwar Usman dan Daniel Yusmic P. Foekh.

Anwar dan Daniel menilai, para pemohon yakni empat orang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tidak mempunyai kedudukan hukum dalam permohonan yang mereka ajukan. “Kami berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya men-

yatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tidak dapat diterima,” ungkap Anwar dan Daniel sebagaimana dikutip dari salinan putusan.

Kedua hakim dengan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) berpendangan para pemohon tidak punya

kedudukan hukum karena berstatus sebagai mahasiswa. Pada sisi lain, 36 gugatan terkait presidential threshold yang telah ditolak MK datang dari pemohon yang punya kedudukan hukum sebagai partai politik maupun warga negara yang berhak untuk maju pada pemilihan presiden.

Anwar dan Daniel pun menilai,



keempat pemohon mesti membuktikan kerugian konstitusi yang mereka alami dengan mengajukan judicial review atas ketentuan presidential threshold. "Untuk menentukan dan menilai apakah pihak dalam permohonan pengujian undang-undang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon atau tidak, maka pihak tersebut harus dapat menjelaskan kualifikasi dan kerugian konstitusional yang dialami oleh berlakunya suatu undang-undang," ungkap kedua hakim dalam opininya.

Anwar dan Daniel bahkan menyebutkan beberapa putusan yang menegaskan syarat kedudukan hukum para pemohon, seperti putusan 74/2020, putusan 66/2021, putusan 52/2022, dan putusan 80/2023. "Bahwa pem-

siswa itu tetap terakumulasi dengan komposisi yang mendukung mencapai tujuh hakim sedangkan yang dengan pendapat berbeda hanya dua hakim MK.

Keempat mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) Fakultas Syariah dan Hukum ini mengajukan gugatan tanpa menggunakan kuasa hukum karena keterbatasan dana. Mereka bahkan mengajukan permohonan untuk sidang online di MK, dan hanya sekali sidang offline, yang kemudian diterima, setelah tujuh kali persidangan.

Dalam putusan MK, norma presidential threshold tidak hanya dinilai bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan

gan akademik keempat mahasiswa tersebut, yang berhasil menerapkan kompetensi keilmuan dan keterampilan hukum yang diperoleh di kampus untuk beracara di MK, bahkan terakumulasi demi memperjuangkan terwujudnya demokrasi yang lebih baik dan inklusif di Indonesia.

Dalam jumpa pers yang dihadiri 4 mahasiswa didampingi Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. Dr. Ali Sodikin dan Kaprodi Hukum Tata Negara, Gugun El Buyanie, S.H., LL.M, di hadapan puluhan wartawan media lokal dan nasional, Enika Maya Oktavia, salah satu mahasiswa yang terlibat menjelaskan bahwa keputusan untuk mengajukan gugatan setelah Pilpres 2024 adalah untuk memastikan kajian yang dilakukan oleh MK bersifat akademis dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik. "Kami ingin kajian Mahkamah Konstitusi benar-benar berdasarkan substansi hukum, bukan politik," tegas Enika.

Pemohonan ini mengundang sorakan gembira setelah dikabulkan oleh MK, meskipun sempat terkendala beberapa kali selama proses persidangan. "Kami tidak menyangka hasil ini, tetapi kami merasa bahwa ini adalah kemenangan untuk demokrasi Indonesia," ujar Faisal Nasirul Haq, mahasiswa lainnya yang turut serta dalam mengajukan gugatan.

Keberhasilan ini memberikan angin segar bagi sistem demokrasi di Indonesia, dengan menunjukkan bahwa hak untuk mengajukan judicial review tidak hanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu, tetapi juga oleh pemilih seperti mereka yang masih berstatus mahasiswa. MK juga memutuskan bahwa pemilih dapat memiliki legal standing dalam pengajuan gugatan terkait undang-undang pemilu, yang sebelumnya menjadi kendala.

Para mahasiswa ini mengajukan gugatan nomor 62/PUU-XXII/2024 sebagai permohonan personal, dengan harapan agar MK dapat memberikan pertimbangan yang lebih adil dan membuka peluang untuk perubahan yang lebih baik dalam proses demokrasi di Indonesia.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag menyam-



batasan pihak yang dapat memohonkan pengujian norma Pasal 222 UU 7/2017 bukan berarti bahwa norma a quo kebal untuk diuji, melainkan karena tiadanya kerugian konstitusional pemohon perseorangan warga negara Indonesia in casu para pemohon a quo," lanjut opini berbeda ini.

Perkara ini dimohonkan oleh empat orang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta: Keempat mahasiswa ini, Rizki Maulana Syafei (Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2021), Enika Maya Oktavia (Prodi HTN 2021), Tsalis Khoirul Fatna (Prodi HTN 2021), dan Faisal Nasirul Haq (Prodi Ilmu Hukum 2021. Meski dua hakim mengajukan pandangan berbeda, permohonan para maha-

ketidakadilan yang intolerable. Rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden, berapapun besaran atau angka persentasenya, bertentangan dengan pasal 64 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Dalam sidang MK itu juga ditegaskan bahwa dikabulkannya gugatan 4 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga didasarkan pada pertimbangan politik agar dimungkinkan calon presiden dan wakil presiden tidak hanya dua calon ataupun terjebak pada calon tunggal, serta untuk memberi keleluasaan pada pemilih presiden dan wakil presiden dapat memilih alternatif calon yang lebih memadai.

Rektor UIN Sunan Kalijaga, Prof. Noorhaidi Hasan menyampaikan, apresiasi yang tinggi atas perjuan-

paikan apresiasi yang tinggi terhadap langkah yang diambil oleh keempat mahasiswa tersebut. Ia menyatakan bahwa tindakan mereka mencerminkan kepedulian yang besar terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia, serta menunjukkan bahwa generasi muda saat ini memiliki kemampuan untuk menjaga marwah demokrasi di Indonesia.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa pada prinsipnya fakultas memberi ruang sekaligus memfasilitasi yang merupakan bagian dari kreativitas mahasiswa yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi keil-

partai-partai politik sudah berkoordinasi untuk menindaklanjuti putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) terkait presidential threshold (PT). "Memang belum ada rapat koordinasi secara langsung untuk membahas masalah (putusan MK) ini, tapi konsultasi antar para menteri juga dengan parpol-parpol itu sudah terjadi untuk membahas implikasi dari putusan MK yang merupakan pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2024.

Menko Yusril mengemukakan, setelah adanya putusan terbaru MK, pasal

baru yang akan diajukan nantinya berdasarkan lima panduan rekayasa konstitusional yang telah dikeluarkan lembaga yudikatif tersebut. Salah satu rekomendasi rekayasa konstitusional tersebut ialah terkait pengaturan pencalonan dari setiap partai politik yang harus proporsional.

Yusril mencontohkan misalnya ada 30 partai politik yang akan menjadi peserta pemilu, artinya ada kemungkinan 30 calon presiden bisa diajukan dalam pemilu terkait. Namun tentu hal itu tidak akan efektif sehingga mekanisme koalisi seharusnya diperbolehkan.

"Tapi kalau bergabung jangan



muan dan berbagai keterampilan pendukung. "Dalam hal ini, mereka tidak didampingi oleh kuasa hukum, karena mereka memiliki pengetahuan memadai melalui tempaan selama perkuliahan ataupun ruang-ruang diskusi yang intensif, sehingga mereka cukup meyakinkan dalam membangun argumen selama persidangan," ujarnya.

Sedangkan dari sisi lembaga eksekutif pemerintahan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Menko Kumpas) Yusril Iha Mahendra mengatakan bahwa para menteri dan perwakilan

222 UU no. 7 tahun 2017 yang mengatur ketentuan presidential threshold artinya sudah tidak relevan dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sehingga dibutuhkan pengaturan baru. Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah harus berkoordinasi dengan pihak yang paling terdampak yaitu partai-partai politik agar pengaturan baru terkait pemilihan umum (pemilu) bisa diajukan dengan lebih tepat kepada DPR untuk membuat regulasi baru sejalan dengan putusan MK.

Yusril menambahkan, pengaturan

sampai 29 (partai) mencalonkan satu orang, lalu yang satu partai mencalonkan, akhirnya cuma jadi dua lagi (capresnya). Jadi bagaimana mekanismenya? In between, antara terlalu banyak atau terlalu sedikit, nah itu yang mesti dikompromikan," ujarnya.

Dengan demikian, masih akan banyak implikasi penghapusan ambang batas perolehan suara untuk Pilpres yang terjadwal pada 2029. Masih cukup tersedia waktu untuk merumuskan aturan baru Pilpres tanpa ambang batas minimal perolehan suara yang selaras dengan putusan MK. ●

DARI PUTUSAN MK KE NORMA BARU PILPRES

Demokrasi atau pengakuan atas daulat rakyat, tercermin dalam hasil pemilihan yang jujur dan adil, dianggap setara dengan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Ringkasnya, Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Bagaimana dengan putusan Mahkamah Konstitusi?

Suara rakyat yang mendukung putusan Mahkamah Konstitusi datang dari jajak pendapat pasca putusan ini. Survei Litbang Kompas, misalnya, mengungkapkan, ternyata sebagian besar warga yang mendapat pertanyaan apakah setuju dengan penghapusan ambang batas pencalonan presiden, presidential threshold (PT) yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) memang menyetujuinya.

Menurut survei tadi, 66,1 persen responden setuju presidential threshold dihapus. Sedangkan sisanya, sekitar 31,3 persen menentangnya. Selanjutnya, dari 66,1 yang setuju, sebanyak

48,9 persen menyatakan setuju dengan alasan para pemilih akan memiliki lebih banyak pilihan capres-cawapres. Sedangkan sekitar 29,6 persen lainnya mendukung karena partai-partai politik dapat mengajukan kadernya untuk maju di kancah Pilpres, kemudian 16,3 persen lainnya menganggap penghapusan PT memudahkan parpol mengajukan capres-cawapres tanpa harus berkoalisi.

Pada sisi lain, masih dari hasil survei Litbang Kompas, sekitar 50,1 persen responden yang tidak setuju menyatakan penghapusan aturan ini dapat membuat pemilih kebingungan karena akan banyak capres-cawapres yang bersaing dalam Pilpres. Selain itu, sekitar 44,2



persen responden khawatir akan muncul capres-cawapres tak berkualitas. Sementara 3,5 persen lainnya berpendapat tak semua parpol siap mengajukan capres-cawapresnya.

Litbang Kompas juga menanyakan apakah responden setuju jika seluruh parpol bisa mengajukan calonnya, maka harus ada ketentuan agar yang diajukan merupakan kadernya sendiri? Sebagian besar responden, sekitar 64,7 persen setuju, sedangkan yang tak setuju sekitar 33,8 persen, dan tidak tahu sebesar 1,5 persen.

Survei ini berlangsung pada 6-9 Januari 2025, beberapa hari setelah MK menganulir ketentuan presidential threshold. Proses survei melibatkan 528 responden. Sampel ditentukan secara acak. Tingkat kepercayaan di angka 95 persen dan margin of error \pm 4,22 persen.

Sebelumnya, presidential threshold diatur dalam UU Pemilu Nomor 7/2017. MK menganulirnya dengan menyatakan aturan ini inkonstitusional pada Kamis, 2 Januari 2025. MK berpendapat Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur ambang batas Pilpres itu tak sejalan dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, hak memperjuangkan diri secara kolektif, serta kepastian hukum yang adil sebagaimana termaktub pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD

1945.

Frasa Pasal 222 yang berbunyi "pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya," dinilai bertentangan dengan Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menurut MK memberi hak

kepada partai politik yang ikut bertarung dalam pemilu untuk mengajukan calon presiden dan wakil presidennya.

Dalam putusannya pada 2 Januari lalu, MK menilai aturan ambang batas yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu tadi hanya bisa digunakan oleh partai besar atau koalisi partai yang memenuhi syarat. Hal itu dianggap bertentangan dengan Pasal 6A ayat 2 UUD 1945.

Menko bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan MK itu final dan mengikat. Ia menyebut pemerintah menghormati dan terikat atas putusan MK tersebut tanpa dapat melakukan upaya hukum apa pun.

"Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (final and binding)," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat, 3 Januari 2025.

Dari kalangan politisi, Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengemukakan putusan MK mengenai penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT) berimplikasi kompleks bagi dinamika politik Indonesia. Menurut Bamsoet, panggilan ringkasnya, pada satu sisi putusan MK memberi k a n





kesempatan besar bagi partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden (pilpres) dengan bertambahnya jumlah pasangan calon.

Namun, sambungnya, di sisi lain bertambahnya jumlah pasangan calon presiden tidak selalu menjadi pertanda positif. "Penghapusan presidential threshold diperkirakan jumlah pasangan calon presiden bisa meningkat dari tiga pasangan pada Pilpres 2024, menjadi lebih dari empat, atau bahkan enam pasangan pada Pilpres 2029," kata pria yang akrab disapa Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 9 Januari 2024.

Dengan demikian, kata dia, ada berbagai risiko yang berpotensi timbul, mulai dari fragmentasi politik, polarisasi, tingginya biaya politik, hingga munculnya



Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (final and binding).

calon berkualitas rendah menjadi tantangan yang nyata. Untuk itu, strategi yang tepat perlu dicari untuk menghindari terlalu banyaknya pasangan calon presiden, kualitas yang rendah, dan agenda politik yang sempit.

Menurut dia, peningkatan jumlah kandidat dalam pilpres tidak selalu membawa indikasi positif bagi demokrasi. Pengalaman di berbagai negara, kata Bamsoet, menunjukkan banyaknya kandidat dalam pilpres yang muncul sering kali disertai dengan latar belakang politik yang kurang matang, visi dan misi yang terbatas, serta keterwakilan politik yang tidak proporsional.

Bamsoet mencontohkan antara lain Pilpres Brasil 2018 dengan 13 kandidat yang bertarung. Hasilnya muncul banyak calon presiden dengan pengalaman politik yang minim, serta menciptakan kebingungan pemilih untuk mencari figur pemimpin kredibel. "Salah satu tantangan utama setelah penghapusan

presidential threshold adalah menjaga kualitas kandidat. Masyarakat perlu cerdas dalam memilih dan mendorong partai-partai untuk mengusulkan calon presiden yang memiliki visi dan misi yang jelas, serta agenda yang luas dan inklusif," kata dia.

Selain soal kualitas, menurut dia, banyaknya kandidat dalam pilpres juga berpotensi menimbulkan polarisasi. Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan

hanya berdasarkan popularitas atau citra semata. "Perlu adanya peningkatan kapasitas partai politik dalam mengedukasi kader mereka mengenai pentingnya integritas dan kualitas kepemimpinan. Pelatihan dan pembinaan kader bisa membantu menyeleksi calon presiden yang lebih berkualitas guna meningkatkan daya saing dan kemampuan mereka," ujarnya.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menyoroti kon-

gugatan itu oleh Mahkamah Konstitusi," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025

Sedangkan pada putusan berbeda di awal 2025, majelis yang mengabulkan permohonan tetap figur-figur yang sama. "Mahkamah yang sama, Hakim yang sama, tidak pernah mengabulkan atas gugatan tersebut (sebelumnya," imbuhnya.

Atas dasar itu, Muzani mengakui putusan MK soal ambang batas presiden-



jika tidak dikelola dengan baik. "Dengan banyaknya calon presiden yang ada, dapat dipastikan bahwa pemilihan presiden akan berlangsung lebih dari satu putaran yang akan menambah beban biaya pemilu bagi pemerintah," kata dia.

Di samping itu, menurut dia, pemilihan perlu diberi edukasi untuk mampu memilih calon pemimpin yang berkualitas karena pemimpin yang dipilih jang-

sistensi Hakim MK yang memutuskan membatalkan syarat ambang batas itu Muzani beralasan selama ini gugatan serupa telah banyak diajukan ke MK tetapi tidak ada yang dikabulkan hingga putusan pada Kamis, 2 Januari 2025.

"Tercatat lebih dari 30 kali gugatan terhadap persoalan yang sama dengan berbagai macam argumentasi dan alasan, tidak pernah mengabulkan atas

sial mengejutkan. Namun, ia menyebut putusan ini juga menimbulkan harapan demokrasi. "Terus terang di sisi lain ini adalah sebuah kejutan di sisi lain ini adalah sebuah harapan terhadap demokrasi," ujar dia.

Muzani berharap keputusan MK tersebut sebagai momen bersejarah yang membuka peluang lebih besar bagi munculnya kandidat presiden dari

berbagai latar belakang. Langkah ini dinilai sangat penting untuk memastikan demokrasi tetap inklusif dan tidak didominasi oleh segelintir pihak.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono malah menyatakan menghormati putusan MK yang membatalkan syarat ambang batas pencalonan presiden alias presidential threshold. Ia memastikan akan mengawal agar penerapan putusan itu dalam produk revisi UU berjalan sesuai

MK bersifat final dan mengikat, sehingga dia memastikan Fraksi Gerindra akan menjunjungnya sebagai bagian dari amanat demokrasi. "Kami menghormati dan siap mematuhi keputusan MK. Segera setelah ini kami akan mempelajari lebih detail putusan tersebut sebelum kami jadikan acuan dalam pembahasan revisi UU Pemilu," ujarnya.

Dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), parpol dengan perolehan suara terbesar pada Pemilu 2024,

kita bersama," kata dia.

Dia mengemukakan, PDIP masih memerlukan waktu untuk mengkaji lebih lanjut putusan MK yang menurutnya dapat ber dampak luas terhadap sistem pemilu. "Masih perlu dikaji, karena punya banyak implikasi baik dari sisi regulasi, peserta pemilu, pencalonan presiden dan sebagainya," katanya.

Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menilai putusan Mahkamah Konsti-



dengan amanat putusan MK.

"Fraksi Gerindra akan terus mengawal prosesnya agar penerapan putusan bisa berjalan efektif dan selaras dengan amanat dalam putusan MK," kata Budisatrio dalam keterangannya, Jumat, 3 Januari 2025.

Ia menyebut masih ada sejumlah tahapan yang harus dilewati sebelum putusan tersebut diresmikan sebagai produk revisi UU. Budisatrio menyatakan pada dasarnya Fraksi Partai Gerindra berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi.

Budi menekankan bahwa putusan

Sekretaris Fraksi PDIP DPR Dolfie OFP mengemukakan putusan ini akan menimbulkan pro dan kontra, namun tetap final dan mengikat. "Putusan MK mengikat dan final. Suka tidak suka putusan MK harus dijalankan," kata Dolfie, Kamis, 2 Januari 2025

Menurut dia, gugatan ini sudah puluhan kali digugat ke MK dan selalu ditolak. Namun, untuk kali ini, MK akhirnya mengabulkan permohonan para pemohons seluruhnya. "Bahwa terdapat pro kontra atas konsistensi putusan MK terkait dengan pengujian materi ambang batas, perlu menjadi pencermatan

tusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) memberikan kesempatan bagi seluruh anak bangsa untuk maju dalam pemilihan presiden (pilpres). "Hal ini memberikan kesempatan bagi seluruh anak bangsa yang memiliki kemampuan untuk diusung oleh partai politik untuk maju di dalam kontestasi pilpres," kata Eddy dalam keterangannya, Kamis, 2 Januari 2025

Putusan tersebut, sambungnya, menjadi bagian demokrasi Indonesia untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi partai politik mengusung

putra-putri terbaiknya menjadi capres ke depan. Dia pun menegaskan kembali sikap partainya yang sejak awal memang menghendaki agar presidential threshold diturunkan serendah-rendahnya, bahkan sampai dengan nol persen.

"Ini adalah pandangan kami, dan pandangan kami ini ternyata sejalan dengan putusan MK yang dikeluarkan," ucap Wakil Ketua MPR RI itu.

Senadadengan PAN, Partai Demokrat berharap putusan Mahkamah Konsti-

selaras dengan komitmen partainya, "Demokrat, selama ini, terus berkontribusi dan berjuang bersama rakyat untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi kita," kata Herzaky

Untuk itu, dia menyebut Partai Demokrat menghormati putusan MK yang mengabulkan gugatan uji materi perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 itu karena bersifat final dan mengikat. "Sikap kami selama ini selalu sama dalam menyikapi putusan MK. Kami menghormati

norma baru atau undang-undang yang mengatur pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Apa pun itu Mahkamah Konstitusi putusannya adalah final and binding. Oleh sebab itu, kami menghormati dan berkewajiban untuk menindaklanjutinya," kata Rifqinizamy di Jakarta, Kamis, 2 Januari 2025.

Menurut dia, putusan MK tersebut adalah babak baru bagi demokrasi konstitusional Indonesia sehingga peluang



tusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dapat berkontribusi bagi perkembangan demokrasi di Tanah Air. "Harapan kami, putusan MK ini bisa berkontribusi dan membantu demokrasi Indonesia semakin berkembang dan tumbuh semakin matang. Mendekatkan kita ke tujuan menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, 2 Januari 2025.

Menurut dia, putusan MK kali ini

apapun putusan MK itu," ujarnya.

Sedangkan politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang duduk sebagai Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengemukakan proses politik lanjutan akan menyertai putusan MK yang menghapus ketentuan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut dia, Komisi II DPR RI akan menindaklanjutinya dengan memasukkan poin putusan MK itu ke dalam pembentukan

untuk mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden bisa lebih besar. Dengan penghapusan persyaratan ambang batas tersebut, menurut dia, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) RI bisa diikuti oleh lebih banyak pasangan calon.

Pembahasan norma baru mengenai pencalonan presiden dan wakil presiden pada pilpres berikutnya yang dapat menjadi pembahasan panjang di DPR. Mungkin juga pembahasannya ringkas jika rumusannya mudah dipahami dan konsisten dengan prinsip demokrasi, daulat rakyat. ●

AMBANG BATAS PARLEMEN TURUN LEBIH DULU

Penghapusan ambang batas pemilihan anggota legislatif (parliamentary threshold) sudah mendahului regulasi yang sama untuk pemilihan presiden. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan, Mahkamah Konstitusi berpeluang membatalkan parliamentary threshold untuk Pemilu legislatif berikutnya.

Faktanya, melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, Kamis, 29 Februari 2024, MK mengabulkan sebagian permohonan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) perihal ambang batas parlemen empat persen. MK menyatakan ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya.

Dalam hal ini, MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk mengubah norma serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang diatur dalam Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak ada dasar rasionalitas dalam penetapan ambang batas parlemen empat persen selama ini.

"Mengabulkan permohonan pemo-

DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

MK memerintahkan ambang batas parlemen diatur ulang dengan berpedoman kepada persyaratan yang termaktub dalam pertimbangan putusan, antara lain, harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan, perubahan tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu, mewujudkan penyederhanaan partai politik, rampung sebelum tahapan Pemilu 2029, dan melibatkan berbagai kalangan dengan prinsip partisipasi publik bermakna.

Nah, di awal 2025, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan MK berpeluang membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional yang sebenarnya sudah imperatif (bersifat perintah normatif konstitusional) berdasarkan Putusan MK Nomor 116 pada akhir Februari 2024 atas permohonan Perludem tadi.

"Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik," kata Yusril Ihza Mahendra di Denpasar, Bali, Senin malam, 13 Januari 2025. Menurut dia, putusan MK yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen akan berdampak terhadap ketentuan ambang batas parlemen juga.

Keputusan itu, sambungnya, memberikan harapan baru kepada partai-partai politik untuk berkembang dalam



hon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pleno MK di Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024. Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu

demokrasi Indonesia yang lebih sehat. Dengan begitu, kata Yusril, partai politik (dengan skala besar atau kecil) memiliki peluang memiliki wakil rakyat di DPR RI. "Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai-partai politik wabil khusus juga PBB," ucapnya.

Setelah putusan MK itu, kata dia, pemerintah akan merumuskan satu norma hukum baru di bidang politik dengan menggunakan panduan dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut. Rumusan itu nantinya akan diimplementasikan untuk pemilihan umum baik legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang tidak ada lagi aturan terkait ambang batasnya.

"Khususnya kepada lima panduan atau disebut constitutional engineering yang harus dirumuskan di masa akan datang dan saya kira pemerintah sekarang tentu dengan jiwa besar harus menghormati dan menerima putusan MK itu," ucapnya.

Di sisi lain, Yusril berpendapat partai yang memiliki sedikit kursi di parlemen, dapat membentuk satu fraksi gabungan dengan partai lain. "Pendapat saya pribadi, lebih baik dibatasi jumlah fraksi di DPR, jumlah fraksinya 10 fraksi. Jadi kalau partai itu kurang dari 10 persen, dia bisa membentuk satu fraksi gabungan," katanya.

Mengenai lima panduan tadi, MK sudah menyampaikannya dalam pertimbangan putusan yang mengarah ke penghapusan ambang batas parlemen pada Pemilu 2024. "Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pada poin pertama, MK menyatakan ambang batas parlemen harus

didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Selanjutnya, "(3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029," begitu menurut pertimbangan MK.

Sedangkan poin kelima adalah perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memperhatikan penyelenggaraan

terbuang sia-sia dan tidak sah menjadi kursi. Faktanya, ada caleg DPR RI, baik dari PSI, Perindo, Gelora, dan lain-lain yang perolehan suara calegnya di partai tersebut masuk cluster premium di atas 100 ribu suara, bahkan ada yang menembus 200 ribu suara pribadi, namun tidak lolos dan tidak menjadi kursi di parlemen karena partainya tak lolos ambang batas empat persen," kata Pangli.

Karena itu ia mendukung putusan MK agar besaran dan persentase ambang batas parlemen dalam pemilu yang sebesar empat persen, untuk diatur ulang. "Penghapusan ambang batas parlemen untuk mengakomodasi kepentingan partai kecil dan menengah agar punya pengalaman menjadi wakil rakyat, punya kursi di parlemen. Tidak boleh ada motivasi menghalau partai baru untuk masuk ke dalam parlemen," ujarnya.

Untuk Pemilu 2029, ia berharap agar



pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Pakar ilmu politik dan pendiri sekaligus Direktur Voxpol Center Research and Consulting Pangli Syarwi Chaniago mendukung penghapusan ambang batas parlemen itu oleh MK. "Sangat miris dan disayangkan suara rakyat

ambang batas parlemen diturunkan dalam rentang batas bawah satu persen dan rentang batas atas sebesar dua persen agar suara rakyat bisa dikonversi menjadi kursi dan tidak terbuang sia-sia. Bagaimana konkretnya, masih harus menunggu proses penyusunan norma baru dan hasilnya.

Pemilu 2029 masih jauh. Namun jelas lansekap politik dalam negeri sudah jauh berubah di awal 2025. •

SALAH OBAT AMNESTI KORUPTOR



Oleh: Alvin Nicola
Peneliti Transparency
International Indonesia

Berkaca dari pengalaman sejumlah negara, sangat sulit berharap penerapan amnesti untuk para koruptor dapat menjadi solusi bagi macetnya pemberantasan korupsi.

Selain kontraproduktif terhadap semangat antikorupsi yang selama ini dikampanyekan Presiden Prabowo Subianto, memberikan maaf kepada koruptor dengan syarat mengembalikan uang hasil korupsi ke negara juga hanya akan kian mendegradasi kepercayaan publik terhadap supremasi hukum.

Apabila dilanjutkan, pengampunan terpidana korupsi justru menjadi preseden buruk bagi pelaku korupsi di masa mendatang.

Meskipun juga tidak terlalu jelas bentuk permintaan maaf seperti apa yang mungkin akan diberikan, gagasan ini semakin menjauhkan Indonesia dari amanat Konvensi Antikorupsi PBB (United Nation Convention Against Corruption/UNCAC).

Pasal 30 UNCAC dengan tegas menyerukan negara-negara pihak untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan derajat pelanggaran, bukan sebaliknya dengan memberikan sejumlah keringanan, terlebih amnesti bagi pelaku korupsi.

Langkah ini jelas bagaikan dokter yang salah memberikan obat akibat gagal mendiagnosis masalah utamanya.

Penggunaan amnesti—baik dalam kasus kejahatan ekonomi maupun yang lebih lazim digunakan dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia (HAM)—merupakan tindakan yang sangat kontroversial secara politik karena membenturkan secara langsung prinsip-prinsip pertanggungjawaban dan akuntabilitas pidana.

Dengan membatalkan putusan pengadilan dan/atau menghentikan penyelidikan dan penuntutan, amnesti justru

dapat melemahkan upaya untuk memberikan efek jera dan bahkan lebih jauh lagi seakan memberikan impunitas bagi mereka yang merenggut uang negara.

Kontroversi di Sejumlah Negara

Meski demikian, pendekatan amnesti untuk pidana korupsi pernah diterapkan di sejumlah negara dalam berbagai ragam.

Pada 2017, misalnya, Pemerintah Romania pernah mengajukan sebuah dekret darurat untuk mendekriminalisasi kejahatan korupsi jika kerugian negaranya kurang dari 34.000 euro sebagai dalih dari solusi sesaknya penjara-penjara.

Salah satu penerima manfaat langsung dari dekret tersebut yaitu Liviu Dragnea, pemimpin Partai Sosial Demokrat yang kala itu dituduh telah merugikan negara 24.000 euro. Dekret itu pada akhirnya kemudian dicabut lantaran kuatnya desakan publik.

Di Tunisia, langkah kontroversial serupa pernah didorong oleh Presiden Zine Ben Ali pada 2017. UU amnesti koruptor yang diterbitkan memungkinkan pengampunan bagi para pejabat selama mereka tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Selain sulit dicerna akal sehat karena minim akuntabilitas, legislasi tersebut juga sarat digunakan sebagai bentuk balas budi kepada para pemimpin bisnis yang mendukung kampanye partai penguasa sebelumnya.

Contoh lain juga jelas terekam ketika pada 2022 mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengobrol pengampunan kepada para pemimpin bisnis atau chaebol, seperti bos perusahaan raksasa Samsung Electronics, Lee Jae-yong, yang menjadi terpidana korupsi, dengan dalih untuk membantu aktivitas ekonomi negaranya.

Di belahan dunia yang lebih dekat, mantan Presiden Filipina Joseph Estrada sebelumnya diperintahkan pengadilan untuk mengembalikan aset yang diperoleh secara tidak sah senilai 16,7 juta dollar AS pada 2007 karena ia terbukti menyalahgunakan uang negara.

Estrada mencabut banding dan sebagai gantinya meminta amnesti tak bersyarat (unconditional amnesties) kepada presiden selanjutnya, Gloria Macapagal Arroyo. Amnesti kepada Estrada secara kontroversial



diberikan dan sontak menuai beragam kecaman karena ditengarai merupakan hasil kesepakatan politik dengan oposisi.

Sebelumnya, Filipina juga pernah menerapkan amnesti bersyarat dalam rangka mendukung proses litigasi pemulihan aset hasil korupsi mantan presiden yang lain, yakni Ferdinand Marcos.

Amnesti Bukan Solusi

Berkaca dari pengalaman sejumlah negara di atas, sangat sulit berharap penerapan amnesti untuk para koruptor dapat menjadi solusi bagi macetnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Di sejumlah negara, dengan skor Indeks Persepsi Korupsi yang tinggi, selain terus memaksimalkan hukuman pidana badan, perampasan aset juga diatur secara lebih ketat.

Dari pola penerapannya di negara-negara lain, amnesti hanya digunakan sebagai pengecualian secara kasuistis dan hal ini pun lebih banyak dijalankan oleh negara-negara pasca-konflik berkepanjangan dengan mekanisme transitional justice dengan tujuan agar pemerintahan yang baru

bisa berjalan mulus.

Kebijakan amnesti bagi koruptor juga jelas tidak menguntungkan Presiden Prabowo Subianto karena justru akan semakin menyuburkan budaya impunitas karena calon pelaku kejahatan mengetahui bahwa korupsi pada akhirnya akan diabaikan atau diampuni.

Pemberian amnesti atau beberapa bentuk keringanan terhadap koruptor—selain yang sudah diatur dalam UU saat ini—juga merupakan keputusan yang sangat sensitif, sehingga rentan memicu penolakan publik yang besar.

Amnesti yang dinormakan secara terlalu luas atau berulang akan kian memperkuat sinyal impunitas karena berpotensi digunakan sebagai “karpet merah” bagi para konglomerat korup serta pelaku kejahatan ekonomi dan pencucian uang.

Sebelum tergesa-gesa terjun ke pendekatan amnesti, langkah paling nyata yang semestinya dilakukan ialah memperkuat kembali independensi kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi serta segera mengamendemen Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang lebih komprehensif.

Tentu saja selain juga terus mengurai benang kusut korupsi dalam sistem politik dan pemilihan umum kita. ●





BERHASIL MENJAGA FATALITAS KECELAKAAN

Pengendalian transportasi di Sumatera Selatan sudah berjalan cukup baik. Hasil evaluasi Kementerian Perhubungan menyebutkan, kondisi transportasi di Bumi Sriwijaya masuk kategori baik. Dilihat dari kesibukan arus lalu lintas saat Natal dan Tahun Baru 2025, Sumsel berhasil mengendalikan dan menjaga lalu lintas dari fatalitas kecelakaan.

Hasil ini disampaikan Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) Republik Indonesia (RI) Drs. Suntana, MSI pada rapat Evaluasi Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 serta Koordinasi dan Antisipasi Isu Strategis Transportasi di Provinsi (Sumsel) dalam rangka Persiapan Angkutan Lebaran Tahun 2025.

Wamen Perhubungan RI Suntana mengatakan, berbagai hal telah dibahas, salah satu poin utamanya adalah mengevaluasi transportasi atau pengamanan natal dan tahun baru di Provinsi Sumsel.

Wamenhub mengapresiasi masyarakat Provinsi Sumsel yang telah berhasil

mengendalikan dan menjaga lalu lintas daerah dari fatalitas kecelakaan.

"Alhamdulillah secara nasional mengalami penurunan, sedang kita kaji lagi kenapa penurunannya untuk kita evaluasi guna angkutan lebaran, dari data lalu lintas fatalitas kecelakaan jauh berkurang dibandingkan tahun lalu, mudah-mudahan sampai tanggal 8 nanti ini tetap bisa dikendalikan dan dijaga sehingga kepadatan lalu lintas dan kemacetan bisa dikelola supaya, masyarakat bisa lancar melakukan aktifitas," katanya

Dalam rapat tersebut juga membahas beberapa isu yang diperlukan backup dari pemerintah pusat, seperti dalam rangka meramalkan Kereta ce-

pat light rail transit (LRT) dengan target 20.000 penumpang.

"Kita akan menambah berapa feeder yang telah diusulkan oleh pemerintah kota Palembang dan pemerintah provinsi agar, tingkat masyarakat yang menggunakan LRT itu mengalami peningkatan sampai target 20.000 mudah-mudahan bisa kita realisasi cepat," tambahnya dalam

rapat yang diselenggarakan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumsel.

Kemudian, Wamenhub menyebut beberapa usulan dari Pj Gubernur Sumsel dan Pj Walikota Palembang, salah satunya adalah penambahan penerbangan internasional langsung

dari Palembang ke Singapore dan Kuala Lumpur.

"Mengingat tingginya permintaan masyarakat, terutama yang ingin melakukan perjalanan internasional tanpa harus transit di Jakarta atau Batam. Pemerintah akan mendukung upaya segala yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi," tambahnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi, menyampaikan surat permohonan terkait status internasional SMB 2 sudah diajukan, dan komunikasi dengan pihak Kementerian Perhubungan sudah dilakukan.

Elen berharap penerbangan internasional langsung akan segera kembali tersedia, memberikan kemudahan akses bagi masyarakat Sumatera Selatan dan sekitarnya.

"Tadi juga penambahan Feeder sudah disepakati nanti pak walikota yang menyiapkan tambahan, kedua Tanjung Carat kita sepakati percepat, memang ada dua hal yang pertama adalah kawasan pelabuhan proses percepatan hpl nya sudah dilakukan tinggal mekanisme model pembangunannya ditetapkan oleh Kemenhub," tuturnya.

Tinjau Kerusakan Ruas Jalan

Dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi, bersama Sekda Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra, MH dan Pj Walikota Palembang Dr. Cheka Virgowansyah meninjau jalan rusak yang berada di kawasan Gandus Palembang.

"Hari saya bersama pak Walikota Palembang, Pak Sekda, Asisten dan Dinas terkait lainnya kita melihat langsung di lapangan, yang dilaporkan oleh masyarakat di Jalan Gandus ini," ucapnya.

Dalam tinjauannya tersebut Elen menegaskan dalam waktu dekat ruas jalan yang mengalami kerusakan itu segera diatasi.

"Insya Allah semua sepakat ini segera di bangun jalannya mungkin menggunakan trase yang berbeda tidak sama. Untuk lahannya sudah sepakat dengan pemilik lahan, RT serta warga setempat

ini untuk segera kita bangun," katanya.

Elen menegaskan, perbaikan akan dilakukan secara parsial, sehingga meskipun ada pengerjaan tetap bisa dilewati masyarakat. Selain itu angkutan berat jenis truk dimintanya untuk mengurangi beban muatan.

"Untuk beban pengangkutan barang di musim penghujan seperti sekarang

"Jadi saya minta di Dinas PU untuk melelang proyek karena anggarannya sudah berjalan di tahun ini, mungkin butuh waktu sekitar bulan Januari sampai Februari. Dan kita pastikan ini dibangun segera," terangnya.

Elen menyebut pembangunan yang menggunakan APBD Provinsi ini nanti dengan penataan yang nantinya bek-



ini dikurangi dulu agar jalan tidak terlalu cepat rusaknya," harapnya.

Elen menegaskan ruas jalan ini yang sudah berulang kali diperbaiki, namun selalu saja rusak dikarenakan kontur tanahnya lembek tidak mampu menampung beban berat.

"Kita sudah desain membuat semacam jalan layang disini, nanti ini akan menjadi icon baru disini," jelasnya.

Elen memastikan untuk pembangunannya akan segera dikerjakan, mengingat sudah memasuki anggaran di tahun 2025.

erja sama dengan Pemkot Palembang sehingga diharapkan akan memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Harapkan kita menjadi destinasi baru dan masyarakat mendapatkan manfaat yang banyak disini," tutupnya.

Sementara itu, Pj Walikota Palembang Dr. Cheka Virgowansyah mengatakan daerah Gandus yang terletak di pinggiran Sungai Musi akan dimaksimalkan penguatan icon Sungai Musi.

"Mudah-mudahan nantinya ramai pengunjung kesini. Desain akan kita sampaikan," pungkasnya. ●

INFLASI SUMSEL TERJAGA DI BAWAH NASIONAL

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil menjaga inflasi tetap terkendali. Sumsel menempati peringkat kedelapan inflasi terendah di bawah nasional yang berada pada angka 1,57 persen.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) pada bulan Desember 2024 tetap terjaga dengan inflasi m-to-m sebesar 0,50%, inflasi y-on-y sebesar 1,20% dan inflasi y-to-d sebesar 1,20%.

Dengan inflasi Desember 2024 (y-on-y) 1,20 % tersebut menempatkan Sumsel pada peringkat ke 8 inflasi terendah dibawah nasional.

"Penyumbang utama inflasi Desember 2024 secara m-to-m adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,53%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok tersebut yaitu cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, bawang merah, dan minyak goreng," ungkap Kepala BPS Sumsel Wahyu Yulianto pada rilis Berita

Resmi Statistik (BRS) BPS Sumsel yang dihadiri langsung Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi.

Adapun penyumbang utama inflasi Desember secara y-on-y lanjut Wahyu, adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,58%. Komoditas penyumbang utama inflasi y-on-y antara lain emas perhiasan, daging ayam ras, minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih.

"Komoditas cabai merah, telur ayam ras, bawang merah, cabai rawit dan minyak goreng menjadi komoditas penyumbang andil inflasi terbesar di kabupaten/kota inflasi di Sumatera Selatan pada bulan Desember 2024 Sedangkan komoditas yang menjadi penyumbang deflasi terbesar di seluruh kabupaten/kota inflasi Sumatera Selatan adalah to-

mat," paparnya.

Sebagai upaya konsisten dalam pengendalian inflasi pemerintah daerah tugas Wahyu, dengan menggelar upaya stabilisasi harga komoditas pangan di sejumlah Kabupaten/kota di Sumsel seperti Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah, Pasar Murah dan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Sumatera Selatan.

Wahyu mengungkapkan sejumlah catatan peristiwa penting yang terjadi sepanjang tahun 2024 yang berdampak terhadap ekonomi Sumsel diantaranya : Penyesuaian Harga BBM Ron Subsidi (Pertamax Pertamina Turbo Dexcelite dan Pertamina Dex sepanjang tahun 2024 mengalami penyesuaian harga sebanyak 6 kali yaitu pada bulan Januari, Agustus, September Oktober, Novem-



ber dan Desember.

Selain itu terjadi kenaikan harga emas yang dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global menyebabkan harga emas semakin menguat dan terus mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2004. Selain itu juga ada pengaruh dari kondisi iklim cuaca ekstrim La Nina menyebabkan terjadinya pergeseran musim tanam dan panen serta produksi pangan maupun hortikultura.

"Kemudian dampak dari kenaikan harga minyak goreng, kenaikan tarif angkutan udara juga berpengaruh terhadap perekonomian Sumsel," tambahnya.

Sementara itu Pj Gubernur Elen Setiadi mengapresiasi semua pihak beserta jajaran OPD yang telah bekerja sama dalam menjaga stabilnya inflasi di Sumsel.

"Alhamdulillah kita tadi sudah mengikuti menyimak rilis dari BPS Sumsel dan hasilnya cukup baik, dalam hal ini saya mengapresiasi semua pihak yang telah bekerja sama dalam menjaga kestabilan inflasi di Sumsel dan kita juga masih dibawah nasional," kata Elen.

Elen optimis jika kedepan inflasi Sumsel akan jauh lebih stabil jika semua pihak turun langsung mengatasi yang menjadi penyebab terjadinya inflasi dengan melakukan inovasi dalam menjaga kestabilan inflasi terutama di momen hari besar.

"Kita optimis inflasi di Sumsel ini tetap terjadi, apalagi kita akan dihadapkan dengan bulan puasa dan Idul Fitri 2025, karena itu komoditi yang menjadi penyebab inflasi perlu mendapat perhatian khusus," imbuhnya.

Lebih jauh dia memastikan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) perlu terus didorong termasuk dikalangan sekolah-sekolah.

"Gerakan Mandiri Pangan Goes To School dan Goes To Office akan kita masifkan agi, ini juga upaya kita mengatasi inflasi menjelang ramadhan dan Idul Fitri," tambahnya.

Lebih jauh Elen, mengucap syukur nilai ekspor dan Nilai Tukar Petani (NTP) Sumsel terbilang stabil. Dimana berdasarkan catatan BPS NTP per Desember 2024 berada di angka 128,5. Sedangkan Nilai Perkembangan Ekspor Sumsel diantaranya sektor pertanian 13,99 juta US, Industri 284,42 juta US, Pertambangan juta US, Migas 42,08 juta

US, total 642,88 juta US.

"Nilai ekspor kita tetap tumbuh jadi ini berita yang baik, begitu juga nilai tukar petani yang tinggi dari nasional ini lebih baik dan ini harus kita jaga, karena ini menjadi pokok penting bagi kesejahteraan petani," tandasnya.

Naikkan UMP Sumsel

Guna menyeimbangkan kebutuhan masyarakat, Pj Gubernur Elen Setiadi, mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektor

pan Upah Minimum Tahun 2025.

Dalam SK Gubernur Sumsel tersebut memuat UMP Sumsel tahun 2025 naik 6,5% atau Rp.224.697 dari UMP Sumsel tahun 2024 sebesar Rp.3.456.874, sehingga UMP Sumsel Tahun 2025 naik menjadi Rp 3.681.571. Sedangkan untuk UMP Sektor Provinsi Sumsel Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp. 3.737.424.

"Alhamdulillah kita sepakat, dan hari ini kita umumkan UMP dan UMSP. Untuk UMP Sumsel tahun 2025 naik 6,5 persen



Provinsi (UMSP) Sumatera Selatan (Sumsel) tahun 2025.

Pengumuman penetapan UMP dan UMP Sektor tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 921/KPTS/DISNAKERTRANS/2024 dan Keputusan Gubernur Sumsel Nomor 922/KPTS/DISNAKERTRANS/2024 tertanggal tanggal 11 Desember 2024. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Peneta-

atau Rp 224.697 menjadi Rp 3.681.571," kata Elen Setiadi.

Menurutnya, hal ini sudah sesuai dengan hasil rapat dewan pengupahan. Harapannya tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik, semakin maju dan luas serta sejahtera kedepannya.

"Kita patut bersyukur Sumsel secara rata-rata nasional upah kita lebih tinggi, karena rata-rata nasional Rp 3,3 juta, bahkan ada dibawah itu seperti di Jawa Tengah," katanya. •

LUNCURKAN GERAKAN TANAM CABAI DAN BAWANG SERENTAK

Salah satu keberhasilan Sumatera Selatan dalam mengendalikan inflasi adalah melakukan gerakan tanam serentak kebutuhan pangan di halaman rumah. Upaya yang terlihat kecil ini bisa dilakukan secara serentak, namun berdampak besar terhadap pengendalian inflasi.

Melihat hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi meluncurkan gerakan Gerakan Tanam Cabai dan Bawang Merah serentak di Sumsel sebagai upaya pengendalian inflasi.

Gerakan tanam cabai dan bawang merah serentak ini yang ditandai den-

mengendalikan inflasi. Salah satunya dengan memulai menanam di pekarangan rumah, sekolah, maupun kantor," ucap Elen Setiadi.

Dia berharap melalui gerakan tanam cabai dan bawang merah yang bekerjasama dengan berbagai pihak. Kemudian, dapat menstimulasi petani dalam meningkatkan usaha tani cabai dan

kantor swasta," imbuhnya

Lebih jauh Elen Setiadi mengungkapkan dalam waktu dekat pihaknya bersama dengan kabupaten/kota mengembangkan lahan cabai terutama bawang merah.

"Kabupaten/kota menyiapkan lahan, kalau dibutuhkan bantuan keuangan nanti, akan diberikan bantuan keuangan, selain bibit dan pupuk untuk



gan penanaman perdana benih cabai yang dipusatkan di lahan kebun UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih (BPSB) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Sumsel.

"Saya mengajak 17 Kabupaten/Kota Se-Sumsel, stakeholder, dan seluruh unsur masyarakat, untuk bersama-sama

bawang merah yang telah dilakukan sehingga produksi lebih meningkat dan dapat menurunkan laju inflasi di Provinsi Sumsel.

"Mulai hari ini kita sudah melakukan gerakan penanaman serentak, yang nantinya diikuti di kantor-kantor pemerintahan, kemudian juga diikuti di kantor-

pengolahannya, mudah-mudahan nanti harapan kita 60-70 hari kedepan produksi cukup, walaupun masih akan ada ketergantungan tetapi tidak sebesar yang terjadi pada saat ini," katanya.

Menurut Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi, potensi yang ada harus dikembangkan dengan melakukan beberapa

upaya peningkatan produksi, seperti dengan perluasan areal pertanian, pemanfaatan teknologi pengembangan produksi yang tepat guna, peningkatan jaringan pemasaran dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian sebagai tenaga penggerak dan pemberi edukasi kepada petani cabai.

"Harapan kita harga cabai tetap terjaga, inflasinya juga tetap bisa kendalikan. Masyarakat yang ingin menanam cabai butuh bibit silahkan datang kesini. Kita minta semuanya terlibat dalam mengendalikan inflasi melalui gerakan menanam cabai dan bawang merah di pekarangan masing-masing," tegasnya.

Sementara Kepala Dinas (TPH) Provinsi Sumsel, Bambang Pramono menegaskan berbagai upaya mengendalikan laju inflasi telah dilakukan pihaknya dimulai pada tahun 2024 lalu.

Dimana UPTD BPSBTPH telah mendistribusikan bantuan bibit cabai sebanyak 5.141 polybag dan bawang merah sebanyak 2.371 polybag yang diserahkan kepada masyarakat umum, sekolah, instansi daerah dan pusat/vertikal, TNI, Polri, organisasi masyarakat dan kelompok tani.

"Selain itu, telah disalurkan juga bantuan bibit sayuran terong dan tomat. Cabai dan bawang merah merupakan komoditas strategis yang mempengaruhi laju inflasi di Provinsi Sumatera Selatan, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya dalam meningkatkan produksi cabai dan bawang merah tersebut," tuturnya.

Bambang merinci, daerah penyumbang terbesar cabai tahun 2024 adalah Kabupaten Muara Enim sebesar 3.469 ton, Kabupaten Musi Rawas sebanyak 2.283 ton dan Kabupaten Banyuasin sebanyak 1.620 ton.

"Penyumbang produksi terbesar bawang merah tahun 2024 adalah Kota Pagar Alam sebesar 530 Ton, Kabupaten Muara Enim sebesar 162 Ton dan Kabupaten Musi Rawas sebesar 58 ton," terangnya.

Apresiasi Lembaga Dalam Pengendalian Inflasi

Pj Gubernur Sumatera Selatan Elen Setiadi juga menyampaikan ucapan terima kasihnya atas dukungan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia dan lembaga lainnya yang telah

banyak membantu dalam pengendalian inflasi di Sumsel, sehingga mendapatkan apresiasi dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Ini berkat kerjasama kita semua sehingga program pengendalian inflasi kita mendapatkan apresiasi dari Pak Presiden RI," kata Elen saat menghadiri Evaluasi dan Apresiasi Program Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Sumsel.

Dikesempatan ini Elen mengatakan

ejahteraan juga akan semakin baik.

"Saya apresiasi yang telah memberikan dukungannya terhadap kemajuan Sumsel," tambahnya.

Di Kesempatan itu Elen menyambut baik di launchingnya buku pencegahan pinjol dan judi online.

"Kita menyambut baik buku ini, OJK telah banyak melakukan pencegahan dan perlu dukungan terus," tuturnya.

Sementara itu Kepala Kantor OJK Regional 7 Sumbagsel, Arifin Susanto men-



kerjasama ini terus dilakukan apalagi potensi yang ada di Sumsel itu sangat besar.

"Mari kita bersama-sama, kita punya potensi yang besar kalau dikerjakan dengan baik saya yakin potensi ekonominya akan baik," ujarnya.

Elen mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah diberikan selama ini, dengan dukungan yang ada serta potensi yang sangat baik dia yakin kes-

gataan Sumsel memiliki potensi yang besar salah satunya adalah komoditas kopi, dimana Provinsi Sumsel merupakan daerah penghasil kopi terbesar nasional.

"Kami berinisiasi bersama dinas yang kita rencana mengekspor kopi ke negara Malaysia dan Australia. Artinya satu program kerja yang digagas oleh pak Gubernur ini semoga ini menjadi kenyataan," harapnya. •

JADI ANDALAN PROGRAM SWASEMBADA PANGAN

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong Sumatera Selatan sebagai andalan dalam menyukseskan Program Swasembada pangan nasional.

Dorongan itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan dengan melibatkan peserta Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi, Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI, Yandri Susanto, Anggota DPR RI, Kartika Sandra Desi, Wakil Mendagri RI, Bima Arya Sugiarto, para Forkopimda Sumsel, Bupati / Walikota Se Sumsel dan Kepala OPD Sumsel serta stakeholder terkait, ber-

optimalisasi. Persoalan yang ada, baik irigasi, pupuk, dan lainnya. Termasuk membuka lahan baru sehingga nantinya kita tidak impor lagi," terangnya.

Untuk Provinsi Sumsel lanjut dia, lahan yang disiapkan terbilang luas hampir 500 ribu hektar. Apalagi Sumsel sebagai daerah lumbung pangan dan menjadi andalan. Karena itu dibutuhkan kerjasama semua pihak dalam mencapai swasembada pangan baik beras, garam, jagung dan gula.

"Kunci Sukses swasembada pangan itu optimalisasi lahan, pak Pres-

untuk mendukung program ini, mengingat masa panen tidak lama lagi.

"Pada bulan Februari, Maret dan April puncaknya panen raya. Maka ini perlu dukungan kita semua," tutupnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengatakan Provinsi Sumsel memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.973.168 jiwa dengan luas wilayah 87.071.41 km² yang terdiri dari 17 kabupaten dan kota.

Produksi beras Sumatera Selatan tahun 2024 sebanyak 1.635.610 ton dan konsumsi sebanyak 846.060 ton sehingga surplus sejumlah 789.550 ton (tertinggi sepanjang empat tahun terakhir).

"Komoditi pangan lain yang sudah swasembada di Sumsel adalah ikan (budidaya dan tangkap) dan telur ayam ras. Produksi ikan (budidaya dan tangkap) tahun 2023 sebanyak 488.805 ton sedangkan jumlah kebutuhan (konsumsi) sebanyak 373.116,7 ton sehingga surplus sebanyak 115.688,3 ton," ucapnya.

Sedangkan untuk Produksi telur ayam ras tahun 2024 sebanyak 145.359.158 kg dan jumlah konsumsi sebanyak 68.715.900 kg sehingga surplus 76.643.258 kg.

Selain itu Elen mengatakan kelebihan beras, daging dan telur ayam ras di kirim keluar Provinsi Sumsel antara lain ke Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Bangka Belitung. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan yang masih kurang di datangkan dari Provinsi lain.

"Pemerintah provinsi Sumatera Selatan juga melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan beberapa provinsi untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan yang masih kurang," ucapnya.



tempat di Griya Agung Palembang.

Zulkifli Hasan dengan tegas mengatakan rakor dimaksudkan untuk menyetukan langkah dan visi misi dalam menyukseskan di bidang pangan salah satunya untuk mensukseskan program swasembada pangan yang menjadi prioritas pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

"Karena itu beberapa langkah yang perlu dilakukan, kita semua harus bergerak cepat dengan melakukan

iden sangat konsen hal ini," ungkapnya.

Disisi lain Menko mengatakan untuk gabah harganya akan dinaikkan dari Rp. 6.000 menjadi Rp. 6.500, jagung dari Rp. 5.000 menjadi Rp. 5.500.

"Pada Tanggal 15 nanti Bulog akan membeli gabah dengan harga Rp. 6.500. Sementara jagung akan mulai dibeli pada bulan Februari dengan harga Rp. 5.500," ucapnya.

Dia meminta kepada Gubernur, Bupati, Forkopimda dan pihak lainnya

Selain itu Perekonomian Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,9% yang merupakan terbesar ke 2 di Pulau Sumatera dan laju inflasi sebesar 1,87% (yoy) pada bulan Juli 2024, sedangkan angka kemiskinan masih 2% diatas nasional yaitu 10,97%.

"Pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi kelangsungan hidup manusia, sehingga pemerintah mempunyai kewajiban memenuhi pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan," terangnya.

Untuk menjaga dan meningkatkan produksi pangan di Provinsi Sumatera Selatan berbagai upaya telah dilaksanakan seperti, Percepatan Penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), percepatan Peningkatan Pangan dan Stabilisasi Pangan dan Harga Pangan, percepatan Peningkatan Tanaman Perkebunan dan Percepatan Pengembangan BUMD dan Pembiayaan Usaha UMK.

Kemudian percepatan Pengembangan Transportasi dan Regional, Percepatan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Penguatan PUU serta Peningkatan Kemasyarakatan. Pengelolaan Isu Sosial dan

Disamping itu, penyelesaian beberapa isu tentang Inflasi, Pengentasan kemiskinan, Prevalensi stunting dan kekurangan gizi, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi tugas bersama, karena hal tersebut tidak hanya menjadi beban satu instansi saja, tentu kerja keras, koordinasi dan sinergi bersama seluruh pihak harus terus dilakukan.

Tinjau Panen Raya

Selain melakukan rapat koordinasi Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga meninjau lahan cetak sawah dan panen raya di Desa Sri Menanti Kecamatan, Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan kedatangannya ke Kabupaten Banyuasin tak lain untuk menyampaikan pesan Presiden RI Prabowo Subianto bahwa menjelang panen raya ini pemerintah menjaga agar harga beras tidak jatuh di bawah

harga yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500/Kg.

"Ini poin penting pesan Bapak Presiden, kemarin malam jangan sampai panen, jelang panen raya tapi harganya jatuh di bawah harga yang ditetapkan pemerintah," jelas Menko.

Saat ini lanjut Menko, panen sudah mulai dan diperkirakan puncak panen akan terjadi pada bulan Maret-April mendatang. Untuk menjaga harga tidak jatuh, saat ini sedang diselesai-

Wamendagri Bima mengatakan dirinya sengaja melihat secara langsung di lapangan kondisi irigasi di Kabupaten Banyuasin yang nantinya akan diperbaiki guna menunjang peningkatan produksi padi di kawasan tersebut.

"Kami melihat kondisi di lapangan katanya Banyuasin lumbung padi nasional. Kalau kondisi ini bisa disentuh lagi dengan perbaikan-perbaikan irigasi maka akan meningkatkan lagi panennya bukan 1 kali, 2 kali bahkan



kan perjanjian antara Bulog dengan pabrik-pabrik padi yang ada di seluruh Indonesia. Dimana pabrik padi akan dibeli berasnya oleh bulog seharga Rp 6500/Kg.

Usai panen, rombongan Menko juga sempat menyapa para petani dan berbincang-bincang. Salah satu hal yang dikemukakan petani yakni soal irigasi sawah.

Terkait irigasi Menko mengatakan agar petani tak perlu lagi khawatir karena secepatnya akan diselesaikan oleh pemerintah.

Sementara disela-sela tinjauannya

3 kali," katanya.

Bima menegaskan, dari hasil tinjauannya dia melihat kondisi saluran irigasi yang mengalami pendangkalan atau sedimentasi yang sudah menahun ini harus diperbaiki.

"Opsinya lanjut dia tentu kalau tidak melalui pemeliharaan ada dana dari program cepat. Kemudian nanti cek juga supaya bisa dialokasikan dari Kementerian PU," ucapnya.

Bima Arya menegaskan sesuai dengan target Presiden RI Prabowo Subianto, tentunya perlu didukung dengan jaringan irigasi. •

PRESIDEN PRABOWO PUJI PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI PJ GUBERNUR SUMSEL ELEN SETIADI

Presiden Prabowo Subianto secara terang-terangan memuji program pengendalian inflasi yang dilakukan Penjabat Gubernur Sumsel Elen Setiadi.

Pujian tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Bidang Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2024 dirangkaikan dengan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025 diselenggarakan Kemendagri secara virtual, Senin 9 Desember 2024.

"Tadi juga dari Provinsi Sumatera Selatan ya, bagus itu langkah langkahnya yang mereka ambil (Program Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Se-Sumsel). Nanti Saya minta print out dari langkah-langkah yang mereka ambil. Saya kira gerakan serentak itu benar dan saya kira ini sesuatu yang baik dan sesuai arah besar kita gerakan tanam serentak," ujar Presiden Prabowo menanggapi paparan singkat Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi.

Selain mengapresiasi langkah pengendalian inflasi yang dilakukan Pemprov Sumsel, Presiden Prabowo juga

memberikan beberapa arahan dalam Rakor tersebut.

Prabowo mengingatkan agar semua Kementerian dan Lembaga juga pemerintah daerah fokus pada pengendalian inflasi dan peningkatan produksi. Serta menekankan pentingnya mewujudkan swasembada pangan nasional.

"Swasembada pangan dalam arti yang luas dalam arti yang menyeluruh. artinya kita swasembada secara nasional iya. Tapi kita juga harus swasembada secara besar kita juga harus swasembada secara kabupaten bahkan di tiap kecamatan, ini adalah kearifan bermasyarakat nenek moyang kita dari dulu. Kita diajarkan tiap desa harus punya lumbung pangan. Jadi inilah strategi besar kita apakah kita akan mencapainya dalam waktu yang lama atau sedang itu nanti tergantung upaya kita," jelas



Presiden Prabowo.

Sementara itu Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi dalam paparan singkatnya menjelaskan bahwa selain dapat mengendalikan inflasi, Provinsi Sumsel juga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi.

Dalam mengendalikan inflasi, Pemprov Sumsel menurutnya melakukan berbagai langkah melalui Program Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumsel. Gerakan ini menitikberatkan pada penguatan pasokan dan distribusi bahan pangan.

Penguatan tersebut dilakukan dengan Gerakan Tanam (Gertam) Cabai dan Bawang Merah Serentak se-Sumsel di 45 titik di 17 Kabupaten/Kota.

Perjanjian Kerjasama (PKS) Kerjasama Antar Daerah (KAD) Kerjasama dengan daerah penghasil.

Penguatan Ketersediaan Pasokan melalui Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) Goes to School dan Office.

Operasi pasar murah (OPM) Serentak secara rutin yang bersinergi dengan BUMN/BUMD, swasta, perbankan, TNI, Polri, (Subsidi harga ongkos dan lainnya).

Selain itu bekerjasama dengan Bulog Kanwil Sumsel dan Koperasi di 17 Kabupaten/Kota sebagai Penyaluran/Distribusi Beras Program Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) dan Komoditi Pangan Lainnya.

Peningkat Peran, Bulog dalam penyediaan beras untuk ASN di Sumsel (Kerjasama Provinsi dan Kab/Kota dengan Bulog).

"Kita juga memantau harga dan stok, melakukan dukungan penyediaan pangan oleh Polda Sumsel dan Kodam II Sriwijaya dengan pemanfaatan lahan Polda dan Kodam II Sriwijaya. Melakukan peningkatan lahan sawah serta sidak pasar dan gudang," jelasnya.

Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D.

Mendagri Tito Karnavian juga mengatakan, selain membahas perkembangan inflasi daerah, rapat tersebut membahas arahan kebijakan Upah Minimum tahun 2025.

Dimana sebelumnya sudah dilakukan ratas dengan Presiden agar difol-

low up oleh para kepala daerah sesuai dengan aturan daerah masing-masing untuk keperluan keseimbangan antara pengusaha dan para buruh.

Hadir juga dalam kesempatan virtual tersebut yakni Sekda Sumsel Drs. H. Edward Candra, MH melalui meeting zoom dari Griya Agung Palembang. •



INFRASTRUKTUR DAN SDM FONDASI KUAT MEMBANGUN PEREKONOMIAN OGAN ILIR

Rapat Paripurna Istimewa VIII DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI) Masa Sidang ke 2 Tahun 2025, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten OI Ke-21 Tahun 2025 dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Elen Setiadi.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten OI Edwin Cahya Putra, S.IP, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Indralaya, Selasa 7 Januari 2025.

Elen Setiadi mengapresiasi Bupati dan Wakil Bupati OI yang telah berkontribusi terhadap kemajuan Kabupaten OI dalam berbagai sektor pembangunan, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata, sehingga kabupaten ini telah berhasil mendapatkan berbagai macam penghargaan.

"Saya sangat mengapresiasi atas semua prestasi yang telah berhasil dicapai selama ini yang mencerminkan adanya kerja keras, dedikasi, dan komitmen seluruh jajaran pemerintahan Ogan Ilir," katanya.

Elen juga menyebut capaian tersebut dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Semua capaian harus dapat dipertahankan dan dilanjutkan.

Elen menegaskan Pemprov Sumsel

dan Pemkab OI harus bersinergi untuk mendukung berbagai pembangunan daerah dan nasional yang inklusif dan berkeadilan, di mana setiap elemen pemerintahan berperan aktif untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Sumsel berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan Kabupaten OI, terutama dalam meningkatkan konektivitas, mempercepat pengembangan ekonomi lokal, dan mengurangi ketimpangan



antar wilayah,” tambahnya.

Menurut Elen, bersama dengan seluruh pemangku kepentingan menetapkan dan melaksanakan kegiatan prioritas di Sumsel secara konsisten dan berkelanjutan,

“Mari terus bangun sinergitas dengan berbagai pihak. Semoga di tahun baru 2025 ini, semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Kita belajar dari masa lalu, kita perbaiki hari ini, dan kita sempurnakan esoknya,” tandasnya.

Sementara Bupati OI Panca Wijaya Akbar menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Pj Gubernur Sumsel atas perhatian dan dukungan pembangunan di Kabupaten OI.

“HUT ini merupakan ungkapan syukur terhadap dinamika perjalanan pembangunan Kabupaten OI sejak dibentuk hingga sekarang. Pembangunan infrastruktur dan SDM merupakan pondasi yang kuat dalam membangun perekonomian di Ogan Ilir,” ungkapnya.

Ia mengajak seluruh komponen masyarakat dapat menjadikan HUT OI sebagai sarana refleksi terhadap apa yang telah, sedang dan akan dilakukan khususnya bagi pembangunan.

“Dengan dilandasi rasa memiliki dan komitmen bersama, kompak Insya Allah secara berharap apapun bisa kita wujudkan,” jelasnya.

Dilain pihak Ketua DPRD OI, Edwin Cahya Putra mengapresiasi dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terbentuknya dan pembangunan di Kabupaten OI.

“Saya mengajak semua unsur pemerintah Kabupaten OI, DPRD dan masyarakat menjadikan momentum ini untuk meningkatkan kemampuan kinerja, pengabdian, dan proker pembangunan dengan sebaik-baiknya sesuai visi dan misi dalam rangka mewujudkan masyarakat Ogan Ilir yang sejahtera dan maju berkelanjutan,” ujarnya.

Usai paripurna dilanjutkan pemotongan tumpeng dan peninjauan stand expo yang digelar di lapangan kompleks perkantoran Ogan Ilir.

Pameran ini diselenggarakan untuk menunjukkan potensi dan kekayaan daerah OI kepada masyarakat luas, serta sebagai ajang promosi produk-

produk lokal yang memiliki kualitas tinggi.

Pameran yang dibuka di Lapangan Komplek Pemda Tanjung Senai, Indralaya, ini menampilkan berbagai produk unggulan yang dihasilkan oleh masyarakat dan pelaku usaha lokal Kabupaten OI.

Produk yang dipamerkan antara lain adalah kerajinan tangan, produk pertanian, hasil perikanan, hingga produk olahan makanan khas daerah.

Pameran ini juga menjadi ajang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mempromosikan produk mereka dan mendapatkan akses pasar yang lebih besar.

Pemda OI memberikan fasilitas berupa stan pameran tanpa biaya kepada para pelaku UMKM lokal, sehingga mereka dapat memperkenalkan produk mereka dengan lebih mudah.

Pameran produk unggulan lokal ini tidak hanya menjadi ajang promosi



Beberapa produk unggulan yang mencuri perhatian pengunjung adalah kerajinan pandai besi, makanan tradisional seperti pempek dan kerupuk, serta berbagai produk hasil pertanian seperti buah-buahan, sayuran, dan rempah-rempah.

Produk-produk ini tidak hanya memiliki daya tarik lokal, tetapi juga berpotensi untuk dipasarkan ke pasar yang lebih luas, bahkan di luar OI.

produk, tetapi juga sebagai wadah untuk menunjukkan potensi besar Kabupaten OI dalam bidang ekonomi kreatif dan industri lokal.

Dengan adanya pameran seperti ini, Pemda OI berharap dapat memberikan dukungan kepada pelaku usaha lokal untuk terus berkembang, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor-sektor ekonomi yang ada. ●

2.928 SISWA PALEMBANG JADI SASARAN AWAL MAKAN BERGIZI GRATIS

Kota Palembang menjadi pelopor di Sumatera Selatan (Sumsel) dalam melaksanakan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Program ini resmi diluncurkan pada hari pertama masuk sekolah, Senin 6 Januari 2025, usai libur panjang.

Palembang sendiri terpilih menjadi daerah penerapan awal Program Makan Bergizi Gratis secara serentak se-Indonesia.

Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim menjelaskan komitmen Pemerintahan Kota (Pemkot) Palembang untuk memastikan keberhasilan program MBG.

"Kami akan membentuk Satgas khusus untuk mengawasi pelaksanaan program ini, sehingga hasilnya lebih maksimal," katanya.

Selain menyasar siswa, program ini

juga ditujukan bagi anak-anak dan ibu menyusui di sekitar sekolah. Aprizal menyebutkan, dana program sepenuhnya berasal dari pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional.

Ke depan, Pemkot Palembang juga berharap program MBG dapat menggendeng UMKM lokal di bidang kuliner.

"Kami ingin memberikan manfaat lebih luas, tidak hanya kepada peserta didik, tetapi juga kepada UMKM yang dapat terlibat dalam penyediaan makanan. Dengan kerja sama ini, kami yakin program ini akan memberikan dampak positif yang besar," jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Adrianus Amri mengun-

kapkan bahwa tahap awal program ini menyasar lima sekolah di Kecamatan Ilir Barat (IB) 1.

"Sebanyak 2.968 siswa dari TK Panca Bakti, SDN 24, SDN 25, SMPN 19, dan SMPN 33 Palembang mendapatkan MBG," jelas Amri pada acara peluncuran program pada 6 Januari 2025.

Amri menambahkan, program ini akan diperluas ke sekolah-sekolah di kecamatan lain seiring dengan kesiapan dapur umum di setiap wilayah.

"Setiap dapur umum mampu memasak hingga 3.000 porsi sehari untuk dibagikan. Kami harap seluruh sekolah di Palembang, mulai dari TK, SD, hingga SMP, bisa menikmati manfaat pro-



gram ini," ujarnya.

Meski masih terbatas untuk siswa di shift pagi pada tahap awal, Pemerintah Kota Palembang berjanji akan mengevaluasi agar program ini dapat mencakup seluruh siswa, termasuk yang belajar di shift siang.

"Ada lebih dari 260 ribu siswa di Palembang yang menjadi target program ini. Kami akan terus mengevaluasi pelaksanaan agar semua siswa dapat terakomodir," tutur Amri.

Program ini digadang-gadang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan asupan gizi siswa dan mendukung proses belajar mereka.

Amri menyebutkan bahwa program ini akan berlangsung pada jam istirahat sekolah.

"Untuk TK dan SD dimulai pukul 09.30 WIB, sedangkan SMP pukul 12.30 WIB," ujar Adrianus.

Sekolah Jadi Sasaran Awal Program Makan Bergizi Gratis di Palembang

SMPN 19 Palembang: 1.098 siswa

SMPN 33 Palembang: 594 siswa

SDN 25 Palembang: 606 siswa

SDN 24 Palembang: 604 siswa

TK Panca Bhakti I: 26 siswa

Dia merinci lima sekolah yang akan menerima manfaat tahap awal ini adalah TK Panca Bakti (26 siswa), SDN 25 (606 siswa), SMPN 19 (1.908 siswa), dan SMPN 33 (594 siswa). Total jumlah siswa yang terdata di tahap pertama ini mencapai 2.928 anak.

Program ini didukung oleh tiga dapur umum yang dibangun Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Ilir Barat Satu, Sukarami dan Kalidoni. Namun, untuk peluncuran awal, hanya dapur umum di Kecamatan Ilir Barat Satu yang siap melayani.

"Dapur ini mampu memasok hingga 3.000 porsi makanan per hari," ungkap Adrianus.

Menu yang disajikan dalam program ini terdiri dari nasi, lauk-pauk, sayur, buah-buahan, air mineral, dan susu. Dengan gizi yang terjamin, pemerintah berharap siswa dapat lebih fokus dan produktif di sekolah.

Adrianus juga menjelaskan anggaran program ini berasal dari pemerintah pusat melalui APBN. Biaya per porsi makan untuk siswa SMP sekitar Rp15

ribu, terdiri dari Rp10 ribu untuk bahan makanan dan Rp5 ribu untuk jasa distribusi.

Sementara itu, untuk siswa TK dan SD, biayanya lebih kecil, yakni Rp6 ribu untuk bahan makanan dan Rp5 ribu untuk jasa lainnya.

"Kami optimis, sepanjang tahun ini

berkelanjutan.

Adrianus menjelaskan bahwa tim ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, dan Badan Gizi. Tim bertugas merespons keluhan seperti keterlambatan pengantaran hingga kejadian luar biasa.



program MBG akan menjangkau seluruh sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Palembang," imbuhnya.

Sebagai bentuk dukungan, Adrianus Amri meminta sekolah-sekolah mempersiapkan ruang transit makanan, sarana cuci tangan untuk siswa, dan porsi cadangan untuk mengantisipasi situasi darurat.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak kesehatan untuk memastikan bahan makanan dalam kondisi baik sebelum dibagikan," ulasnya.

Terkait pembentukan tim khusus yang dilakukan guna menangani berbagai keluhan dan melakukan evaluasi

"Kami ingin memastikan bahwa segala kendala di lapangan dapat diselesaikan dengan cepat. Saat ini, mekanisme pelaporan masih manual, tetapi ke depan kami akan menerapkan sistem yang lebih modern untuk mempermudah pelaporan," tambahnya.

Dalam hal ini, pihaknya terus mengevaluasi proses distribusi makanan yang menggunakan mobil boks. Selain itu, pemerintah berencana mengganti wadah nasi berbahan plastik dengan wadah omprong yang lebih ramah lingkungan. Namun, hingga kini jumlah omprong masih terbatas dan akan digunakan secara bertahap. ●



HERMAN DERU SEGERA WUJUDKAN JANJI SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel) telah resmi menetapkan pasangan Herman Deru-Cik Ujang sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel Periode 2025-2030.

Pengumuman terpilihnya Herman Deru-Cik Ujang serentak dilakukan bersama 21 provinsi lain di seluruh Indonesia.

Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka di Gedung KPU Sumsel, Jakabaring, Palembang, Kamis 9 Januari 2025.

Rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB itu dihadiri oleh perwakilan KPU RI, Idham Khalik, dan pasangan calon terpilih.

Sementara, dua pasangan calon lainnya, Eddy Santana Putra - Rizki Aprilia dan Mawardi Yahya - Anita Noeringhati, tidak hadir.

Ketua KPU Sumsel, Andika Pranata Jaya, mengumumkan bahwa pasangan Herman Deru dan Cik Ujang memperoleh 2.220.437 suara atau 51,62 persen dari total suara sah.

"Dengan ini kami menetapkan Herman Deru dan Cik Ujang sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2030. Keputusan ini berlaku sejak pukul 10.00 WIB," ujar Andika.

Setelah penetapan, KPU Sumsel menyerahkan salinan keputusan resmi kepada pasangan terpilih sebagai simbol sahnya mandat dari masyarakat Sumsel.

Usai penetapan sebagai Gubernur

Sumsel terpilih, Herman Deru dalam sambutannya mengucapkan syukur atas kepercayaan masyarakat.

"Kemenangan ini adalah kemenangan seluruh rakyat Sumatera Selatan. Kami berkomitmen untuk melanjutkan program-program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat," kata Herman Deru.

Ia juga mengungkapkan kalau pelaksanaan Pilkada Sumsel lalu zero gugatan, dari berbagai tingkatan sampai di tingkat MK.

"Dan kita ikut dalam 21 provinsi yang Cakadanya (calon kepala daerah) ditetapkan hari ini," tukas Herman Deru

yang di dampingi Cik Ujang dan juru bicara HDCU Alfrenzi Panggarbesi

Setelah ini, sambung Herman Deru, ia bersama tim akan melakukan komunikasi, konsolidasi untuk menghadapi masa transisi.

"Nanti ketika dilantik, visi misi dan RPJMD harus sudah dipertanggungjawabkan," sahutnya lagi.

Selain itu sahut Deru, postur dari kebijakan belanja dan pembangunan lainnya, harus disesuaikan juga dengan visi misi Herman Deru Cik Ujang untuk pembangunan lima tahun ke depan Sumsel Maju untuk Semua.

Termasuk misi mewujudkan masyarakat Sumsel yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia Sumatera Selatan yang berdaya saing.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada aparat keamanan, penyelenggara Pilkada, serta semua pihak yang berkontribusi pada suksesnya proses demokrasi.

"Tahapan Pilkada yang damai ini adalah karunia dari Allah SWT. Kami berharap pelantikan mendatang juga berjalan lancar," tambahnya.

Herman Deru menegaskan bahwa program yang dijanjikan selama kampanye akan diimplementasikan secara nyata.

Ia juga meminta dukungan dari semua pihak untuk menciptakan Sumatera Selatan yang lebih maju dan berdaya saing.

"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim, perorangan, dan partai politik yang telah mengantarkan HDCU menjadi gubernur terpilih. Apa yang kami sampaikan saat kampanye, kami harap dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan," kata ujangnya.

Herman Deru juga akan mendelégasikan tim HDCU (Herman Deru-Cik Ujang) untuk transisi kepemimpinan seusa ditetapkan KPU. Visi-misi yang disampaikan pada masa kampanye akan menyesuaikan dengan struktur APBD.

"Setelah ini kami segera berkomunikasi dan konsolidasi dengan pemerintahan yang ada pada masa transisi saat



ini. Koordinasi formal nanti ada (dengan Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi), tim HDCU akan mengutus delegasi di masa transisi ini," sambung Deru.

Dia menyebut porsi APBD akan menyesuaikan dengan visi misi dan RPJMD Sumsel yang telah ditentukan. Selain itu, APBD juga akan menyesuaikan dengan program pemerintah pusat. Salah satunya program makan bergizi gratis (MBG).

"Jadi nanti postur kebijakan belanja dan lainnya akan menyesuaikan dengan visi misi pembangunan HDCU 2025-2030 dan RPJMD. Semuanya sudah tertuang, meneruskan pembangunan dan infrastruktur merata dan pelayanan dasar lainnya. Kami juga akan menunjang secara serius program presiden dan wakil presiden seperti MBG," jelasnya.

Sementara itu, Sekda Sumsel Edward Candra menyebut sudah melakukan komunikasi dengan tim transisi untuk sinkronisasi program 2025-2030.

"Sudah ada koordinasi dengan tim transisi untuk sinkronisasi program dan visi misi Gubernur/Wakil Gubernur terpilih untuk APBD 2025 dan selanjutnya. Pembahasan juga sudah dinas-dinas dan sebagainya," ujangnya.

Edward menyampaikan sudah ada program dari visi misi yang terakomodasi pada APBD 2025. Sedangkan program-program lainnya akan diakomodasi pada APBD Perubahan 2025.

"Ada segmen yang sudah terakomodir di APBD 2025. Ada juga yang masih kita lihat peluangnya di APBD Perubahan 2025. Ada juga yang nanti masuk program tahun berikutnya," tandasnya. ●

ANDIKA-HENDI CABUT GUGATAN HASIL PILGUB JATENG

Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah (Jateng) nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Hendi) mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencabut gugatan hasil penghitungan suara di Pilgub Jateng 2024.

Permohonan pencabutan gugatan disampaikan Andika-Hendi melalui tim kuasa hukumnya, lewat surat kepada MK pada 13 Januari 2025.

"Iya betul (permohonan pencabutan gugatan)," kata Hendi membenarkan surat permohonan pencabutan gugatan, Senin 13 Januari 2025.

Berikut isi surat permohonan pencabutan gugatan Andika-Hendi:

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

nur di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 01, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada "BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN" yang beralamat di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, bbharpusat.pdiperjuangan@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yakni berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/BBHAR-PDIP/SKK/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024;

Dengan ini mengajukan Pencabutan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dengan Register Perkara No: 263/PHPU.GUB-XXIII/2025 Tertanggal 11 Desember 2024 dan Perbaikan Permohonan Tertanggal 13 Desember 2024.

Sidang gugatan Andika-Hendi sebenarnya telah berjalan di MK. Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan digelar pada Rabu 8 Januari 2025 di panel 1 MK yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo.

Pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilgub Jawa Tengah 2024.

Petitum itu disampaikan dalam persidangan agenda pemeriksaan pendahuluan di Panel 1 MK yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Rabu 8 Januari 2025.

Sebelumnya, melalui kuasa hukum Andika-Hendi, Roy Jansen Siagian meminta MK membatalkan atau mendiskualifikasi pasangan Luthfi-Yasin sebagai Pemenang/calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jateng Tahun 2024.

"Memerintahkan Termohon KPU Provinsi Jawa Tengah untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan calon Nomor Urut 1 yaitu Jen-



deral TNI (Purn) Andika M Perkasa dan Hendrar Prihadi alias Hendi, sebagai Galon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024," sambung dia.

Bahkan, Andika-Hendi meminta MK membatalkan Keputusan KPU Jawa Tengah Nomor 200 Tahun 2024. Andika-Hendi juga meminta MK untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

"Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 200 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Nomor 200 Tahun 2024 tertanggal 7 Desember 2024 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 yang diumumkan Termohon pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 Pukul 17.53 WIB sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Galon Nomor Urut 2 atas nama Ahmad Luthfi dan Taj Yasin," kata Roy.

Roy Jansen menyebut Luthfi-Yasin telah melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif di Pilgub Jawa Tengah 2024 sehingga layak didiskualifikasi.

Roy menyinggung kedekatan Luthfi dengan Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut dan Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana beserta struktur kepolisian di bawahnya dan struktur ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pusat, termasuk Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.

Ia juga menyebut banyak kepala desa di Jateng yang tidak netral dengan mendukung Luthfi-Yasin. Ia mendalilkan hal tersebut merugikan Andika-Hendi dalam Pilgub Jateng 2024.

"PKD Tingkat Jawa Tengah, mengadakan kegiatan Silaturahmi Dan Konsolidasi Organisasi Paguyuban Kepala Desa (PKO) Se-Jawa Tengah Dengan Slogan Satu Komando Bersama Sampai Akhir, bertempat Hotel Gumaya Semarang pada Rabu, 23 Oktober 2024, yang digerebek Bawaslu Kota Semarang pada pukul 21.00," kata Roy dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan di Panel 1 MK yang

dipimpin Ketua MK Suhartoyo, Rabu 8 Januari 2025.

Lebih lanjut, Roy menyebut intimidasi kepada kepala desa juga terjadi dengan modus pemanggilan untuk klarifikasi penggunaan dana desa atau pengelolaan dana banprov Jawa Tengah.

Roy mengklaim upaya intimidasi itu persis seperti yang telah terjadi sejak Pilpres 2024 dan kembali digunakan di Pilgub Jawa Tengah 2024.

Sementara, Mahkamah Konstitusi

Tengah," kata Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi Pan Mo-hamad Faiz.

Faiz menjelaskan penarikan permohonan merupakan hal yang lumrah dan bisa dilakukan untuk perkara mana pun sebelum permohonan diputus.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.



(MK) mengonfirmasi bahwa pasangan Andika-Hendi mencabut gugatan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Tengah 2024 yang teregistrasi dengan Nomor 263/PHPU. GUB-XXIII/2025.

"Dengan konfirmasi ini kami sampaikan bahwa MK telah menerima secara administratif permohonan pencabutan atau penarikan Perkara 263 untuk PHPU (perkara hasil pemilihan umum) gubernur dan wakil gubernur Jawa

"Permohonan bisa ditarik, itu secara tertulis ataupun secara lisan di persidangan," ujarnya.

Pencabutan permohonan Andika-Hendi akan dikonfirmasi lebih lanjut dalam sidang pemeriksaan perkara yang direncanakan digelar pada Senin 20 Januari 2025. Di dalam sidang pemeriksaan perkara tersebut, MK akan mendengarkan keterangan KPU selaku termohon, pihak terkait, dan Bawaslu. •

TINGKATKAN KUALITAS DAN DISIPLIN KERJA

Awali 2025 Dengan 2 Arindama

Mengawali tahun 2025, Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, menyampaikan berbagai arahan penting terkait disiplin, kinerja pegawai, serta pengelolaan anggaran daerah. Dia menekankan pentingnya kinerja yang baik, loyalitas, dan kecerdasan dalam pelayanan kepada masyarakat.

"Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita membutuhkan kinerja yang maksimal. Ini harus didasari dengan totalitas, loyalitas, dan kecerdasan," ujar Sri

Juniarsih saat menjadi pembina pada Apel Gabungan pertama di halaman Kantor Bupati Berau, Senin, 6 Januari 2025.

Bupati juga mengumumkan perubahan sistem presensi bagi pegawai Pemkab Berau yang kini beralih dari sistem finger print ke absensi digital melalui handphone. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai. Sebagai bentuk pengawasan, sanksi berupa pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) akan diterapkan.

"Pemotongan terhadap TPP ini menjadi aturan yang harus dilaksanakan dan menjadi pemicu agar kita senantiasa menaati jam kerja," kata Sri Juniarsih.

Selain itu, Sri Juniarsih memberikan laporan mengenai realisasi APBD 2024 yang telah mencapai lebih dari 87 pers-

en dari jumlah pagu keseluruhan, yakni lebih dari 6,9 triliun rupiah. Dirinya mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras dalam melaksanakan anggaran tersebut secara maksimal.

"Meskipun ada beberapa hambatan, saya mengingatkan untuk senantiasa mengikuti peraturan yang berlaku," ucapnya.

Bupati juga mengungkapkan langkah-langkah strategis terkait APBD 2025, antara lain peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, percepatan pengadaan barang dan jasa, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja. "Langkah-langkah ini harus menjadi perhatian seluruh OPD agar pelaksanaan anggaran bisa berjalan dengan baik," katanya.

Terkait kebijakan kenaikan tarif PDAM,



Sri Juniarsih memberikan klarifikasi bahwa regulasi tersebut akan ditinjau ulang. Menurutnya, langkah ini diambil setelah adanya rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, mengingat tarif air di Kabupaten Berau masih tergolong termurah di Benua Etam.

"Kita akan menunda regulasi ini sampai kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat," ucap Sri.

Bupati juga menyampaikan bahwa penundaan ini bukan berarti kenaikan tarif dibatalkan, namun jika tidak dilaksanakan, kantor PDAM akan dipindahkan ke Kutai Timur, yang tentunya akan mempersulit penanganan keluhan masyarakat Kabupaten Berau.

"Kami mengingatkan untuk bijak dalam menggunakan air bersih ke depan," ujarnya.

Sri Juniarsih juga memberikan klarifikasi mengenai surat keputusan yang beredar terkait regulasi kenaikan tarif PDAM. Ia menegaskan bahwa surat tersebut adalah palsu, karena pada tanggal yang tercantum, dirinya sedang dalam masa cuti kampanye.

"Surat itu adalah ulah oknum yang tidak bertanggung jawab," katanya.

Sri Juniarsih juga menginstruksikan kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) setempat segera menyusun laporan penggunaan anggaran 2024 terkait dengan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Pemerintah daerah diberi waktu paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Untuk itu saya minta OPD sesegera mungkin membuat laporan sebelum batas berakhir," ujarnya.

Ia menyampaikan, mengenai realisasi keuangan di APBD 2024 yang telah mencapai 87 persen, hal ini tergolong baik meski semestinya bisa lebih ditingkatkan lagi, sehingga pagu secara keseluruhan APBD yang nilainya Rp6,99 triliun bisa digunakan secara optimal.

Untuk itu, dia memberikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah karena telah melaksanakan anggaran masing-masing secara maksimal, sehingga

kinerja penyerapan anggaran yang bagus ini harus diimbangi dengan tingkat laporan yang segera disusun untuk kemudian diserahkan ke BPK perwakilan Kalimantan Timur.

Nilai APBD Berau tahun lalu yang mencapai Rp6,99 triliun tersebut merupakan gabungan APBD murni dan APBD perubahan, yakni APBD murni sebesar Rp5 triliun lebih, kemudian mendapat tambahan Rp1,9 triliun melalui APBD perubahan.

Total APBD Berau 2024 sebesar itu antara lain berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp303 miliar, pendapatan transfer pemerintah pusat senilai Rp4,93 triliun atau naik Rp1,399 triliun dari anggaran semula Rp3,533 triliun, pendapatan transfer daerah tetap



senilai Rp832 miliar.

Untuk pelaksanaan langkah strategis terhadap APBD 2025 yang sebesar Rp5,2 triliun, bupati minta OPD melakukan peningkatan kualitas perencanaan dengan mengecek kembali dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) di masing-masing organisasi.

"Selanjutnya melakukan akselerasi pelaksanaan program, melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan DPA dan pertanggungjawaban, meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas, serta meningkatkan pemantauan, evaluasi serta pengendalian bilateral," katanya.

Pemkab Berau juga mengawali tahun ini dengan meraih dua penghargaan Arindama saat peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Provinsi Kaltim. Penghargaan diserahkan Penjabat Gubernur

Kaltim, Akmal Malik, pada upacara puncak HUT Kaltim di Gelora Kadrie Oening Sempaja Samarinda, Kamis, 9 Januari 2024.

Berau meraih dua Arindama di bidang penanggulangan bencana dan bidang pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif. Arindama keberhasilan pembangunan diterima langsung oleh Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas.

Sri Juniarsih menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah yang telah memberikan kerja terbaiknya. Dia berharap penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan prestasi diberbagai bidang pembangunan dan melakukan langkah-langkah inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

"Kami berharap ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus bekerja optimal untuk Berau yang lebih baik lagi," ungkapnya.

Pada Arindama keberhasilan pembangunan pada peringkat kedua Kabupaten Berau meraih Arindama bidang kesetaraan gender, bidang pembangunan perkebunan dan bidang pembangunan kelurahan dan perikanan. Sementara pada peringkat ketiga Arindama Kaltim diraih bidang pembangunan peternakan dan bidang pembangunan wilayah pedesaan.

"Saya harap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bisa menargetkan kembali penerimaan penghargaan Arindama ini. Karena ini merupakan indikator keberhasilan daerah dalam menjalankan program pembangunan di masing-masing bidang," pungkasnya. ●



WUJUDKAN MUBA SEMAKIN MAJU DAN BERJAYA

Tahun 2025 menjadi waktu yang baik bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk mewujudkan Muba semakin maju dan berjaya. Untuk itu Penjabat Bupati Muba, Sandi Fahlepi mengajak seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menjalankan program strategis yang sudah direncanakan.

Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi mengatakan, jika di flashback secara bersama. Semua kegiatan di tahun 2024 kemarin sudah berjalan dengan baik. Misalnya kegiatan Pilkada serentak di Muba berjalan dengan lancar. Beserta program-program bantuan lainnya untuk membantu mensejahterakan masyarakat Muba juga berjalan sebagaimana mestinya.

"Untuk itu, saya selaku Pj Bupati Muba menyampaikan penghargaan setingginya dan mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran Pemkab Muba, para camat dan kepala perangkat daerah Kabupaten Muba atas semua sumbangsih dan kontribusinya selama ini," ungkapnya.

Sambungannya, dengan diadakannya rapat staf Jajaran Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2025.

"Ini menjadi momen untuk kita semua saling mengingatkan, saling bahu-membahu dalam mensukseskan semua pro-

gram yang telah direncanakan di tahun ini. Tindak lanjut serta semua persiapan harus kita pahami secara bersama, agar hasil yang kita inginkan dan kita harapkan sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan," kata Pj Bupati Muba.

Sandi Fahlepi juga menyatakan, sampai dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dilantik. Dirinya masih diberikan wewenang untuk menjadi pimpinan di Kabupaten Muba.

"Dengan ini saya ingin kita semua tetap menjaga keharmonisan di tahun 2025 ini. Saya minta kerjasama untuk kemajuan Kabupaten Muba. Mari kita pertahankan semua yang baik-baik di tahun 2024 dan mari kita perbaiki semua kegiatan yang menjadi evaluasi perbaikan kedepannya," pungkas Sandi.

Raih Indeks SPBE Tertinggi di Sumsel

Keharmonisan dan kekompakan yang digalang Pj Bupati Muba, Sandi Fahlepi memberikan hasil yang baik. Dengan

motivasi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat membuat Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Musi Banyuasin, di bawah kepemimpinan Pj Bupati H Sandi Fahlepi, berhasil menduduki peringkat pertama di Provinsi Sumatera Selatan.

Diterangkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Muba, Herryandi Sinulingga AP, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Kabupaten Muba berhasil meraih Indeks SPBE tertinggi dengan predikat "Sangat Baik" dengan point (3,62) di Provinsi Sumatera Selatan.

Prestasi luar biasa ini mencerminkan komitmen Pemkab Muba, Dinas Komunikasi dan Informatika berkolaborasi bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Muba dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan berkolaborasi dan bersinergi bersama seluruh OPD di Musi Banyuasin.

"Hasilnya nilai kita terbaik dibandingkan Pemkab dan Pemkot Seluruh Sumatera Selatan, jadikan nilai ini menjadi motivasi kita bersama untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat Musi Banyuasin," ungkapnya.

Dari data indeks SPBE di Sumsel, Pemerintah Kabupaten Muba meraih 3,62 dengan predikat Sangat Baik.

Peringkat kedua ditempati Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan 3,55 poin, Pemerintah Kota Palembang mendapat 3,51 poin.

Kemudian Pemerintah Kota Prabumulih meraih 3,37 poin dan Pemerintah Provinsi Sumsel dengan 3,00 poin.

Pj Bupati Muba, H Sandi Fahlepi, sangat mengapresiasi pencapaian ini dan berharap dapat memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muba untuk terus memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.

"Selamat atas raihan predikat sangat baik ini. Tentu saja, indeks SPBE ini harus terus kita tingkatkan dalam memberikan

pelayanan terbaik masyarakat khususnya Pelayanan Publik yang transparan akuntabel efektif dan efisien untuk itu mari terus bersinergi dan berkolaborasi bersama untuk kemajuan Musi Banyuasin Kedepannya," kata Sandi.

Raih Pengakuan Nasional Dalam Pelayanan Prima

Kabupaten Muba juga mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih predikat Pelayanan Prima Tingkat Nasional dengan nilai 4,57 (A).

Prestasi gemilang ini diraih berkat pe-

salu daerah terbaik dalam memberikan pelayanan publik di Indonesia. Dengan semangat kolaborasi yang tinggi, diharapkan Kabupaten Muba terus menjadi pelopor inovasi pelayanan bagi masyarakat.

"Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen kami dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Semoga prestasi ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan di masa depan," ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Organisasi Hj. Nurzarawati menyampaikan rasa syukur dan terima kasihnya kepada selu-



nilaian unggul di beberapa instansi, yaitu Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan RSUD.

Pj Bupati Muba, H. Sandi Fahlepi, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait atas kerja keras dan dedikasi yang telah diberikan.

Prestasi ini, lanjutnya menegaskan posisi Kabupaten Muba sebagai salah

ruh pihak yang telah berkontribusi, terutama kepada Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi dan Sekda Muba H Apriyadi Mahmud atas arahan dan bimbingan yang diberikan.

"Kerja sama dan komitmen seluruh kepala OPD sangat berarti dalam pencapaian ini. Terima kasih atas dedikasinya dalam melayani masyarakat," pungkasnya. ●

LAKUKAN HAL SEDERHANA NAMUN BERDAMPAK BESAR

Sebagai seorang kepala daerah, Penjabat Bupati Musi Banyuasin, Sandi Fahlepi tidak hanya fokus dalam menjalankan program pembangunan tapi juga perhatian dengan berbagai masalah sosial di masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin.

Salah satu yang dilakukan secara sekilas terlihat sederhana namun dampak yang dirasakan sangat luar biasa yakni mau turun ke lapangan melihat kondisi warganya. Pj Bupati Muba, Sandi Fahlepi cukup rajin menemui warga terutama yang mengalami musibah atau ada kendala di lapangan.

Salah satu aksi yang ditunjukkannya yakni hadir langsung di lokasi untuk memastikan kelancaran proses evakuasi pohon tumbang yang menghalangi akses jalan dan bahkan menimpa sebuah ruko milik warga di Jalan Merdeka, Lingkungan 1, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, tepat di depan Hotel Ranggonang, dan depan puskesmas Balai Agung.

Bukan itu saja Sandi Fahlepi juga memberikan apresiasi atas kerja keras tim yang bergerak cepat.

"Kami sangat mengapresiasi langkah sigap BPBD dan semua pihak yang ter-

libat dalam evakuasi ini. Cuaca ekstrem seperti ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada, terutama saat beraktivitas di luar rumah," ujar Sandi.

Dengan cuaca yang masih tidak menentu, lanjutnya kerja sama dan kewaspadaan dari seluruh elemen masyarakat menjadi kunci untuk menghadapi tantangan ini.

Pemerintah Kabupaten Muba, melalui BPBD, berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik demi keselamatan dan kesejahteraan warga di Musi Banyuasin.

Ia juga menghimbau masyarakat agar selalu berhati-hati, khususnya saat berkendara. "Perubahan cuaca saat ini tidak dapat diprediksi dengan pasti. Masyarakat harus lebih waspada dan memprioritaskan keselamatan," tambahnya.

Kepala BPBD Muba, H. Pathi Riduan, menambahkan bahwa berdasarkan



prediksi BMKG, cuaca ekstrem diperkirakan berlangsung hingga awal Januari.

Ia mengingatkan masyarakat, khususnya yang tinggal di bantaran Sungai Musi dan di sekitar pohon-pohon besar, untuk meningkatkan kewaspadaan.

"Kita sudah mulai merasakan dampak cuaca ekstrem ini. Apabila curah hujan tinggi disertai angin kencang, segera ambil langkah antisipasi. Jika mendengar suara gemuruh, prioritaskan keselamatan diri dan barang berharga," kata Pathi.

Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat yang sering melintasi jalan dengan pohon-pohon besar untuk selalu berhati-hati.

"Jangan sampai ada korban jiwa akibat pohon tumbang atau insiden lainnya," imbaunya.

Sambangi dan Bantu Korban Kebakaran

Saat menerima laporan ada sebuah rumah warga di Dusun I Desa Bandar Jaya

Kecamatan Sekayu mengalami kebakaran dengan gerak cepat Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi menggerakkan seluruh OPD terkait untuk turun memberikan bantuan terhadap korban.

Kebakaran yang terjadi telah menghancurkan rumah milik Muhammad Evi Bin Herman (35 Tahun). Penyebab kebakaran tersebut, diduga akibat dari korsleting listrik yang menyebabkan api dengan cepat menyebar ke bagian lain rumah.

"Alhamdulillah api telah berhasil dipadamkan oleh Petugas Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja kita dan dibantu warga sekitar dan tim lainnya," ungkap Camat Sekayu Edi Haryanto saat mendampingi Pj Bupati Muba, Sandi Fahlepi.

Tidak ada korban jiwa atas kejadian itu namun api berhasil membuat kerusakan parah pada rumah beserta isinya. Informasi kebakaran yang menimpa warga Kabupaten Muba ini langsung direspon Sandi Fahlepi.

Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi langsung meninjau ke lokasi untuk menyampaikan turut berbelasungkawa atas musibah yang dialami Warga Dusun I Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu.

"Kita turut berbelas sungkawa atas musibah yang dialami ini, semoga dalam

menghadapi ujian ini korban diberikan kekuatan kesabaran juga kesehatan," ucapnya.

Ia juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar selalu berhati-hati dan waspada terhadap ancaman bencana kebakaran yang kapan saja bisa terjadi.

"Kita harus tetap waspada jangan sampai kejadian seperti ini kembali terjadi," ujar Sandi.

Gandeng Masyarakat Langsung

Pj Bupati Muba, H Sandi Fahlepi, mengajak seluruh warga untuk berkontribusi dalam mewujudkan Kabupaten Muba Maju dan Berjaya. Salah satunya dengan mengajak untuk melaporkan

Walaupun terlihat sederhana namun dampaknya luar biasa bagi keamanan masyarakat Kabupaten Muba.

"Partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk keberhasilan proyek ini," tegasnya.

Ia berharap warga tidak hanya mengisi kuesioner, tetapi juga menyebarkannya kepada keluarga, teman, dan rekan-rekan mereka. Semakin banyak masukan, semakin baik hasilnya

Bagi Pemkab Muba, soal pembangunan lampu jalan bukan hanya soal penerangan tapi juga soal keselamatan dan kenyamanan. Dengan proyek ini, masyarakat Muba dapat meningkat-



Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Kabupaten Muba agar bisa terang di waktu malam.

Caranya bisa mengisi kuesioner ke masyarakat tentang penilaian kinerja Pemkab Muba tentang lampu jalan.

kan keamanan bagi pengguna jalan di malam hari.

Bisa mendukung pergerakan ekonomi di kawasan serta bisa mempercepat penyediaan penerangan yang berkualitas. ●

HUT ke-68 Kalimantan Timur

MOMENTUM MEMBANGUN NUSANTARA

Provinsi Kalimantan Timur merayakan Hari Ulang Tahun ke-68 pada 9 Januari 2025. Upacara perayaan pun digelar di Stadion Kadrie Oening dengan tema “Mambangun Kaltim untuk Nusantara”.

Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyebut, perayaan tersebut mengenang perjalanan panjang Provinsi Kaltim yang penuh tantangan, perjuangan, dan kerja keras dari generasi ke generasi.

“Mari kita mengucapkan rasa syukur sekaligus penghargaan setinggi-tingginya kepada para pendahulu yang telah meletakkan dasar-dasar pembangunan Kalimantan Timur hingga menjadi seperti sekarang ini,” ungkap Akmal.

Akmal menekankan pentingnya kolaborasi bersama antar organisasi perangkat daerah (OPD), swasta, dan masyarakat untuk kemajuan pembangunan Kaltim di masa mendatang.

Akmal menyampaikan, 68 tahun bukanlah usia yang muda bagi Kaltim. Saat ini, telah banyak jasa dan capaian yang dihasilkan oleh Gubernur Kaltim terdahulu untuk pembangunan Kaltim saat ini, mulai pembangunan infrastruktur hingga pengembangan sumber daya manusia.

Selain itu, dalam pembangunan Kaltim lebih baik ke depan, juga diperlukan peran serta masyarakat, di antaranya menjaga agar infrastruktur yang telah dibangun di Kaltim dipergunakan sebagaimana mestinya.

“Kuncinya kolaborasi. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan oleh masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Kaltim, sehingga daerah kita mencapai banyak kema-



juan,” ujar Akmal.

Sinergi yang solid antara pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat ini penting untuk dijaga dan terus ditingkatkan, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan

Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim saat ini.

“Kami berharap pola kerja sama seperti ini terus ditingkatkan ke depan. Kaltim dan IKN ini menjadi harapan bersama untuk menopang keberhasilan Indone-

sia ke depan,” ujar Akmal.

Sebagai lokasi IKN, Kaltim memegang peranan strategis dalam mendukung visi besar negara ini menuju Indonesia Emas 2045. Saat ini, pemerintah memiliki Asta Cita, sebuah kerangka pembangunan strategis pemerintahan baru yang akan menjadi landasan dan pedoman Pemprov Kaltim untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing.

“Membangun infrastruktur yang mendukung integrasi ekonomi dan sosial serta memperkuat ketahanan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,” kata dia.

Benua Etam, julukan Kaltim, sebagai lokasi IKN juga memiliki peran strategis

tasi dalam menjawab tantangan masa depan, sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat Kaltim dan Indonesia,” paparnya.

Menurut Akmal, ulang tahun Kaltim adalah sebuah pengingat bagi semua bahwa sebagai warga yang baik, tidak boleh melupakan sejarah dan jasa-jasa para pemimpin terdahulu. Peringatan HUT Kaltim ke-68 juga menjadi momentum untuk merefleksikan pencapaian dan tantangan yang telah dilalui.

“Mari jadikan semangat ini sebagai pijakan untuk bekerja lebih keras lagi,” imbuhnya.

Akmal menambahkan, transformasi pembangunan Kaltim saat ini telah

Di usia yang baru, Akmal mengajak untuk berefleksi dan bermuhasabah. Memang, diakuinya, Kaltim 10 tahun terakhir memang mengalami transformasi yang cukup pesat. Kaltim hari ini telah menjadi pusat ekonomi dan pusat kebudayaan. Meski ke depan tantangan akan semakin besar, dengan adanya IKN.

Akmal mencatat beberapa pencapaian Kaltim, misalnya pertumbuhan ekonomi di angka 6,19 persen pada triwulan III 2024, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 5,03 persen. Selanjutnya, angka Indeks Pembangunan Manusia 2024 juga naik menjadi 78,79.

“Dari data tingkat pengangguran terbuka, angkanya di Kaltim juga turun



dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju, berdaulat, dan berkeadilan. Keberadaan Kaltim di jantung Nusantara bukan sekadar kebanggaan, tetapi juga amanah besar sebagai teladan dalam pembangunan berkelanjutan, kemajuan ekonomi, dan harmoni sosial.

“Mari kita lanjutkan pembangunan di segala sektor dengan penuh semangat dan tanggung jawab, baik di bidang infrastruktur yang terintegrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Semua yang kita lakukan sebagai implemen-

menghasilkan berbagai progres dan kemajuan yang membanggakan, baik di sektor pembangunan SDM, infrastruktur, ketahanan pangan, penyediaan fasilitas dasar masyarakat, pariwisata, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

“Kaltim harus menjadi pelopor pembangunan yang berkeadilan, ramah lingkungan, dan berbasis kearifan lokal. Dengan kekayaan alam, budaya, tradisi, dan keberagaman masyarakatnya, Kaltim mampu menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia,” terangnya.

menjadi 5,14 persen,” ujarnya.

Dia pun berharap pencapaian itu menjadi pemantik untuk terus melanjutkan pembangunan di segala aspek. Misalnya memperkokoh ideologi Pancasila, meningkatkan swasembada pangan, peningkatan ekonomi hijau dan biru, dan kemajuan di sektor ekonomi kreatif. Kemudian memperkuat pembangunan SDM, teknologi pendidikan dan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, melanjutkan hilirisasi, membangun dari desa, memberantas kemiskinan, hingga memperkuat politik hukum dan birokrasi. ●

PENGGERAK UTAMA EKONOMI KAWASAN INDONESIA TIMUR

Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanudin Mas'ud, menyatakan, Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Kaltim merupakan momentum yang tepat untuk memperkuat visi provinsi tersebut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

"Momentum ini adalah peluang besar bagi Kaltim untuk menjadi penggerak utama pembangunan yang lebih inklusif di kawasan timur Nusantara," ungkap Hamas, sapaan Hasanudin Mas'ud, Rabu, 8 Januari 2025.

Menurut Hamas, pencapaian pembangunan selama satu dekade terakhir merupakan bukti nyata pemerintah

dalam memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan.

"Berbagai infrastruktur strategis seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi simbol kemajuan pesat yang patut kita syukuri," ujar Hamas.

Dia menambahkan, hadirnya IKN telah mengubah pola pembangunan nasional yang selama ini terpusat di Pulau Jawa menjadi lebih merata ke wilayah lain, termasuk Kaltim.

Selain keberhasilan infrastruktur, Hamas juga menyoroti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim yang mencapai 78,79 persen pada tahun 2024. Pencapaian ini menjadikan provinsi berjudul Benua Etam itu peringkat skor tertinggi ketiga di Indonesia. Ia menilai capaian ini sebagai cerminan kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.

"IPM yang tinggi adalah indikator bahwa Kaltim tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga dalam aspek sosial dan kes-

ejahatan warganya," tambahnya.

Namun, Hasanuddin mengingatkan bahwa keberhasilan ini tidak dapat dicapai tanpa kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Ia menekankan pentingnya sinergi berkelanjutan untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

"Langkah strategis seperti pengembangan sumber daya manusia dan teknologi harus menjadi prioritas, agar Kaltim siap mendukung visi Indonesia Emas 2045," paparnya.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, menyebutkan, IPM Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 78 persen, naik 0,75 poin dibandingkan tahun sebelumnya. "Perlu digarisbawahi bahwa ada indeks peningkatan human development tadi, mengindikasikan bahwa ada peningkatan," kata Hamas.

Hasanuddin mengatakan peningkatan IPM tersebut merupakan hasil dari langkah-langkah baik di sektor keseha-



tan dan pendidikan yang sudah dilakukan. Namun, ia menegaskan pemerintah daerah harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar angka IPM terus naik.

Menurutnya peningkatan itu berkat adanya langkah baik di sektor kesehatan hingga pendidikan. Faktor itulah yang menunjang IPM Kaltim pada 2024.

Pada momen HUT Kaltim ini, Hasanuddin juga menyerukan pentingnya menjaga semangat persatuan di tengah masyarakat yang majemuk. Prinsip lokal "Ruhui Rahayu" dinilai relevan untuk mendorong keharmonisan dan kesejahteraan bersama.

"Mari kita jadikan HUT ke-68 ini sebagai pengingat akan nilai persatuan dan kerja bersama menuju Kaltim yang lebih baik," ujarnya.

Hasanudin juga menyatakan kesiapan DPRD Kaltim untuk mendukung program-program prioritas yang akan dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Rudy Mas'ud-Seno Aji.

Dia mengungkapkan, momentum peringatan HUT Kaltim ini menjadi waktu yang tepat untuk mempersiapkan masa transisi kepemimpinan di Kaltim, mengingat masa jabatan Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, akan segera berakhir.



"Dengan adanya pergantian pemerintahan ke depan dengan program Gaspoll, kami (DPRD) minta untuk lebih meningkatkan lagi Index Human Development-nya," ujar Hamas.

Hamas menjelaskan, DPRD Kaltim akan memberikan perhatian khusus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini sejalan dengan target peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kaltim.

"Karena ini target IPM lebih besar. Ini akan menjadi perhatian utama buat kita ke depan. Dalam waktu dekat ini kami akan jalan sampai ke Kubar (Kutai Barat) untuk melihat jalan-jalan provinsi yang rusak," jelasnya.

Meskipun pasangan Rudy Mas'ud-Seno Aji telah memenangkan Pilkada Kaltim 2024, namun pelantikan mereka masih tertunda karena adanya gugatan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh pasangan calon lainnya, Isran Noor-Hadi Mulyadi.

DPRD Kaltim memandang penting untuk segera melakukan persiapan guna menyambut kepemimpinan baru. Hal ini dilakukan agar program-program pembangunan di Kaltim dapat berjalan dengan lancar dan efektif.

"Pada dasarnya DPRD Kaltim setuju dan mendukung program-program prioritas yang bakal dicanangkan Pemprov Kaltim di bawah pimpinan baru kelak," tegas Hamas. •





LOMBOK JADI DESTINASI WISATA TERBAIK DUNIA 2025

Bukan Bali, Lombok menjadi destinasi wisata terbaik dunia 2025 menurut Travel Lemming, platform panduan wisata ternama berbasis di Amerika Serikat yang menjangkau lebih dari 10 juta pembaca global.

Lombok menjadi destinasi wisata terbaik dunia 2025 tersebut diumumkan dalam daftar tahunan 50 Destinasi Wisata Terbaik Dunia yang dirilis Travel Lemming.

Program ini bertujuan untuk menyoroti destinasi baru dan permata tersembunyi di seluruh dunia.

Tahun ini, Lombok memimpin da-

ftar, mengalahkan destinasi terkenal seperti El Calafate di Argentina, Taman Nasional Yoho di Kanada, dan El Nido di Filipina.

Mengutip berbagai sumber, penulis senior di Travel Lemming, Laura S mengungkapkan kekagumannya terhadap Lombok.

"Pantai-pantainya menakjubkan, lalu lintasnya masih sepi, dan pemandangannya luar biasa. Lombok adalah tempat di mana saya menemukan sisi rileks Indonesia," ujarnya.

Tidak hanya itu, pada tahun sebelumnya, situs wisata populer TripAdvisor juga menobatkan Lombok sebagai Destinasi Terbaik Tahun 2024.

Selain keindahan alamnya, TripAdvisor memberikan apresiasi pada kualitas hotel, restoran, dan aktivitas wisata yang ditawarkan Lombok.

Banyak Alasan Lombok Layak Dikunjungi. Dari megahnya Taman Nasional Gunung Rinjani hingga pantai-pantai eksotis seperti Pantai Pink dan Tanjung Aan, Lombok menawarkan panorama yang memukau.

Keindahan bawah laut Lombok menjadi surga bagi penggemar snorkeling dan diving, terutama di Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno.

Setiap pantai di Lombok memiliki

Lombok. Desa Sade adalah destinasi yang tepat untuk menyaksikan budaya lokal, termasuk kerajinan tenun khas.

Wisatawan dapat menikmati kelezatan kuliner seperti ayam taliwang, plecing kangkung, dan sate bulayak yang menggugah selera.

Dengan banyak pilihan penginapan dan tempat wisata yang ramah anggaran, Lombok adalah destinasi yang cocok untuk semua kalangan.

Beberapa tempat wisata di Lombok yang menawarkan liburan berkesan bisa jadi pilihan yakni;

1. Gili Trawangan

Gili Trawangan adalah yang paling luas dengan posisi berada di sebelah barat laut dari Lombok.

Pengunjung melakukan aktivitas scuba diving, snorkeling, berselancar, berkuda dan lainnya. Pantai di Gili Trawangan ini menjadi lokasi paling indah untuk menikmati matahari terbenam.

2. Gunung Rinjani

Gunung Rinjani konon katanya menjadi gunung paling indah di Indonesia bahkan di Asia. Pantas saja kalau wisatawan dari mancanegara juga tidak mau kalah, mereka juga ikut mendaki gunung Rinjani.

Keindahan Gunung Rinjani memang sangat luar biasa. Pemandangan yang disuguhkan begitu mempesona.

Wisatawan bisa menikmati indahnya matahari pagi, keindahan matahari terbit di Gunung Rinjani nampak jelas.

Travelling ke Lombok tanpa melakukan pendakian ke Gunung Rinjani tentunya seperti ada yang hampa. Gunung eksotis yang merupakan gunung berapi tertinggi kedua di Indonesia yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Ketinggian Gunung Rinjani mencapai 3.726 mdpl. Jadi tak heran jika para pendaki merasa tertantang untuk menuju puncaknya.



tar, mengalahkan destinasi terkenal seperti El Calafate di Argentina, Taman Nasional Yoho di Kanada, dan El Nido di Filipina.

Mengutip berbagai sumber, penulis senior di Travel Lemming, Laura S mengungkapkan kekagumannya terhadap Lombok.

keistimewaannya, mulai dari pasir putih lembut hingga pasir berwarna pink yang langka.

Berbeda dengan Bali yang lebih ramai, Lombok menawarkan ketenangan yang ideal bagi wisatawan yang ingin menjauh dari hiruk-pikuk.

Tradisi Suku Sasak tetap hidup di

Untuk sampai hingga ke puncak Gunung Rinjani, biasanya diperlukan waktu normal selama 4 hari 3 malam. Maka dari itu, harus menyiapkan kondisi fisik yang benar-benar fit sebelum melakukan pendakian.

3. Gili Meno

Gili Meno bisa dikunjungi dengan menempuh perjalanan darat sekitar 45 menit dari Kota Mataram. Di pulau tersebut terdapat taman burung yang memiliki koleksi burung-burung langka di Indonesia.

Pasir di pantai pulau ini juga sangat terkenal, warnanya putih dan masih terlihat sangat alami.



Di pulau ini kamu bisa berenang di pantai yang indah dengan paduan suara kicauan burung yang menghibur.

4. Gili Air

Gili Air ini lokasinya paling dekat dengan Pulau Lombok dan terkenal dengan keindahan pantainya.

Pantai di Gili ini merepresentasikan keindahan nyata dari pantai-pantai yang ada di Lombok. Lokasinya berada di Desa Gili Indah, Pemenang, daerah Lombok Utara.

Ada beberapa spot menarik yang bisa kamu nikmati di Gili Air, antara lain menyaksikan aneka ikan yang berwarna-warni, spot kura-kura, kuda laut, dan berbagai biota laut lainnya.

Masyarakat asli di Gili ini adalah suku Bugis dan Sasak. Mereka bekerja sebagai nelayan, pemandu wisata, dan pedagang.

Umumnya wisatawan yang berkunjung

ke kawasan ini adalah wisatawan asing. Bulan Juli hingga Agustus menjadi waktu kunjungan wisatawan asing yang cukup ramai.

5. Pink Beach

Sebuah pantai yang eksotis bernama Pantai Pink atau yang sering disebut orang dengan nama Pantai Tangsi. Lokasinya berada di Desa Sekaroh, Jerowaru, Lombok Timur. Di dunia ini ada 7 pantai yang memiliki warna pasir pink, salah satunya yang ada di Lombok tersebut.

Keindahan utama yang bisa disaksikan di pantai ini adalah paduan keindahan warna pasir merah muda, den-



gan terpaan air laut jernih yang begitu indah.

Warna pink pada pantai ini berasal dari kerang-kerang berwarna merah muda yang telah menjadi serpihan. Sangat indah bila dilihat view nya dari bagian atas.

Pantai ini juga memiliki ombak yang tenang dan tidak terlalu besar. Hamparan bukit-bukit indah di sekeliling pantai semakin memberikan kesan pemandangan yang sempurna.

Walaupun sangat eksotis, akses menuju ke pantai ini masih cukup sulit. Kamu harus menempuh perjalanan selama kurang lebih 2 jam dari Mataram menggunakan jasa rental mobil innova Lombok.

Pantai ini bisa dikunjungi setiap hari dengan jam buka mulai dari pukul 8 pagi waktu setempat hingga pukul 5 petang. Harga tiketnya pun bervariasi, bisa mencapai hingga 50 ribu rupiah.

6. Gili Kedis

Gili Kedis memang mempesona untuk dipandang. Dengan ukuran mungilnya, pulau ini menjadi tampak cantik. Tak perlu waktu lama untuk menjelajahi seluruh pulau dengan ukuran lebih kecil dari lapangan bola ini. Sekitar sepuluh atau sebelas menit, seluruh pantainya akan habis kita jejak.

Keindahan terumbu karangnya masih cukup terjaga sebagai habitat dari berbagai jenis ikan.

Di satu sisi terdapat pasir putih yang lembut dengan ombak yang relatif tenang, sedangkan di sisi lainnya terdapat bebatuan yang tergerus oleh

ombak.

7. Taman Narmada

Taman Narmada termasuk tempat wisata di Lombok yang bagus untuk dikunjungi karena unik dan antik. Lokasi taman ini terletak di Desa Lembuak, sekitar 10 KM di sebelah timur kota Mataram. Taman seluas kurang lebih 2 hektar ini dibangun oleh Raja Mataram Lombok pada tahun 1727.

Semula Taman Narmada digunakan sebagai tempat istirahat dan tempat upacara, namun sekarang taman ini telah beralih fungsi menjadi sebuah tempat wisata. Desain taman ini cukup unik karena merupakan replika mini dari Gunung Rinjani.

Selain itu, terdapat juga sumber mata air dari Gunung Rinjani yang dipercaya dapat membuat awet muda bila membasuh muka dan meminum air tersebut. ●

SELAIN KEINDAHAN, WISATAWAN INGIN PENGALAMAN AUTENTIK

Tren pariwisata 2025 mencerminkan pergeseran preferensi wisatawan yang semakin mengutamakan nilai autentisitas, kesejahteraan, dan keberlanjutan.

Dengan berbagai pilihan ini, pariwisata tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga cara untuk memperkaya diri dan mendukung pelestarian budaya serta lingkungan.

Melansir dari situs Kemenparekraf, pada Kamis, 2 Januari 2025, minat wisatawan pada tahun 2025 diprediksi meningkat hingga 58,97 persen terhadap cultural immersion atau pengalaman budaya yang mendalam.

Tren ini membuktikan minat wisatawan semakin tinggi terdapat pengalaman mendalam dan autentik mengenai budaya lokal ketika berwisata.

Health and wellness tourism juga akan semakin diminati di tahun 2025 ini. Hal ini terlihat dari tahun 2024 ada peningkatan

minat terhadap wisata kesehatan dan kebugaran.

Setelah pandemi, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan fisik dan mental terus meningkat.

Wisata kesehatan, yang mencakup aktivitas relaksasi, yoga, spa, hingga retreat kesejahteraan, telah menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2024.

Tren ini tidak hanya berfokus pada pemulihan tubuh, tetapi juga pada pencapaian keseimbangan dan harmoni diri.

Selain itu, eco-tourism atau wisata ramah lingkungan diperkirakan tumbuh hingga 46,15 persen.

Kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan mendorong banyak wisatawan untuk memilih destinasi dan aktivitas yang mendukung keberlanjutan.

Mulai dari perjalanan ke kawasan konservasi, penginapan ramah lingkungan, hingga partisipasi dalam kegiatan pelestarian alam menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin berkontribusi dalam menjaga kelestarian bumi.

Aktivitas luar ruangan diprediksi menjadi salah satu tren yang semakin populer di tahun ini.

Wisata berbasis petualangan, seperti mendaki gunung, menjelajah hutan, hingga star bathing aktivitas menikmati keindahan langit malam yang dipenuhi bintang semakin diminati.

Aktivitas-aktivitas ini menawarkan pelarian dari hiruk-pikuk kota dan memberikan kesempatan untuk lebih dekat dengan alam.

Itu artinya, tren pariwisata 2025 mencerminkan pergeseran preferensi wisatawan yang semakin mengutamakan nilai autentisitas, kesejahteraan, dan keberlanjutan.

Beberapa destinasi wisata yang masih banyak diminati di Indonesia, salah satunya adalah Bali. Pulau Dewata tetap menjadi primadona dengan pantai-pantai indah, budaya yang kaya, dan berbagai atraksi wisata yang menarik.

Dijuluki sebagai Pulau Dewata karena memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang kaya, serta karena masyarakatnya yang menyambut para dewa sebagai bagian dari sejarah dan tradisi lokal.

Mayoritas masyarakat Bali menganut agama Hindu Bali dan banyaknya pura di Bali merupakan salah satu bukti kekayaan budaya Hindu di pulau ini.

Bali juga dikenal sebagai destinasi wisata terpopuler di dunia. Pulau ini



memiliki banyak pantai, mulai dari pantai populer hingga pantai-pantai yang masih terpencil dan alami. Beberapa destinasi wisata di Bali yang terkenal, antara lain: Pura Tanah Lot, Undakan sawah hijau di Ubud, Marine Walk.

Meski terkenal dengan wisata pantai yang indah, ada beberapa rekomendasi wisata di Bali selain pantai yang juga memberikan kesan liburan yang tidak bisa dilupakan.

Misalnya, Danau Batur. Danau terbesar di Bali ini menawarkan pemandangan eksotis yang memanjakan mata. Anda bisa menyewa perahu dayung untuk menjelajahi danau dengan tarif sekitar Rp 500.000 untuk 10 orang.

Selain itu, kawasan ini juga dilengkapi area pemancingan dan beragam pilihan kuliner, mulai dari warung kaki lima hingga restoran.

Selanjutnya ada Taman Dedari yang

tamani, tempat ini menawarkan fasilitas glamping mewah yang membuat pengalaman berkemah Anda semakin nyaman. Lokasinya berada di Jl. Song Dikit, Songan A, Kec. Kintamani, Kabupaten Bangli.

Selanjutnya, Curug Tukad Cepung menjadi destinasi favorit bagi pecinta trekking. Terletak di Banjar Penida Kelod, Desa Tembuku, Kabupaten Bangli, air terjun ini menawarkan suasana alami yang menenangkan. Fasilitasnya cukup lengkap, termasuk toilet, ruang ganti, dan warung makan.

Tidak hanya Bali, Kota Yogyakarta juga menjadi destinasi wisata yang direkomendasikan untuk menghabiskan waktu libur.

Kota ini menawarkan kekayaan budaya dan sejarah, seperti Candi Borobudur dan Prambanan, serta keindahan alam di sekitarnya.

enal di dunia, yang menjadi salah satu dari tujuh keajaiban di dunia.

Apalagi pada saat-saat tertentu, secara berkala sering diadakan acara keagamaan dan seni budaya. Di Candi Prambanan, Anda dapat menyaksikan sendratari Ramayana yang diselenggarakan beberapa kali dalam seminggu. Di Candi Borobudur Anda juga dapat menyaksikan acara seni budaya atau sendratari dan perayaan hari besar umat Budha yaitu Waisak.

Ada juga wisata di Labuan Bajo yang merupakan sebuah surga tersembunyi yang ada di Indonesia bagian timur. Desa ini terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Nusa Tenggara Barat dan dipisahkan oleh Selat Sape.

Labuan Bajo adalah salah satu dari lima Destinasi Super Prioritas yang se-



terletak di Ubud, Taman Dedari menyuguhkan nuansa magis yang memukau. Taman ini memiliki tiga area utama: leisure (tempat bersantai), dining (tempat makan), dan event (area acara). Yang paling ikonik adalah patung bidadari raksasa yang menjadi spot favorit untuk berfoto.

Ada pula Puri Saren Agung yang merupakan bangunan peninggalan kerajaan ini tidak hanya memiliki arsitektur yang indah tetapi juga menyajikan pertunjukan tari tradisional. Tempat ini menawarkan pengalaman belajar budaya sekaligus wisata sejarah.

Wisatawan juga bisa menikmati keindahan alam Bali dengan bermalam di Sunrise Hill Camp. Berlokasi di Kin-

Ada beberapa tempat wisata yang menarik di Yogyakarta dan sekitarnya. Di kota Yogyakarta sendiri, Anda dapat mengunjungi Malioboro dengan aneka ragam barang dagangan yang ditawarkan kepada pengunjung seperti makanan dan souvenir.

Selain itu terdapat Keraton dan Puri Taman Sari. Di sekitar Yogyakarta, akan menemukan tempat wisata Candi Prambanan, Candi Mendut dan Candi Boko dengan ciri khas Hindu yang melekat pada bentuk bangunan dan ornamen candi.

Tak kalah menarik adalah di Yogyakarta juga dapat melihat keindahan dan kemegahan candi dengan ciri khas Budha yaitu Candi Borobudur yang terk-

dang dikembangkan di Indonesia.

Destinasi ini merupakan gerbang menuju Taman Nasional Komodo yang menyimpan keindahan alam yang menakjubkan dan hewan purba yang mendunia.

Mulai dari hewan endemik komodo di Pulau Rinca dan Pulau Komodo, deretan pulau eksotis, keragaman hayati bawah laut, hingga pantai aduhai, semua bisa Sobat Pesona temukan dengan memulai perjalanan di Labuan Bajo.

Menikmati pemandangan langit senja juga bisa menjadi cara lain menikmati Labuan Bajo. Spot strategis untuk menikmati keindahan senja ini berada tak jauh dari Bandar Udara Internasional Komodo. •



TANPA DRAMA DAN TAWAR-MENAWAR

Keputusan PSSI yang memberhentikan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia mengejutkan banyak pihak. Sebagai penggantinya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menunjuk Patrick Kluivert yang akan dibantu Alex Pastoor dan Denny Landzaat.

Banyak pihak yang menilai keputusan yang diambil PSSI ini adalah blunder dan fatal karena mendekati kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong masih dianggap orang yang tepat menangani Timnas Indonesia. Meski belum memberikan hasil namun STY telah berjasa membangun sepakbola nasional menjadi lebih baik.

Kekecewaan suporter makin bertambah setelah penggantinya adalah Patrick Kluivert. Pelatih gagal yang terlibat banyak kasus negatif seperti perjudian, dugaan pengaturan skors serta tidak mampu klub yang dilatih berprestasi lebih tinggi.

Reaksi datang bukan hanya dari pemain Timnas Indonesia tapi juga man-

tan pelaku sepakbola lainnya. Sepakbola nasional sudah berada di jalur yang benar selama diasuh Shin Tae Yong namun terancam berantakan dengan keputusan blunder PSSI.

Pemecatan Shin Tae Yong yang dilakukan PSSI dinilai tidak tepat dan berakibat fatal karena Timnas Indonesia saat ini tengah menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026. Butuh adaptasi yang tidak mudah bagi para pemain untuk memahami taktik, skema serta pola latihan dari pelatih baru.

Tidak ada waktu bermain-main atas dasar adaptasi atau lainnya. Sehingga ada pertarungan yang besar dari PSSI. Kalah berarti mereka gagal di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan siap dihujat. Sehingga tidak ada tawar-menawar, Tim-



nas Indonesia harus menang.

Kritikan tajam yang disampaikan tidak membuat PSSI goyah. Ada beberapa alasan mengapa mereka mengganti Shin Tae Yong sebagai pelatih Timnas Indonesia meski dianggap mampu mengangkat kualitas sepakbola Indonesia melalui program naturalisasi.

Terkait keputusan tersebut Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyatakan, pergantian terhadap Shin Tae Yong sebagai pelatih Timnas Indonesia sudah dilakukan sejak lama. Ada beberapa pertimbangan mereka lakukan diantaranya soal tactical issue dan komunikasi yang dianggap kurang baik.

Namun kekalahan Indonesia menghadapi China di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah puncaknya. PSSI sudah menghitung-hitung peluang Timnas In-



donesia, namun kekalahan atas China tidak diprediksi. Sehingga keputusan pada Shin Tae Yong akan diambil.

"Bukan Piala AFF, tapi itu salah satunya," ujar Erick Thohir.

Ada pertimbangan mengapa pemberhentian Shin Tae Yong baru dilakukan sekarang yakni

karena jarak pertandingan ke pertandingan mepet, sehingga menurut PSSI jeda bulan November ke Maret adalah yang paling tepat.

Di bulan November PSSI bergerak mencari pelatih baru dan telah mendapatkan 3 kandidat. Untuk siapa yang terpilih akan diumumkan Tanggal 12 Januari nanti.

Siap Tanggung Resiko

Keputusan merekrut Patrick Kluivert memang cukup mengandung resiko karena perlu adaptasi baru lagi. Hal ini sepertinya sudah disadari Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Ukurannya hanya satu yakni kualifikasi Piala Dunia





2026.

Pelatih Shin Tae Yong dibebani harus lolos ke final ajang sepakbola terbesar dunia tersebut. Setelah STY pergi kini beban tersebut harus dipikul Patrick Kluivert dan dua asisten pelatihnya. Kalah berarti mereka gagal, dan adalah kegagalan dari PSSI juga.

"Nah ada yang debat mengenai track record Patrick. Banyak track record pelatih yang dulu belum terkenal kemudian bisa mengendalikan locker room kok. Zidane, ketika menjadi pelatih Madrid langsung oke, padahal belum ada track record," terangnya.

Diakui Erick Thohir tekanan di sosial media begitu tinggi namun resiko itu mereka jalani demi perubahan yang lebih baik lagi.

"Ya pasti. Itu risiko. Kami sudah sampaikan kepada tiga-tiganya ketika interview, Saya bilang 'tahu tidak Indonesia media sosialnya paling gila di dunia?' Ya mereka menyadari. Kalau mereka mau mengambil pekerjaan ini, mereka mesti tahu risikonya. Kan kita sudah sama-sama dewasa," ujarnya.

Untuk membuktikan apakah keputusan PSSI ini benar atau tidaknya dengan menggantikan Shin Tae Yong, Erick Thohir meminta masyarakat Indonesia

memberi kesempatan kepada Patrick Kluivert, Alex Pastoor dan Denny Landzaat untuk melaksanakan tugasnya.

"Saya melepaskan coach Shin Tae-yong, apakah saya sudah menandatangani kontrak dengan Kluivert? Belum. Itu adalah etika. Mungkin orang lain akan menandatangani kontrak terlebih dahulu sebelum melepaskan, tetapi saya tidak melakukan hal itu," ujarnya.

Meski membenarkan merekrut Patrick Kluivert dan dua asistennya namun mereka belum melakukan kontrak. Sayangnya publik sudah bereaksi berlebihan.

"Hal ini yang saya lihat, belum apa-apa sudah ada upaya untuk merusak Timnas Indonesia. Berikan kesempatan kepada Kluivert. Janganlah kita menjadi masyarakat yang kejam dan tidak tahu berterima kasih, mari kita bersikap proporsional," harapnya. ●



TERNYATA BUKAN SEBAGAI PELATIH

Meski berstatus sebagai pelatih kepala namun tugas utama Patrick Kluivert ternyata bukan melatih.

Untuk urusan teknis tersebut diserahkan kedua asistennya, Alex Pastoor dan Denny Landzaat yang kepelatihannya lebih teruji daripada Kluivert. Patrick Kluivert bakal ditugasi untuk melobi pemain-pemain diaspora untuk bergabung dengan skuad Garuda.

PSSI memilih Kluivert lebih pada jiwa kepemimpinannya. Dengan latar belakang sebagai legenda timnas Belanda, Kluivert diyakini akan dihormati para pemain diaspora skuad Garuda yang lahir dan besar di Belanda.

"Di Belanda dia dihargai, istilahnya 'abang-abangan'. Kalau abang-abangan udah manggil, junior pasti siap. Mudah-mudahan ya begitu yang nanti kami dapat," ujar Arya Sinulingga selaku Exco PSSI.

Untuk urusan teknik dan taktik, pelatih baru akan dibantu asistennya yang berpengalaman.

"Coba lihat. Kenapa di Eropa itu pelatih disebutnya manajer? Manajer punya pelatih teknisnya," ujar Arya.

Arya menjelaskan, PSSI membutuhkan pemimpin pelatih dan sosok itu adalah Patrick Kluivert.

"Dia didampingi oleh asisten pelatih yang kuat secara teknik. Kombinasi inilah yang dinamakan tim kepelatihan," imbuhnya.

Dia menjelaskan bahwa timnas Indonesia membutuhkan pelatih yang memiliki leadership karena pemain diaspora levelnya makin tinggi.

Patrick Kluivert dan dua asisten pelatihnya, juga bukanlah sosok sembarangan. Selain memiliki nama besar di Eropa, mereka merupakan sosok yang menjadi panutan bagi para pemain Belanda.

Mereka lanjutnya, dicari orang yang memang di Eropa di Belanda pun dia dihargai. Kalau istilahnya dia abang-abangan, kalau sudah abang-abangan manggil kan namanya kita junior-junior pasti 'Siap Bang', 'Arahan Bang'.

Patrick Kluivert dikontrak dengan du-

rasi dua tahun dari 2025 hingga 2027 dengan opsi perpanjangan kontrak bersama Alex Pastoor dan Denny Landzaat. Selain itu, ada juga dua pelatih Timnas Indonesia yang menjadi asisten.

Secara track record, Patrick Kluivert cukup meragukan kemampuannya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Namun kemungkinan ia akan terbantu oleh Alex Pastoor dan Denny Landzaat yang ternyata punya rekam jejak lebih baik sebagai pelatih sehingga diyakini bisa membawa Timnas Indonesia lebih baik pasca kepergian Shin Tae Yong.

Patrick Kluivert dan Alex Pastoor sudah lama saling mengenal yakni sejak mengikuti kursus pelatih bersama, dan dia telah membuktikan kemampuannya di Almere City.

Alex Pastoor juga punya pengalaman

Karir Kepelatihan:	
ALEX PASTOOR:	
2001-2001	AZ Alkmaar U19
2005-2006	Fenerbahce U21
2006-2008	SC Heerenveen
2008-2009	Feyenoord II
2009-2011	Excelsior
2011-2013	NEC Nijmegen
2014-2014	Slavia Prague
2014-2014	AZ Alkmaar (assistant)
2014-2014	AZ Alkmaar (caretaker)
2015-2017	Sparta Rotterdam
2019-2021	SCR Altach
2022-2024	Almere City
2025-?????	Indonesia (assistant)
DENNY LANDZAAT:	
2014-2016	AZ Alkmaar U21 (assistant)
2016-2017	AZ Alkmaar U17
2017-2018	AZ Alkmaar U21 (assistant)
2018-2019	Feyenoord (assistant)
2019-2020	Al-Ittihad (assistant)
2021-2022	Willem II (assistant)
2022-2022	Al-Taawoun (assistant)
2022-2023	Lech Poznań (assistant)
2024-2023	Ferencváros (assistant)
2025-?????	Indonesia (assistant)

hebat sebagai pelatih Almere City tempat Thom Haye pernah bermain.

Dia juga dikenal sebagai sosok yang piawai membangun taktik tim. Kehadirannya diharapkan dapat membawa warna baru dalam strategi permainan Timnas Indonesia.

Sedangkan Denny Landzaat, merupa-

kan teman dekat Patrick Kluivert di masa muda di Ajax, dikenal sebagai asisten pelatih yang sangat loyal dan berpengalaman, pernah bekerja dengan pelatih top seperti John van den Brom dan Pascal Jansen.

Dengan pengalaman menjadi asisten di klub-klub besar seperti Feyenoord, Al Ittihad, dan Lech Poznan Polandia, Landzaat akan membawa pengalaman internasionalnya ke Timnas Indonesia.

Lebih spesial lagi, Landzaat memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Kehadirannya semakin menambah semangat dan kedekatan dengan para pemain.

Selain itu Denny Landzaat juga menguasai bahasa Indonesia dan sangat paham dengan budaya sepakbolanya.

Duet asisten pelatih ini diharapkan bisa menutupi kelemahan Patrick Kluivert yang dianggap sebagai pelatih gagal hingga ditolak suporter Timnas Indonesia.

Sebagai pelatih Alex Pastoor (58) menyukai formasi 3-4-1-2 yakni menggunakan tiga center back. Pola ini hampir menyerupai Shin Tae Yong yang juga memakai 3-4-2-1.

Untuk diketahui Patrick Kluivert merupakan eks striker Timnas Belanda. Saat masih menjadi pemain, ia bermain di sejumlah klub papan atas Eropa seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona, CF Valencia, Newcastle United, PSV dan Lille.

Setelah pensiun sebagai pemain pada 2008, Kluivert pernah menjadi asisten pelatih Louis van Gaal di Timnas Belanda yang meraih peringkat ketiga di Piala Dunia 2014 Brasil. Pada 2015, Kluivert menjabat pelatih Timnas Curaçao di kualifikasi Piala Dunia 2018 dan kualifikasi Piala Karibia 2017. Sebelum ke Indonesia, Kluivert menjadi pelatih klub Turki, Adana Demirspor.

Debut Kluivert akan dimulai saat Timnas Indonesia melakoni laga lanjutan ronde ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 grup C zona Asia melawan Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret dan Bahrain di Stadion GBK, Jakarta pada 25 Maret. ●



BADAI PHK MASIH BERLANJUT

Perjalanan 2025 baru saja dimulai, namun ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal telah menghantui banyak pekerja di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga melanda perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia, menggambarkan tantangan besar yang dihadapi sektor ketenagakerjaan.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengungkapkan, sebanyak tiga pabrik berencana melakukan PHK terhadap lebih dari 4.000 orang dalam waktu dekat. Namun, ketiga pabrik tekstil dan produk tekstil ini masih berusaha untuk menyehatkan arus kasnya.

Presiden KSPN, Ristadi, menyatakan, ketiga pabrik ini berada di Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Tangerang. PHK terbesar rencananya dilakukan oleh pabrik produsen sepatu untuk merek internasional di Tangerang lebih dari 2.400 pekerja.

"Para pekerja, khususnya anggota KSPN, memaklumi keputusan PHK, sebab tidak ada permintaan masuk ke pabrik. Yang penting, hak pekerja bisa dipenuhi. Kami juga punya logika, masa tidak ada permintaan memaksa ada pekerjaan," kata Ristadi, Jumat, 10 Janu-

ari 2025.

Ristadi menjelaskan, ketiga pabrik secara umum memiliki masalah yang sama, yakni penurunan permintaan. Salah satunya yakni pabrik sepatu di Tangerang mengalami penurunan permintaan ekspor. Fasilitas produksi sepatu ternama ini harus mengurangi 12 persen dari total tenaga kerjanya yang mencapai 19.000 orang. Ia pun prihatin lantaran 2.400 buruh yang terkena PHK dari pabrik tersebut sudah bekerja puluhan tahun.

"Sedihnya yang sudah kerja lama yang terkena PHK. Mereka bingung mau ke mana setelah PHK. Akhirnya, ada situasi-situasi psikologi seperti itu," katanya.

Sementara itu, pabrik yang melakukan PHK di Subang dan Bandung merupakan produsen serat dan benang dengan total pegawai yang akan di-PHK mencapai 1.650 orang. Ristadi menyampaikan,



kedua pabrik tersebut berencana melakukan PHK lantaran produk teranyar mereka tidak tersekap di pasar domestik.

Ristadi menilai akar PHK pabrik serat dan benang di Subang dan Bandung disebabkan penguasaan produk impor di pasar lokal. Kedua pabrik tersebut telah berencana untuk gulung tikar dan terpaksa merencanakan PHK.

"Namun, kedua pabrik tersebut masih berusaha melakukan restrukturisasi dengan perbankan dan masih mencari pesanan baru. Jadi, saya belum berani menyebutkan nama perusahaanya," ujarnya.

Ristadi memproyeksi, tren PHK di industri TPT masih akan berlanjut tahun ini. Ini karena pasar domestik masih dipenuhi oleh barang-barang impor akibat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Pemerintah telah berencana untuk merevisi Permendag 8/2024. Namun, Ristadi menekankan rencana tersebut masih sebatas wacana hingga dokumen amendemen disahkan pemerintah.

"Jadi, sejauh ini belum ada kepastian situasi pasar domestik, setidaknya dari sisi regulasi yang bisa melindungi industri dalam negeri. Oleh karena itu, PHK massal masih akan terus berulang," katanya.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, sebelumnya mengatakan, Permendag 8/2024 telah membuat industri tekstil nasional terpukul. Ia menilai aturan itu melancarkan pelaku industri pakaian jadi untuk menyerap benang dan kain impor dibandingkan besutan lokal.

"Harapannya revisi beleid tersebut dimulai dari perbaikan rantai pasok di industri pakaian jadi agar industri tekstil dan produk tekstil tumbuh lebih baik tahun ini," kata Reni di kantornya, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.

Perubahan aturan juga diharapkan memicu kapasitas produksi industri TPT, khususnya dengan kapasitas industri kecil dan menengah atau IKM. Revisi Permendag 8/2024 dapat membuat IKM garmen mengisi permintaan produk dengan harga di bawah Rp200 ribu per unit. Industri pakaian jadi dan industri tekstil merupakan subsektor dari industri

tekstil dan produk tekstil atau TPT. Performanya pada tahun lalu hanya tumbuh 3,23 persen secara tahunan.

Reni menilai kinerja industri tekstil sepanjang 2024 tertekan produk impor dan hanya bisa tumbuh sekitar 1,84 persen. Pada saat yang sama, performa industri pakaian jadi berhasil tumbuh hingga 4,62 persen.

Kementerian Ketenagakerjaan sendiri

jadi pada sektor industri pengolahan, dengan provinsi yang paling banyak mengalami PHK adalah Jawa Tengah, menggantikan Jakarta yang sebelumnya menduduki posisi ini pada November 2024.

"Sektor industri pengolahan masih paling banyak melakukan PHK dan dilakukan di Jawa Tengah. Kami tidak spesifik mencatat sektor manufaktur apa,



mencatat jumlah tenaga kerja yang terkena PHK sepanjang 2024 mencapai sekitar 68.000 orang. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 4,84 persen dibandingkan dengan 2023 yang tercatat sebanyak 64.855 orang.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, mengatakan, mayoritas PHK ter-

tapi terjadi di sektor manufaktur," kata Indah, Senin, 6 Januari 2025.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pemerintah kembali menerima sejumlah laporan terbaru soal PHK pada awal tahun ini, melanjutkan tren yang terjadi sepanjang tahun sebelumnya. Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima data PHK per Januari 2025. Hanya saja, dia

tak membeberkan berapa jumlah dan berasal dari sektor industri mana saja.

Laporan tersebut, kata dia, juga berasal dari data Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, termasuk Dinas Ketenagakerjaan wilayah masing-masing.

Yassierli sebelumnya juga menyampaikan bahwa hingga pengujung 2024, jumlah PHK yang terjadi di Indonesia telah mencapai 72 ribu, yang berpotensi masih dinamis dan kemungkinan bertambah. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut juga telah naik 11,02 persen. Sepanjang 2023, pemerintah melaporkan angka PHK sebanyak 64.855 orang.

Kebijakan Bermasalah

Kalangan ekonompun juga memprediksi badai PHK akan berlanjut di 2025 ini, sejalan dengan adanya ketidakpastian global dan pasar domestik berpotensi tertekan akibat kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN).

"Saya sepakat kalau ada potensi PHK yang tetap besar di tahun depan. Karena apa? Permasalahannya ada di sisi permintaan domestik dan dari masalah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi sisi produksi," ujar Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, akhir tahun lalu.

Berbagai rencana kebijakan -

kan itu, kata dia, akan berpotensi mengurangi daya beli kelas menengah, yang pada akhirnya juga akan mengurangi permintaan domestik. Apalagi, Indonesia belakangan ini juga tengah dihantui oleh isu kelas menengah yang belakangan ini terus mengalami tren penurunan. Padahal, 84 persen konsumsi domestik disumbangkan oleh kelas ini.

"Ini pasti akan mengurangi kapasitas terpakai, sehingga industri harus menyesuaikan penjualan dengan melakukan penghematan dari sisi produksi,"

ujar dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Oktober 2024, jumlah penduduk kelas menengah Indonesia memang tercatat turun signifikan menjadi hanya 47,85 juta orang di 2024 dibandingkan 2019 yang masih sebanyak 57,33 juta orang.

Menurut Faisal, industri di Indonesia saat ini juga dihantui oleh rencana kebijakan proteksionisme Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mulai diimplementasikan pada paruh kedua 2025.

Kebijakan itu juga akan mempengaruhi pelemahan mata uang Rupiah, yang tak lain juga membuat pembengkakan biaya bahan baku di Indonesia yang bergantung pada bahan impor.

"Ini juga akan sangat berpengaruh ke industri yang bergantung pada barang bahan baku impor, yang jadi lebih mahal," ujarnya.

Sepanjang 2024, Indonesia sendiri telah dihantui oleh badai PHK yang kian memanas sejalan dengan terpukulnya salah satu sektor industri manufaktur terbesar di Indonesia, tekstil yang kembali goyah akibat maraknya produk impor.

Senada, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menjelaskan, pasar domestik berpotensi tertekan akibat kenaikan PPN dan pada akhirnya menekan daya beli masyarakat.

Dari sisi eksternal, kebijakan ekonomi global diprediksi masih tidak pasti terlebih setelah Donald Trump terpilih



ih sebagai presiden Amerika Serikat.

"Tekanan baik dari sisi domestik maupun eksternal bagi Indonesia bisa mengakibatkan badai PHK bisa saja berlanjut apabila pemerintah tidak melakukan terobosan untuk mengantisipasi hal ini," terang Josua.

Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Sutrisno Iwantono, menyatakan, gelombang PHK massal harus dihindari, terutama di tengah situasi ekonomi Indonesia yang saat ini sedang tidak dalam kondisi terbaik.

"Ekonomi kita saat ini sedang mengalami kesulitan dan banyak orang meramalkan tahun 2025 juga akan menghadirkan tantangan yang besar. Namun, kami berharap tidak akan terjadi gelombang PHK besar yang mempengaruhi banyak pekerja," ujarnya, Sabtu, 11 Januari 2025.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Sunarno, juga mengonfirmasi bahwa beberapa sektor, terutama industri padat karya seperti garment dan tekstil, telah mengalami pengurangan jumlah karyawan secara signifikan.

"Memang beberapa perusahaan telah melakukan PHK besar-besaran dalam beberapa bulan terakhir. Namun, hal ini tidak selalu disebabkan oleh kebangkrutan atau penutupan perusahaan. Banyak perusahaan yang melakukan pengurangan karyawan karena proses relokasi dan penyesuaian dengan kondisi pasar," ujar Sunarno.

Dirinya menambahkan bahwa meskipun terjadi PHK, banyak perusahaan yang masih berusaha untuk tetap beroperasi meski dengan jumlah tenaga kerja yang lebih sedikit.

Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menekankan pentingnya penguasaan keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman. Ia menyebutkan bahwa di masa depan, keterampilan teknis seperti penguasaan Artificial Intelligence (AI) dan Big Data akan sangat dibutuhkan.

Selain itu, keterampilan lunak seperti kemampuan berpikir kreatif, ketahanan mental, kepemimpinan, dan analisis yang tajam juga menjadi hal yang sangat penting bagi pekerja masa depan.

"Tenaga kerja tidak hanya harus fokus

pada keterampilan teknis, tetapi juga harus mengembangkan potensi holistik mereka untuk dapat bersaing di dunia kerja yang semakin kompleks," kata Yassierli.

Mengutip data dari BPS 2024, sektor informal di Indonesia masih mendominasi lapangan pekerjaan. Sementara

Yassierli pun mengajak seluruh pihak untuk bersinergi dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan teknologi. Ia mengajak dunia akademis, industri, dan pemerintah untuk berkolaborasi dalam menciptakan program pelatihan dan pengembangan



tingkat pendidikan tenaga kerja di Indonesia sebagian besar masih tergolong rendah, yaitu hanya sampai tingkat SD atau SMP.

Hal ini menunjukkan tantangan besar dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia untuk dapat bersaing di pasar kerja global yang semakin kompetitif.

yang dapat membantu tenaga kerja Indonesia untuk memperbarui keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.

Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan sektor ketenagakerjaan Indonesia dapat lebih siap menghadapi perubahan dan tantangan yang ada di masa depan. •

SIAP-SIAP EVALUASI PSN

Sepekan sejak rencana evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) di masa Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi wacana, tampaknya belum terlihat aral melintang. Malah Jokowi menganggapnya sebagai hal wajar jika Presiden Prabowo Subianto melaksanakannya.

Jokowi mengemukakan evaluasi diperlukan agar program-program yang dijalankan Pemerintah berjalan lebih efektif dan efisien. “Ya nggak apa-apa. Kan baik. Dievaluasi akan baik, dikoreksi akan baik,” kata Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Selasa, 14 Januari 2025

Menurut Jokowi, pemerintahannya tidak sempurna. Program-program yang diterapkan di masa pemerintahannya boleh jadi banyak memiliki kekurangan. "Wong belum tentu yang kita putusan itu betul 100 persen. Bisa dikoreksi, bisa dievaluasi," kata dia.

Jokowi juga menanggapi pengerjaan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang mengalami perlambatan sejak Prabowo menjabat sebagai Presiden. Pembangunan IKN tidak termasuk dalam Astacita Prabowo - Gibran. Mes-

di masa Presiden Jokowi itu pada mulanya dikemukakan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto akan mengevaluasi proyek strategis nasional yang kurang berguna untuk masyarakat.

"Kemudian bagaimana Pak Prabowo juga akan melakukan hal-hal kecil untuk rakyat untuk kemudian bagaimana supaya mengevaluasi yang namanya proyek-proyek strategis nasional yang kurang berguna untuk masyarakat," ujar Sufmi Dasco Ahmad dalam seminar Pembangunan Indonesia 2025: Harapan dan Tantangan di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025.

Menurut dia, hal ini tentunya akan membuat sejumlah pihak akan kurang senang dengan langkah pemerintahan tersebut. Namun, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto tetap bertekad



ki masih mendapat alokasi anggaran di APBN 2025, jumlahnya menurun drastis dibanding masa Pemerintahan Jokowi. "Ya nyatanya anggarannya kan untuk IKN tetap," kata Jokowi.

Soal evaluasi PSN yang diputuskan

bahwa hal tersebut harus dilakukan
apapun risikonya.

"Hal ini tentunya tidak akan atau kemudian akan membuat sebagian ada yang kurang happy dengan pemerintahan. Oleh karena itu Pak Prabowo tetap

bertekad bahwa ini harus dilakukan, apapun itu risikonya kita akan jalan,” kata Dasco.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur untuk memperlancar arus transportasi dan memacu pembangunan ekonomi. Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras mewujudkan proyek ini.

Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat. “Kita harus tahu bahwa infrastruktur ini adalah dibangun dengan uang rakyat. Saya ingatkan untuk kesekian kalinya bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” katanya menegaskan.

Presiden juga berpesan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan semua pihak yang terlibat dalam proyek ini, untuk memastikan efisiensi dan kualitas dalam pembangunan. “Yakinkan bahwa semua yang dibangun adalah sesuai spesifikasi, yakinkan bahwa efisiensi dan kualitas dipertahankan, berilah yang terbaik sehingga kemampuan negara dan bangsa sebesar-besarnya bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat kita,” kata Presiden Prabowo.

Toh Dasco belum menjelaskan lebih lanjut terkait proyek apa saja yang akan dievaluasi. Ia menyatakan keputusan tersebut nantinya akan berada di tangan pemerintah. “Rinciannya gimana itu nanti dari pemerintah dong,” katanya.

Selain itu, Dasco mengatakan bahwa Prabowo Subianto kini tengah melakukan berbagai upaya pembenahan dan efisiensi di berbagai lini pemerintahan. Salah satunya memangkas berbagai anggaran yang berada di Kementerian dan Lembaga.

“Yang saya kemarin ikuti adalah pengeluaran ATK (alat tulis kantor) untuk seluruh kementerian dan lembaga ini jumlahnya Rp44,4 triliun. Hanya belanja saya. Dan itu dilakukan efisiensi terhadap pengeluaran kementerian dan lembaga,” katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Edi Purwanto mengemukakan sejumlah pembangunan PSN di Pulau Sumatera berada

dalam kondisi mangkrak. Selain itu, kualitas konstruksi juga menjadi salah satu permasalahan yang juga kerap ditemukan.

“Saya lihat ada beberapa PSN yang memang posisi hari ini banyak yang mangkrak,” kata Edi, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri PU di Senayan, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2024.

Toh Edi masih berharap ada evaluasi terhadap beberapa PSN yang ia sebut mangkrak itu. “Harapan kita mungkin, mumpung Pak Menteri (Pekerjaan Umum) baru, cek ada berapa sih program-program yang sudah menghabiskan uang triliunan bahkan ratusan

proyek tersebut. “Mohon nanti ditinjau secara bersama-sama. Treatment-nya apa yang harus dilakukan. Karena sejauh saya sudah 209 lebih bendungan di Sarolangun tapi nggak berfungsi,” ujarnya.

Sejauh ini, berdasarkan catatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), total terdapat 233 PSN selama pemerintahan Presiden ke-7 RI, Jokowi, dengan rincian sebagai berikut:

- Sumatera 45 proyek dan 1 program
- Kalimantan 19 proyek
- Jawa 86 proyek dan 1 program
- Bali dan Nusa Tenggara 17 proyek



triliun tapi mangkrak,” sambungnya.

Menurut dia, bendungan yang berlokasi di Sarolangun, Jambi, mangkrak dan tidak jelas fungsinya. Ia berharap agar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dapat segera meninjau proyek-

- Sulawesi: 33 proyek
- Maluku dan Papua 17 proyek
- Lainnya 11 proyek dan 14 program.

Dari jumlah tadi, sebanyak 105 proyek dinyatakan rampung per November 2024 serta 28 proyek dan 10

program telah beroperasi. Sementara itu, total ada 44 proyek dan tiga program yang masih dalam tahap pembangunan serta lima proyek masih dalam proses transaksi. Adapun sebanyak 46 proyek dan tiga program masih dalam proses penyiapan.

Namun, menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi mewariskan lagi sejumlah PSN untuk pemerintahan berikutnya. Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susi wijono Moegiarso, menga-

5. Kawasan Industri Indonesia Giga Industry Park (IGIP)
6. Kawasan Industri Kolaka Resources Industrial Park (KRIP)
7. Kawasan Industri Wiraraja Green Renewable Energy & Smart-Eco Industrial Park (GESEIP)
8. Pengembangan Kawasan Industri KEK Galang Batang
9. Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung
10. Pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. Section Harbour

siapa pemerintahan terpilih selanjutnya, Nailul menekankan perlunya memikirkan dampak pada masyarakat dan perekonomian untuk setiap proyek strategis nasional yang dikerjakan pemerintah. Ia mencontohkan Bandara Kertajati, di Jawa Barat, yang termasuk ke dalam daftar PSN. Meskipun bandara ini sudah selesai dibangun, terbukti sepi karena tidak terlalu diminati masyarakat.

"Makanya untuk selanjutnya, harus memperhatikan dari keberlangsungan



takan, total ada 10 PSN 2024 yang telah ditetapkan Jokowi untuk dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya yang ternyata dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Berikut daftar PSN 2024 warisan Jokowi untuk pemerintahan Prabowo:

1. Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) Tropical Coastland
2. Pengembangan Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai
3. Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial estate (NEPie) Parigi Moutong
4. Kawasan Industri Neo Energy Morowali Industrial Estate (NEMIE)

Road II.

Nah, dalam pandangan ekonom Indef Nailul Huda, keberlanjutan proyek-proyek ini akan sangat tergantung pada alokasi anggaran, dan tentunya siapa presiden yang akan terpilih kelak. Menurut dia, mengingat mayoritas anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka kelangsungan proyek-proyek ini akan sangat bergantung pada ruang fiskal yang tersedia; terlebih karena Presiden Jokowi telah menginstruksikan pembekuan anggaran kementerian/lembaga agar dapat dialihkan untuk bantuan sosial dan bantuan pupuk bersubsidi. Terlepas dari faktor anggaran dan

proyeknya ke depan, sangat menarik kalau nanti kita melihat apakah PSN yang sudah jadi di tahun 2023, dan yang dikerjakan di tahun 2024 ini ke depannya apakah memang bermanfaat bagi masyarakat luas atau menjadi bangunan mangkrak lagi," jelasnya.

Meskipun pada umumnya berbagai PSN ini kerap menyerap tenaga kerja dalam jangka pendek, Nailul menilai yang lebih penting adalah dampak dan manfaat bagi publik dalam jangka menengah dan panjang.

Toh di awal 2025 pemerintah Prabowo baru akan mengevaluasi proyek-proyek yang akan berlanjut atau dihentikan. Kita tunggu kebijakannya. •

SUMSEL IKUT EVALUASI PSN

Bersandar pada data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sumatera Selatan memiliki 15 Proyek Strategis Nasional (PSN). Sebut saja antara lain Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung, Jalan Tol Betung-Tempino-Jambi, Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim, Jalan Tol Lubuklinggau-Curup-Bengkulu, Pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat atau Palembang New Port, dan jalur Kereta Api Kertapati-Lahat.

Bukan hanya jalan tol dan kereta api, dan pelabuhan laut. Beberapa PSN lain adalah pengembangan Light Rail Transportation (LRT) Sumsel, Kawasan Industri Tanjung Enim, Bendungan Tiga Dihaji, Pembangunan Jaringan Irigasi Lematang, Pembangunan Jaringan Irigasi Komering, Upgrading kilang-kilang eksisting/Refinery Development Masterplan (RDMP). RDMP RU III Plaju, Pembangunan bahan bakar hijau (Green Refinery RU III Plaju), Gasifikasi batu bara di Muara Enim, dan Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Palembang.

Belakangan, Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mengevaluasi rencana 15 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan dibangun dan ditargetkan selesai pada 2024 hingga 2026. Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Elen Setiadi mengungkapkan sudah mengevaluasi rencana 15 PSN yang ada di Sumsel.

Dari evaluasi tersebut, terdapat PSN yang belum sesuai dengan target, yaitu Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Palembang, yang sebelumnya ditargetkan selesai sebelum Agustus 2024. "Sudah ada perencanaan baru dan diharapkan dapat groundbreaking pada 2025," ungkapnya di Palembang, Selasa, 24 Desember 2024.

Kemudian, PSN yang juga belum mencapai target pada 2024, Pelabuhan Tanjung Carat atau Palembang New Port yang direncanakan selesai dan groundbreaking pada akhir tahun 2024. Namun, perkembangan saat ini Pelabuhan Tanjung Carat itu masih berproses untuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

"Lahannya masih dalam proses HPL, dalam pekan ini selesai pengukuran,

tinggal diajukan ke kementerian dan dibuatkan SK HPL-nya. Kemudian, sedang lakukan pembicaraan dengan Wamen Investasi, dan Kementerian Perhubungan untuk skema pengembangannya," ujar Elen.

Terkait lahan Pelabuhan Tanjung Carat itu tinggal Mozaik 5. "Sedangkan Mozaik 6 sudah rampung penyelesaian lahan," Sambung Pj Gubernur Elen.

Lalu, PSN yang juga masih belum mencapai target adalah PSN Kereta Api Logistik Batu Bara Kertapati-Lahat. Penyebabnya, kata dia, proyek ini masih terkendala oleh pembangunan jalan layang (flyover) pendukung lintasan.

Selain itu, PSN Dimetil Eter (DME) atau Gasifikasi Batu Bara akan dibangun di Kabupaten Muara Enim, hingga saat ini belum berjalan, karena tidak adanya investor. "Kalau proyek PSN yang tidak berjalan itu Dimetil Eter (DME) di Muara Enim, tidak berjalan karena tidak ada investornya," kata Elen pula.

Bagaimana kelanjutan evaluasi 15 PSN di Sumsel? Sebelum 2025 berakhir akan lebih terang dan jelas perkembangannya. ●





PRABOWO SIAPKAN OSPEK KEPALA DAERAH TERPILIH



Presiden Prabowo Subianto berencana menggelar retreat dengan mengumpulkan seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Retreat pertama kali digelar untuk Kabinet Merah Putih di Akademi Militer sepekan setelah dilantik pada Oktober tahun lalu.

Para menteri kala itu dikumpulkan selama tiga hari di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Anggota kabinet menjalani rangkaian kegiatan meliputi senam pagi, sarapan bersama, latihan baris-berbaris. Kemudian, para menteri turut diberikan pengarahan langsung dari Prabowo, seperti pemberian materi tentang pencegahan korupsi, pertumbuhan ekonomi, hilirisasi, dan reformasi birokrasi.

Perihal retreat untuk kepala daerah terpilih ini pertama kali disampaikan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

"Juga keinginan Bapak Presiden bahwa seluruh kepala daerah itu akan dikumpulkan seperti dulu para menteri, wakil Menteri, dan kepala badan dikumpulkan di Magelang," kata Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025.

Meski begitu, belum terungkap kapan retreat kepala daerah akan digelar dan di mana lokasinya. Yusril mengatakan momen tersebut penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ia berharap output retreat nanti membuat pemerintah pusat dan daerah punya perspektif yang sama terkait program-program pembangunan ke depan.

"Apalagi, sekarang ini terkait dengan

daerah itu harus ada sinkronisasi antara pusat dan daerah, program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan pemerintah daerah,” kata dia.

Senada dengan Yusril, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, ada rencana kepala daerah terpilih melakukan kegiatan semacam retreat sebelum dilantik. Dasco menyebutkan Prabowo ingin menyatukan visi dan misi pimpinan di daerah supaya satu kesatuan dengan pusat.

“Menurut saya, yang saya dengar

Dasco mengatakan, dari pelaksanaan itu diharapkan dapat membangun semangat dan kekompakan. Ia menyebutkan diperlukan kegiatan seperti itu lantaran tak semua kepala daerah berasal dari partai yang sama.

“Dan saya pikir semangat ini, semangat kekompakan, semangat persatuan, kan kita sama-sama tahu bahwa kepala daerah yang dipilih ini tentu berasal dari partai yang berbeda, sehingga perlu dalam satu kegiatan yang saya dengar disampaikan visi misi dan semangat per-

menjadi prioritas-prioritas presiden,” ujar Hasan Nasbi kepada wartawan di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Senin, 13 Januari 2025.

Kendati demikian, Hasan mengaku tidak mengetahui secara pasti kapan retreat kepala daerah tersebut akan digelar. Ia hanya menyebutkan, rencana retreat itu akan digelar oleh Kementerian Dalam Negeri.

“Iya dong (Prabowo bakal hadir di retreat). Kalau retreat bersama kepala negara kan. Tapi kalau detailnya sama



bahwa memang ada rencana seperti itu (retreat). Tentunya idenya ini untuk bagaimana kemudian menyamakan visi para kepala daerah yang baru terpilih, bagaimana kemudian menjalankan program pemerintah pusat secara merata untuk kebaikan rakyat di daerah,” kata Dasco di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 13 Januari 2025.

satuan,” katanya.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan, retreat tersebut bertujuan untuk menjaga kekompakan para kepala daerah terpilih agar paham mengenai hal-hal prioritas Prabowo Subianto.

“Biar kompak, biar paham arah pembangunan negara. Terus apa yang

Pak Mendagri aja ya. Itu kan kegiatannya pasti sama Mendagri,” kata dia.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mendukung ide Prabowo untuk menyelenggarakan kegiatan retreat atau pembekalan bagi kepala daerah. Cak Imin juga berpendapat bahwa hal itu bertujuan menyamakan visi pemerintah pusat dan

daerah.

"Ya, ada ide itu lama, diskusi sudah dilakukan agar visi nasional dengan visi daerah nyambung, ada ide satu konsolidasi bentuknya bisa berupa retreat, bisa macam-macam," kata Cak Imin di Gedung Konvensi TMPN, Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu, 11 Januari 2025.

Namun, Cak Imin menyerahkan pelaksanaan retreat tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan partainya telah melakukan kegiatan penyamaan visi pusat dan daerah itu kepada para kepala daerah terpilih.

Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mendukung ide Prabowo Subianto yang ingin mengumpulkan para kepala daerah terpilih seperti kegiatan retreat yang dilakukan Kabinet Merah Putih. Dia menyebut retreat untuk kepala daerah terpilih kegiatan yang positif.

"Retreat untuk kepala daerah terpilih itu bagus dilakukan. Apalagi kalau pelantikan positif ditunda sampai dengan Maret," kata Rifqi.

Rifqi menyarankan agar retreat untuk para kepala daerah terpilih segera dilakukan. Menurutnya, retreat bisa dilakukan dua bulan ke depan sebelum pelantikan.

"Saya menyarankan retreat dilakukan sekarang selama dua bulan ke depan agar para kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, bisa langsung bekerja setelah dilantik," ucapnya.

Dia menyebut kepala daerah terpilih perlu diberi pembekalan terkait nasionalisme hingga loyalitas. Sebab, tidak semua kepala daerah terpilih memiliki pengalaman di pemerintahan.

"Di sana diisi selain soal nasionalisme, loyalitas, juga saya kira yang tidak kalah penting soal pembekalan kapasitas kepala daerah. Karena tidak semua kepala daerah yang terpilih punya pengalaman birokrasi dan pengetahuan terkait dengan pemerintahan secara umum, termasuk pemerintahan daerah," imbuhnya.

Dukungan dalam menggelar retreat kepala daerah di Akmil Magelang juga diberikan PDIP meski saat ini menjadi satu-satunya partai pemilik kursi DPR yang belum menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo. Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, mengatakan, pem-

impin daerah terpilih dari partainya siap bekerja sama dengan pemerintah pusat.

"Menurut kami, penyelarasan visi pusat dan daerah sangat baik," kata Guntur, Sabtu, 11 Januari 2025.

Guntur memberi contoh gubernur terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung, sudah menyampaikan sikap untuk mengikuti retreat tersebut.

Ketika disinggung mengenai gaya militeristik retreat, Guntur sendiri menyerahkan format pelatihan itu sendiri kepada pemerintah pusat. "Yang penting ke program utama bagaimana pemimpin-pemimpin itu pada akhirnya benar-benar mengabdikan ke rakyat," kata dia.

Gubernur DKI Jakarta terpilih, Pramono Anung, mengaku akan mengikuti pemerintah pusat. Hal ini juga termasuk mengikuti rencana kegiatan retreat atau pembekalan untuk kepala daerah.



Biar kompak, biar paham arah pembangunan negara. Terus apa yang menjadi prioritas-prioritas presiden.

"Yang namanya pemerintah daerah itu dalam koordinasi pemerintah pusat. Sehingga apa yang dipersiapkan oleh Presiden Prabowo untuk retreat dan sebagainya seyogianya semua kepala dari mengikutinya dengan baik," ujar Pramono kepada wartawan di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Sabtu, 11 Januari 2025.

Dia sekaligus menjelaskan kepatuhan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat ini tertuang dalam undang-undang (UU) yang mengatur tentang hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dia mengaku memahami aturan ini karena menjadi salah satu yang menyiapkan UU tersebut.

"Jadi yang pertama sebagai kepala daerah, tunduk taat patuh kepada apa yang dipersiapkan oleh pemerintah pusat. Karena UU yang mengatur tentang

hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu ada 152 kata, kebetulan waktu itu saya termasuk yang menyiapkan jadi saya hafal dan tahu banget," kata Pramono.

Cegah Korupsi

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB, Indrajaya, menilai, retreat kepala daerah bisa menjadi sarana untuk menyamakan visi pemerintah pusat dengan daerah, serta mencegah terjadinya praktik korupsi di daerah.

Legislator asal Dapil Papua Selatan itu mencatat, ada beberapa manfaat dari program retreat. Pertama, kegiatan



tersebut bisa digunakan untuk menyamakan visi-misi presiden dengan para kepala daerah. Presiden bisa menyampaikan visi dan misi lima tahun ke depan, sehingga para kepala daerah bisa menyamakan arah kepemimpinan dan pembangunan yang akan mereka lakukan dalam lima tahun mendatang di masing-masing daerah.

"Dalam melaksanakan program,

kepala daerah terpilih bisa menyesuaikan diri dengan visi-misi presiden. Jadi, antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak jalan sendiri-sendiri,” kata Indrajaya kepada wartawan, Senin, 13 Januari 2025.

Kedua, kegiatan retreat bisa digunakan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Hal itu sangat penting, karena banyak kepala daerah terpilih yang belum mempunyai pengalaman dalam memimpin daerah.

“Jadi perlu pembekalan kepemimpinan sebelum terjun ke masyarakat. Dari sisi kapasitas, mereka harus siap,” terangnya.

Sejak Pilkada digulirkan, mulai 2005-2018, terungkap sejumlah 348 kepala daerah hasil Pilkada terjerat korupsi. Selanjutnya, pada 2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis penambahan jumlah koruptor kepala daerah dalam kurun 2010-2019 menjadi 429 terpidana. Terupdate, pada medio 2021-2023, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap tambahan 61 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Dalam retreat, kata Indrajaya, Prabowo bisa menekankan pentingnya menjaga integritas dan menghindari korupsi, karena tindakan itu akan merusak ta-

semakin cinta tanah air, sehingga mau berjuang dan bekerja keras untuk memajukan daerah mereka masing-masing.

“Retreat perlu segera dilaksanakan. Waktunya masih cukup panjang sebelum pelantikan. Kami sangat mendukung ide Presiden Prabowo,” tegas Indrajaya.

Kental Militarisme

Pegiat demokrasi dan akademisi mengkritik rencana Prabowo Subianto yang bakal menyelenggarakan kegiatan retreat bagi para kepala daerah terpilih.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menilai kegiatan retreat bagi kepala daerah semakin menunjukkan kentalnya militerisme di dalam pemerintahan Prabowo. Ketimbang membekali kepala daerah dengan cara mengikuti retreat di Akademi Militer, Prabowo dapat menguji rasa nasionalis dan keselarasan visi dengan memantau langsung kerja kepala daerah di lapangan.

“Jangan karena latar belakang beliau militer, semua harus dijalankan dengan gaya militer juga,” kata Isnur, Senin, 13 Januari 2025.

Pengajar Hukum Tata Negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, sependapat dengan Isnur. Ia mengatakan rencana Prabowo untuk menyelenggarakan retreat bagi kepala daerah semakin menunjukkan kentalnya nuansa militer di dalam pemerintahan. Apalagi, kegiatan retreat yang dilakukan Prabowo sebelumnya bersama jajaran Kabinet Merah Putih cenderung mengedepankan aspek fisik, ketimbang pemikiran untuk membekali jajarannya.

“Ini juga tidak ada kewajibannya untuk dilakukan,” kata Herdiansyah.

Alih-alih menyeleraskan visi dan misi, Herdiansyah menilai, kegiatan retreat bagi kepala daerah menjadi upaya Prabowo untuk menundukkan pemimpin daerah dalam pemerintahannya. Apalagi, tidak semua kepala daerah terpilih berasal dari koalisi yang sama dengan Prabowo.

Padahal, menurut dia, untuk menyelaraskan visi dan misi tidak perlu dilakukan retreat. Sebab, kewenangan antar pemerintah pusat dan daerah telah memiliki regulasinya masing-masing. ●



Ketiga, retreat bisa dimanfaatkan untuk meneguhkan integritas mereka dalam memimpin. Peningkatan integritas bisa mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah. Selama ini, banyak kepala daerah yang terseret kasus korupsi. Baik terjaring operasi tangkap tangan (OTT) atau pengembangan kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum.

tanan pemerintahan dan merugikan masyarakat.

“Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen mencegah dan memberantas korupsi. Semua kepala daerah harus mendukung dan meniru komitmen Pak Prabowo,” terang Indrajaya.

Keempat, retreat bisa untuk menguatkan rasa nasionalisme dan patriotisme para kepala daerah. Diharapkan mereka



Resolusi AHY 2025

INTEGRASIKAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyatakan bahwa 2025 menjadi resolusi untuk mengintegrasikan pembangunan secara nasional.

Resolusi tidak hanya berlaku bagi generasi muda, tetapi juga menjadi fokus utama bagi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam mengoptimalkan koordinasi antarelelemen pembangunan nasional.

"Resolusi 2025, kita selalu bertanya apa resolusi 2025? Ini bukan hanya berlaku bagi anak-anak Gen Z yang selalu bertanya apa resolusinya. Biasanya kita ingin lebih baik, sudah pasti. Bagi Kemenko Infrastruktur, resolusi 2025 ini kami ingin semakin ketat koordinasi mengintegrasikan berbagai elemen penting pembangunan nasional," kata Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Rabu, 8 Januari 2025.

Hal itu ditekankan AHY saat membuka rapat terbatas bersama lima kementerian yang dibawahinya, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.

AHY menegaskan, keberhasilan pembangunan tergantung pada kerja sama yang lebih erat antara berbagai kementerian dan koordinasi yang lebih ketat dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Menurut dia, para menteri dan wakil

menteri di jajaran Kemenko Infra terus bekerja keras untuk menemukan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi selama ini, meskipun tidak selalu berada di lapangan.

AHY mengungkapkan selalu memantau perkembangan dan langkah-langkah yang diambil oleh para pejabat terkait untuk memastikan solusi yang tepat guna bagi pembangunan.

"Bisa dilihat oleh teman-teman wartawan sekalian, para menteri, para wamen

Dengan upaya tersebut, AHY berharap dapat menghadirkan hasil yang signifikan dalam menghadapi tantangan pembangunan di masa depan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

"Kami berupaya untuk segera, bukan hanya mengetahui permasalahan, tetapi segera mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang kita hadapi selama ini. Oleh karena itu, sekali lagi, resolusi 2025 kami semakin terintegrasi, semakin kompak, solid dan menghad-

dari para menteri termasuk juga para wakil menteri, para sekjen dan jajaran eselon 1, untuk menyamakan frekuensi sekaligus kita rekap tahun 2024 yang sudah kita lalui," kata AHY.

Dia menuturkan bahwa salah satu fokus pembahasan adalah bagaimana pembangunan infrastruktur dapat memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

"Ada outlook yang harus kita rumus-



ini juga terus bekerja keras. Saya tahu, saya mengikuti, walaupun tidak setiap saat bersama-sama di lapangan, tapi saya mengikuti sepak terjang (mereka)," ujar AHY.

AHY menambahkan, resolusi 2025 sebagai momentum menciptakan koordinasi yang lebih solid, kompak, dan terintegrasi, agar dapat memberikan solusi terbaik bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

irkan solusi terbaik untuk masyarakat dan berbagai tantangan bangsa kita ke depan," kata AHY.

Adapun dalam pertemuan dengan lima Kementerian di bawah Kemenko Infra, AHY menyatakan pentingnya mendengarkan paparan dari menteri, wakil menteri, serta para pejabat eselon 1 untuk menyamakan visi dan merumuskan kebijakan yang tepat untuk 2025.

"Saya ingin mendengarkan paparan

kan bersama untuk 2025, yang jelas kita ingin pembangunan infrastruktur bisa semakin berdampak, tepat sasaran untuk berkontribusi secara signifikan pada pertumbuhan ekonomi sekaligus juga kesejahteraan masyarakat," ucapnya.

Selain kebijakan besar, AHY juga menekankan pentingnya pembahasan infrastruktur dasar yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Dia juga menga-

• INFO NASIONAL

takan bahwa rapat yang akan dilaksanakan tersebut juga akan mengevaluasi 100 hari masa kerja.

"Nanti akan kita bahas beberapa hal strategis tapi juga ada yang mungkin teknis, tapi bernilai strategis yang perlu kita bahas. Karena infrastruktur itu spektrumnya luas bukan hanya yang sifatnya

yang membutuhkan sumber daya yang optimal.

Oleh karena itu, AHY berharap dengan rapat yang akan dilaksanakan semua kebijakan yang dirumuskan dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan infrastruktur Indonesia.



besar ataupun yang megah, tetapi juga banyak infrastruktur dasar yang langsung menyentuh hajat hidup orang banyak. Kita ingin itu semua mendapatkan prioritas," tambahnya.

Menurutnya, tantangan anggaran dan pendanaan menjadi pembahasan penting karena selalu ada keterbatasan dalam merencanakan program prioritas

"Kita tahu di masa awal tahun ini kita juga semua masih menentukan program-program yang harus diutamakan karena selalu dihadapkan pada budget constraints selalu ada limitasi dalam hal anggaran, pendanaan dan itu semua juga harus kita pikirkan dengan baik," kata AHY.

AHY juga memastikan menghadirkan

infrastruktur yang adaptif dan tangguh untuk menghadapi dampak bencana alam, seperti gempa, termasuk Megatrast, apalagi Indonesia terletak di cincin api pasifik. Menurutnya, Indonesia adalah negara yang rentan terhadap berbagai bencana alam seperti gempa yang tentu dapat mempengaruhi infrastruktur.

"Infrastruktur harus responsif, harus adaptif dan kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang juga rentan terhadap berbagai bencana alam, kita berada di rings of fire inilah sekaligus karunia, tapi juga sekaligus takdir yang kita harus benar-benar bersiap," kata AHY.

la menuturkan bahwa kesiapan infrastruktur menjadi hal yang sangat pent-



Saya tahu, saya mengikuti, walaupun tidak setiap saat bersama-sama di lapangan, tapi saya mengikuti sepak terjang (mereka).

ing untuk memastikan keberlanjutan pembangunan, mengingat sering kali terjadi bencana yang merusak berbagai sektor kehidupan masyarakat.

AHY menegaskan bahwa Pemerintah akan terus berupaya membangun infrastruktur yang lebih maju di seluruh daerah, namun tetap siap menghadapi ancaman bencana alam yang tak terduga.

"Kami juga berupaya dalam beberapa kesempatan yang lalu, kami juga berdiskusi ketika kita berusaha membangun infrastruktur di berbagai daerah agar lebih maju," ucapnya.

Dia mengatakan, tak jarang terdapat bangunan infrastruktur, baik milik pribadi maupun negara, hancur akibat bencana alam, yang memerlukan pemulihan dan perbaikan segera setelah bencana ter-

jadi.

"Di saat yang bersamaan juga selalu ada mudah-mudahan tidak selalu ada, tetapi sering kali, acap kali kita juga kehilangan infrastruktur, hancurnya infrastruktur, baik itu milik pribadi maupun milik negara yang diakibatkan oleh bencana alam," lanjut AHY.

Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen akan menghadirkan inovasi teknologi untuk menciptakan infrastruktur yang lebih responsif dan lebih cepat

gunakan nasional. Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditargetkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, maka membutuhkan dukungan infrastruktur yang tepat sasaran.

Infrastruktur yang dimaksud mencakup berbagai sektor, termasuk bendungan dan jaringan irigasi yang dapat mendukung sektor pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional hingga mewujudkan swasembada pan-

masih ada sekitar 10 juta keluarga yang belum memiliki rumah dan lebih dari 20 juta rumah yang tidak layak huni.

"Ini bisa kita carikan solusinya agar baik masyarakat, kota maupun desa juga bisa hidup layak dan lebih sehat," tutur AHY.

Kemudian, pembangunan kawasan transmigrasi di berbagai daerah diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat



pulih pasca bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

"Kami juga berupaya untuk terus menghadirkan terobosan inovasi yang juga menghadirkan teknologi yang semakin responsif terhadap berbagai ancaman dan tantangan alam," terangnya.

Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Ekonomi

Menurut AHY, pertumbuhan ekonomi juga diupayakan melalui pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat pamban-

gan.

"Lalu bagaimana sektor perhubungan transportasi darat, laut, udara, perkotaan, bisa mempermudah mobilitas manusia, barang dan jasa, menurunkan cost of logistics," terang AHY.

AHY juga menekankan perlunya tata ruang dan pengelolaan lahan yang baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan nilai ekonomi di berbagai daerah.

Selanjutnya, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman juga menjadi perhatian utama, mengingat

setempat.

AHY menambahkan, kawasan transmigrasi yang sudah ada harus terus direvitalisasi untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut. Pihaknya mendorong pembangunan infrastruktur yang merata dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

"Termasuk juga bagaimana kita ingin menghadirkan pusat-pusat kawasan transmigrasi ideal. Yang ini menjadi pilot project dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan," kata AHY. •



CIPTAKAN EKONOMI BARU KAWASAN TRANSMIGRASI

Kementerian Transmigrasi menjajaki berbagai skema kerja sama alternatif untuk mewujudkan industrialisasi di kawasan transmigrasi.

Hal tersebut sejalan dengan upaya transformasi untuk mengembangkan industri berskala besar di kawasan transmigrasi.

Menteri Transmigrasi, M Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyatakan, pihaknya ingin mendapat masukan dari Kementerian Keuangan terkait berbagai model kerja sama dengan pihak ketiga yang saling menguntungkan dan dapat dimanfaatkan untuk membiayai program-program Kementerian Transmigrasi.

Hal tersebut karena skema Badan Layanan Umum (BLU) dan skema Badan Milik Negara (BMN) yang selama ini diterapkan masih belum cukup memadai.

Menurut Iftitah, transmigran sudah memiliki modal usaha berupa lahan serta tenaga kerja. Kini, hal yang mereka butuhkan adalah wawasan dan pandangan terkait bentuk-bentuk badan usaha yang dapat mereka bangun. Salah satunya koperasi dan korporasi.

"(Para transmigran) tinggal diberikan redefinisi berupa pelatihan dan wawasan untuk menciptakan ekonomi baru di kawasan transmigrasi," ujar Iftitah di Jakarta, Jumat, 10 Januari 2025.

Dia menuturkan, skema kerja sama tersebut dibutuhkan agar menarik bagi investor serta menguntungkan bagi warga transmigran dan penduduk sekitar. Jumlah investasi yang besar dibutuhkan untuk meningkatkan skala ekonomi dan daya saing kawasan transmigrasi. Salah satunya melalui pengembangan agroindustri, agrowisata, dan infrastruktur.

Skema kerja sama usaha tersebut juga diharapkan dapat menjaga agar lahan-lahan transmigrasi yang telah disediakan oleh pemerintah tidak dialihfungsikan oleh pemiliknya.

Dia juga berharap hasil kerja sama tersebut dapat membiayai program-program Kementerian secara akuntabel dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, pihaknya tidak perlu meminta alokasi anggaran yang besar dari APBN.

Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Keuangan pun sepakat untuk bertemu lagi guna mematangkan skema alternatif pembangunan kawasan transmigrasi serta regulasinya.

Di sisi lain, pemerintah juga berencana mengirim alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ke daerah transmigrasi. Ifitah mengatakan, rencana itu masih dalam rancangan. Para alumni LPDP akan dikirim ke daerah transmigrasi untuk menunaikan kewajiban 2n+1, yakni alumni yang telah menyelesaikan studi wajib berkontribusi dan berada secara fisik di Indonesia, sekurang-kurangnya dua kali masa studi ditambah satu tahun.

"Kami sedang merancang untuk menggarap alumni-alumni LPDP yang memiliki kewajiban 2n+1. Nah, jadi lulusan-lulusan LPDP itu akan kami kirimkan ke daerah transmigrasi," ujar Ifitah usai penandatanganan MoU dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis, 9 Januari 2025.

Sementara merancang aturan, Kementerian Transmigrasi akan merekrut transmigran reguler.

"Kami berharap orang-orang yang dikirim ke daerah transmigrasi orang-orang yang terdidik dan terlatih," kata Ifitah.

Adapun Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Pertanian juga bekerja sama membangun klaster pertanian modern di daerah-daerah transmigrasi. Rencana ini melibatkan stakeholders lain seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

"Membangun episentrum ekonomi baru di desa, yaitu klaster pertanian modern, transformasi dari pertanian tradisional menuju modern," kata Amran.

Kementan akan menyiapkan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk para transmigran yang membantu cetak sawah. "Kami menyiapkan alsintan sehingga masyarakat, terutama para transmigran, lebih sejahtera dibanding sebelum meninggalkan kampung halamannya," kata Amran.

Sementara itu, Kementerian Transmi-

grasi menyiapkan sekitar 100.000 transmigran untuk membantu cetak sawah lima tahun ke depan. Pemerintah memiliki program optimasi lahan dan cetak sawah untuk mencapai swasembada pangan. Target dari cetak sawah dan optimasi lahan adalah terciptanya 2,4 juta hektare lahan baru dalam lima tahun ke depan. Rinciannya, intensifikasi (optimasi lahan) 1 juta hektare dan ekstensifikasi (cetak sawah) 1,3 juta hektare.

Pusat Ekonomi Baru

Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, menyatakan, kementerian-kementerian di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersinergi untuk terus mengembangkan kawasan transmigrasi menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Viva mengatakan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendorong agar area transmigrasi yang berada di berbagai provinsi terus dibangun dan direvitalisasi.

"Mas AHY juga ingin menghadirkan pusat-pusat kawasan transmigrasi ideal yang selanjutnya menjadi pilot project dari Kemenko IPK," ujar Viva Yoga di Jakarta, Kamis, 9 Januari 2025.

Viva menuturkan, berbagai kementerian teknis di bawah Kemenko IPK,

yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Transmigrasi, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), sepakat untuk mengintegrasikan program kerja untuk merealisasikan hal tersebut.

"Integrasi program kerja antarkementerian merupakan langkah yang tepat agar pembangunan di kawasan transmigrasi menjadi lebih efektif dan efisien, termasuk dalam segi anggaran," ujarnya.

Viva menyatakan, dengan begitu, masing-masing kementerian teknis terkait memiliki fungsi dan tugas masing-masing yang jelas dalam mewujudkan pembangunan yang terintegrasi di kawasan transmigrasi.

"Dengan pola demikian, kelak bila ada masalah, misalnya soal tanah, bisa kita selesaikan dengan cepat dengan Kementerian ATR/BPN," katanya lagi.

Melalui integrasi dan sinkronisasi program kerja, Viva berharap program transmigrasi yang merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional akan berjalan dengan lebih baik. Apalagi didukung dengan anggaran dari seluruh kementerian terkait.

"Dalam rapat koordinasi kami juga menyisir program-program kerja kementerian teknis agar tidak tumpang tindih," ujarnya. •



KADO TAHUN BARU PARA PAHLAWAN DEVISA

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan memberikan dana Rp45 triliun untuk membantu mengatasi masalah pekerja migran Indonesia, terutama biaya pemberangkatan, pelatihan dan pemberdayaan.

Dana tersebut akan dikeluarkan secara bertahap sebanyak tiga kali selama 5 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo, dengan nilai masing-masing penyaluran adalah Rp15 triliun.

Menurut Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, dana itu akan digunakan oleh Kementerian P2MI untuk membantu pekerja migran kemungkinan dalam bentuk pinjaman dengan bunga yang sangat rendah yang salah satunya adalah untuk pemberangkatan dan pelatihan bagi para "Pahlawan Devisa".

"Karena masalah utama selama ini adalah masalah pembiayaan akses pekerja migran Indonesia terhadap pembiayaan, terutama untuk cost structure pemberangkatan. Yang kedua untuk pelatihan dan mungkin juga pemberdayaan," kata Karding di Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.

Karding menyampaikan rencana untuk membentuk Badan Lay-

anan Umum (BLU) untuk mengelola dana tersebut secara profesional, sehingga dana tersebut betul-betul dapat membantu PMI secara optimal. Tujuan dari bantuan tersebut pada akhirnya adalah untuk memperkuat perlindungan bagi PMI, sekaligus untuk meningkatkan devisa negara.

"Dengan anggaran ini memang kami katakan untuk memperkuat perlindungan," ujarnya.

Upaya itu juga dilakukan mengingat data yang menunjukkan bahwa hampir seluruh atau hingga 95 persen pekerja migran yang terkena masalah di luar negeri, baik akibat eksploitasi, pengenaan biaya berlebihan, perlakuan tidak

adil, dan lain-lain adalah mereka yang berangkat ke luar negeri secara non-prosedural atau mereka yang tidak memiliki keterampilan cukup.

Untuk itu, Karding menilai solusi yang tepat untuk permasalahan itu adalah dengan terus meningkatkan jumlah pekerja migran yang bekerja ke luar negeri secara prosedural.

Dalam upaya itu, Kementerian P2MI juga akan memanfaatkan dana tersebut untuk meningkatkan keterampilan para PMI, terutama keterampilan berbahasa.

Karding juga berencana menggulirkan program yang berkelanjutan untuk PMI purna atau mantan pekerja migran Indonesia.

"Tugas KP2MI adalah mengurus PMI, mulai sebelum berangkat, selama bekerja, dan setelah pulang pun masih kita urus, plus keluarganya. Nanti purna PMI akan kita sentuh dengan banyak program pemberdayaan, salah satunya kegiatan usaha," katanya.

Karding mengaku akan melakukan diskusi dengan Dinas Tenaga Kerja di daerah untuk memetakan jenis usaha yang sesuai dengan purna PMI.

"Nanti kita bantu cara menjual yang baik, manajemen yang baik, akses permodalan dengan bunga yang rendah. Kita akan carikan akses modal. Kita sudah sepakat dengan Kementerian Perekonomian dan UKM untuk disiapkan skema KUR maksimum Rp100 juta dengan bunga 6 persen setahun," kata dia.

Karding menyebutkan bahwa kementerian-



nya akan membuat program-program yang sifatnya berkelanjutan untuk purna PMI.

"Kepala desa dapat mendata siapa saja warganya yang akan mau usaha. Semua yang akan berangkat kerja ke luar negeri juga harus diketahui kepala desa. Jadi, harus prosedural, kita akan ikutkan pelatihan," katanya.

Karding mengungkapkan, Kementerian P2MI juga berencana membangun 100 balai vokasi untuk meningkatkan keterampilan dan mendorong pekerja migran agar lebih siap menghadapi peluang kerja di luar negeri. 100 balai vokasi tersebut akan dibangun secara bertahap, dengan 30 di antaranya akan dibangun di tahap pertama dan akan ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.

Dalam rencana pembangunan itu, Kementerian P2MI mengharapkan peran serta pihak swasta untuk mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Hal tersebut dilakukan guna melengkapi keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan, dengan tujuan memfokuskan persiapan sumber daya manusia yang akan bekerja di luar negeri.

Karding menjelaskan, kerja sama tersebut melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti-saintek). Melalui kerja sama itu, sekolah kejuruan, seperti SMK dan sekolah perawat, serta sekolah vokasi di perguruan tinggi, diharapkan dapat berkolaborasi dengan Kementerian P2MI, sehingga permintaan kerja (job order) dari luar negeri dapat langsung terhubung dengan lembaga terkait.

Karding berharap melalui kerja sama tersebut, LPK dan BLK yang ada dapat melakukan persiapan lebih awal, terutama dalam meningkatkan kemampuan bahasa dan keterampilan lainnya bagi para pekerja migran yang akan ditempatkan. Dengan demikian, penyaluran tenaga kerja migran diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di luar negeri.

"Kami meyakini kalau ini bisa kita konsolidasi, maka akan banyak tenaga kerja terampil, minimal terampil, yang bisa kita kirim ke sana," kata Karding.

Di sisi lain, Kementerian P2MI menar-

getkan pengiriman 425 ribu pekerja migran bekerja ke luar negeri pada 2025 yang diharapkan dapat mendorong perekonomian Indonesia sebesar 0,52 persen dengan kemungkinan capaian devisa hingga lebih dari Rp300 triliun.

Karding menyampaikan, target tersebut setelah pada 2024 kementerannya, yang sebelumnya merupakan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), mencatat pengiriman sebanyak 297 ribu PMI ke luar negeri, den-

di pasar luar negeri yang menyediakan 1,35 juta peluang kerja.

Untuk itu, pada tahun ini, Kementerian P2MI menambah target pengiriman PMI agar dapat memanfaatkan peluang kerja yang ada secara optimal, sehingga dapat semakin mendorong perekonomian nasional. Untuk mendorong target pengiriman PMI, sejumlah upaya akan dipersiapkan, termasuk peningkatan keterampilan bahasa dari para pekerja migran.



gan dampak perolehan devisa sebesar Rp251 triliun dan mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 0,36 persen.

Selain itu, realisasi pengiriman PMI pada 2024 tersebut juga membantu menurunkan angka pengangguran sebesar 3,98 persen dari total 7,47 juta pengangguran yang tercatat pada 2024. Realisasi tersebut sebenarnya belum memenuhi permintaan pekerja

"Kemarin juga di ratas kami usulkan agar terutama Bahasa Inggris itu menjadi bahasa nomor dua setelah bahasa Indonesia dan akan diusulkan untuk mulai dipelajari sejak sekolah dasar. Dengan harapan ketika mereka selesai SMP atau SMA, mereka sudah fluent atau lancar berbahasa Inggris, sehingga kita lebih kompetitif dibanding Filipina," katanya. •

TARGET AMBISIUS SWASEMBADA PANGAN

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target swasembada pangan pascapelantikan pada Oktober 2024. Swasembada pangan adalah program prioritas yang harus dicapai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Target ambisius ini dipatok dapat terealisasi dalam 4-5 tahun mendatang.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menargetkan produksi padi nasional mencapai 32 juta ton pada 2025 untuk mendukung ketahanan dan swasembada pangan yang ditargetkan Prabowo dapat tercapai di 2027. Target produksi padi tahun ini meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 30 juta ton.

"Dengan kolaborasi seperti ini, target produksi nasional dari 30 juta ton menjadi 32 juta ton pada 2025, saya yakin akan tercapai," kata Mentan di sela kunjungan kerja di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa, 7 Januari 2025.

Amran juga menjelaskan, pemerintah mengalokasikan Rp12 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur jaringan irigasi pertanian sebagai upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian, sehingga dapat mewujudkan kedaulatan pangan.

"Bapak Presiden setuju irigasi tersier, primer, dan sekunder untuk 2 juta hektare bersama Kementerian PU, anggarannya Rp12 triliun untuk seluruh Indonesia," kata Amran.

Amran menuturkan, melalui In-

struksi Presiden (Inpres), Pemerintah mendukung perbaikan sistem irigasi nasional. Oleh karena itu, Mentan menyampaikan penghargaan luar biasa kepada Presiden Prabowo yang telah memberikan kebijakan krusial untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur irigasi.

Menurut dia, perbaikan saluran irigasi untuk penyediaan air bagi pertanaman padi dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) sekaligus produktivitas padi. Pembenahan sistem irigasi pertanian menjadi tanggung jawab seluruh pemerintah di setiap tingkatan-

untuk mengairi lahan pertanian yang telah dipetakan baik di wilayah Pulau Jawa maupun luar pulau tersebut.

Tak hanya itu, Amran juga menyebutkan bahwa bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) telah disiapkan untuk tahun ini yang mencapai kurang lebih senilai Rp10 triliun guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian, sehingga mewujudkan swasembada pangan.

Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengadaan berbagai jenis alsintan, termasuk traktor roda 4, traktor roda 2, combine harvester, rice



nya, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

"Kabupaten bisa melaksanakan, provinsi bisa melaksanakan, pusat juga bisa melaksanakan, sehingga kita betul-betul produktif," kata Amran.

Sebelumnya, Amran menggandeng Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, serta Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Letjen TNI Tandyo Budi R, bersinergi untuk mewujudkan swasembada pangan melalui pembangunan jaringan irigasi pertanian.

Dody Hanggodo pun mengaku siap mendukung Kementerian Pertanian di sektor pembangunan jaringan irigasi

transplanter, dan pompa air. Semua pengadaan ini untuk mendukung pertanian Indonesia.

Meskipun anggaran sudah disebutkan, Mentan belum merinci jumlah pasti alsintan yang akan disiapkan dengan anggaran Rp10 triliun tersebut. Namun, alokasi ini akan mencakup seluruh Indonesia.

Amran menegaskan, Prabowo Subianto memberikan perhatian besar kepada sektor pertanian melalui dukungan terhadap kebijakan yang berpihak kepada petani, termasuk dalam penyederhanaan skema penebusan pupuk subsidi dan alokasi yang lebih terencana.

Mentan mengatakan bahwa Pemerintah mencatat sejarah baru dengan keberhasilan menyalurkan pupuk bersubsidi tepat waktu pada 1 Januari 2025. Dia mengatakan antusiasme petani di seluruh Indonesia begitu tinggi, menyambut kebijakan yang selama ini dinanti-nantikan. Penyaluran yang biasanya mengalami keterlambatan dan berbagai kendala, kini berhasil berjalan sesuai jadwal.

"Keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen dan perhatian besar Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pertanian," ujarnya.

Menurutnya, penyaluran pupuk bersubsidi yang tepat waktu ini menjadi tonggak penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian nasional guna mewujudkan swasembada pangan. Pada 2025, skema penyesuaian pupuk subsidi telah disederhanakan untuk memastikan distribusi lebih efisien dan transparan.

Berdasarkan Keputusan Men-



teri Pertanian RI Nomor 644/KPTS/SR.310/M.11/2024, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,5 juta ton. Alokasi tersebut terbagi menjadi urea 4,6 juta ton, NPK 4,2 juta ton, NPK Kakao 147.000 ton dan organik 500.000 ton.

Penyaluran pupuk subsidi ini dipe-runtukkan bagi petani di subsektor tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), serta perkebunan (tebu rakyat, kakao, kopi). Luas lahan yang mendapatkan alokasi pupuk subsidi maksimal 2 hektare, termasuk petani yang tergabung dalam Lem-

baga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau Perhutanan Sosial.

"Mulai 1 Januari 2025, petani di seluruh Indonesia sudah dapat menebus pupuk subsidi dengan harga terjangkau di kios-kios resmi. Data dari PT Pupuk Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam penyerapan pupuk pada masa tanam kali ini," tuturnya.

Pemerintah optimistis dengan distribusi yang lebih tepat sasaran dan penyaluran yang tepat waktu, produktivitas pertanian nasional akan meningkat secara signifikan.

"Ini bukan hanya tentang pupuk, tetapi tentang masa depan ketahanan pangan Indonesia. Dengan pupuk yang tersedia tepat waktu, petani dapat memulai musim tanam dengan keyakinan penuh," terang Amran.

Swasembada Jagung

Amran Sulaiman juga mendiskusi-



kan program tanam jagung bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sehingga bisa mewujudkan swasembada komoditas pangan tersebut.

Dia mengaku bahwa meski pertemuan dirinya dengan Kapolri tidak direncanakan, namun kedua tokoh ini memang sedang mempersiapkan rencana program tanam jagung serentak yang melibatkan anggota Polri.

"Pertemuan ini berlangsung dalam suasana santai, namun tetap fokus pada upaya mempercepat pencapaian swasembada jagung nasional," ucapnya, Minggu, 12 Januari 2025.

Dia menuturkan bahwa program

tanam jagung serentak dirancang untuk memanfaatkan lahan perkebunan dan lahan kering di berbagai wilayah Indonesia, dengan target total tanam mencapai 1,7 juta hektare. Dari lahan tersebut, diharapkan dapat menghasilkan tambahan produksi sebesar 4 juta ton, atau meningkat 25 persen dari kondisi saat ini.

Mentan menyebutkan bahwa beberapa provinsi di Indonesia yang dinilai strategis untuk pengembangan komoditas jagung seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung dan Jawa Tengah menjadi prioritas pelaksanaan.

Selain fokus pada produksi, program ini juga akan memperhatikan dukungan infrastruktur seperti ketersediaan benih unggul, irigasi dan sarana produksi lainnya.

Menurut dia, Polri, sebagai mitra strategis, berperan penting dalam me-

astikan distribusi sarana produksi dan pelaksanaan program berjalan dengan lancar, terutama di wilayah-wilayah sentra produksi.

"Program ini merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mendorong kemandirian petani," tuturnya.

Amran optimistis dengan sinergi yang kuat antara Kementan, Polri dan seluruh pemangku kepentingan, swasembada jagung dapat tercapai, sekaligus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi nasional. ●

BANGUN DESA WUJUDKAN ASTA CITA

Indonesia tengah memasuki fase pembangunan desa yang fokus pada pemberdayaan desa, perbaikan gizi, dan ketahanan pangan. Tentunya, ini merupakan momen untuk menjadikan desa sebagai motor kesejahteraan nasional.

Pemerintah menggelar peringatan Hari Desa Nasional di Desa Cibereum Kulon, Sumedang Jawa Barat, Rabu, 15 Januari 2025. Peringatan level nasional ini dirangkaikan dengan Festival Rakyat bertajuk "Bangun Desa, Bangun Negeri".

Menteri Desa dan Pembangunan

dan maju," kata Yandri dalam Kick Off Peringatan Hari Desa di Jakarta, Selasa, 14 Januari 2025.

Dia menyampaikan, desa harus bergerak lebih maju karena desa memiliki peran penting dalam pembangunan Indonesia, sebagaimana Astacita keenam Presiden Prabowo Subianto. Dalam Astacita itu disebutkan, Prabowo memiliki misi membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Yandri pun telah menyampaikan bahwa 73 persen penduduk Indonesia berada di desa-desa. Dengan demikian, apabila tidak ada usaha pemajuan ataupun pembangunan desa, hal tersebut berarti tidak ada pula pembangunan untuk Indonesia.

"Hampir 73 persen penduduk Indonesia di desa. Kalau kita tidak mengu-

meliputi revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), desa swasembada dan ketahanan pangan, desa swasembada energi dan air, serta hilirisasi produk unggulan desa. Berikutnya adalah pengembangan desa ekspor, pemuda dan pemudi pelopor desa, serta sinkronisasi dan konsolidasi program kementerian/lembaga masuk desa.

Terkait dengan sinkronisasi dan konsolidasi itu, Yandri mengatakan hal tersebut merupakan wujud kolaborasi antara Kemendes PDT dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait, seperti dengan Kementerian Koordinator Pangan dalam mewujudkan desa swasembada pangan.

"Ini tadi yang kami sebutkan tadi adalah kolaborasi yang luar biasa," ujar dia.

Selanjutnya, rencana aksi yang ke-delapan adalah digitalisasi desa dan pengembangan desa wisata. Lalu, yang kesembilan adalah peningkatan investasi desa serta kerja sama dengan kooperasi nasional dan investor dari luar negeri.

"Kemudian yang ke-10, penguatan pengawasan dan tata kelola pengembangan desa," kata Yandri.

Terkait dengan pengawasan tersebut, Kemendes PDT menggandeng Kapolri, Panglima TNI, dan Kejaksaan Agung guna memastikan dana desa digunakan untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat desa di seluruh Indonesia. Lalu, rencana aksi yang kesebelas dan dua belas adalah berkenaan dengan desa berketahanan iklim dan pengembangan desa tangguh bencana serta percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Yandri juga mengimbau seluruh kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, agar dapat mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal di desa dalam menuntaskan masalah pembangunan.

Menurutnya, SDM lokal merupa-



Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengatakan, peringatan Hari Desa setiap 15 Januari merupakan momentum untuk memastikan desa-desa terus bergerak lebih maju.

"Penting kita untuk memastikan bahwa desa-desa di Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih benar

rus desa, berarti kita tidak mengurus Indonesia. Maka tagline kami, 'Membangun Desa, Membangun Indonesia. Desa Terdepan untuk Indonesia'," ucap Yandri.

Untuk mewujudkan Astacita keenam itu, Kemendes PDT pun menghadirkan 12 rencana aksi yang

kan aset yang tak tergantikan, sebab mereka lah yang memahami betul terkait kebutuhan, potensi, dan tantangan yang ada di wilayahnya. Optimalisasi SDM desa ini dilakukan untuk mencegah terjadinya urbanisasi, sebagaimana yang terjadi di negara Jepang dan Korea Selatan.

Jika hal itu terjadi, maka akan menimbulkan masalah lain yang lebih berat, salah satunya demografi penduduk yang tak seimbang.

"Desa di Jepang itu kosong, jangan sampai terjadi di Indonesia. Ada 93 persen penduduknya ke kota, termasuk di Korea Selatan, 83 persen penduduknya bergerak ke kota. Kita ingin menyetop atau menghambat laju urbanisasi itu dengan memajukan desa-desa di Indonesia," ujar mantan Wakil Ketua MPR ini.

"Inti pokoknya, kita ingin pembangunan itu ada di desa. Kita ingin desa kita ini diperhatikan. Kalau pembangunan banyak di desa, pemuda pelopor desa dilibatkan, maka saya haqqul yakin desa akan maju dengan pesat," imbuh Yandri.

Prioritas Dana Desa

Menteri Yandri meminta pemerintah daerah dapat memperhatikan penggunaan Dana Desa agar benar-benar diprioritaskan untuk hal-hal yang telah diarahkan pemerintah pusat.

Prioritas penggunaan Dana Desa telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2025. Pada tahun ini, pemerintah menetapkan dana desa sebesar Rp71 triliun.

Pertama, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem. Apabila di desa terkait tidak ada kemiskinan ekstrem, penggunaan Dana Desa pada poin pertama itu akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis. Kedua, Dana Desa 2025 juga diutamakan untuk mendukung penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim.

"Tentu sekarang kita juga kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Kami tahu di desa sekarang banyak darurat sampah dan lain sebagainya. Kita harus melakukan

pendekatan secara serius," ujar Yandri saat menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Pendopo Kantor Gubernur Banten, Jumat, 10 Januari 2024.

Ketiga, pemanfaatan Dana Desa 2025 juga diperuntukkan bagi peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala dasar, termasuk penanganan stunting. Kemudian, penggunaan Dana Desa 2025 juga diutamakan untuk mendukung program ketahanan pangan. Permendes 2/2024 mengamanatkan minimal 20 persen Dana Desa wajib

digunakan untuk ketahanan pangan demi mewujudkan swasembada pangan.

"Kami sudah mencantumkan di Pasal 7 ayat (4) Permendes 2/2024 bahwa penggunaan Dana Desa sekurang-kurangnya 20 persen. Jadi, lebih boleh," kata Yandri.

Selanjutnya, Dana Desa 2025 juga diutamakan untuk mendukung pengembangan potensi dan keunggulan desa, percepatan implementasi desa digital, pembangunan berbasis padat karya tunai, hingga program sektor prioritas lainnya di desa. ●



GANDENG KAMPUS PIKIRKAN MASA DEPAN DESA

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menggandeng berbagai pihak dalam upaya percepatan pembangunan di kawasan perdesaan, termasuk perguruan tinggi. Salah satu kampus yang digandeng adalah Universitas Indonesia.

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, melakukan Pertemuan dengan Rektor Universitas Indonesia, Heri Hermansyah, beserta jajaran di Gedung Rektorat Universitas Indonesia, Depok, Senin, 13 Januari 2025.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas tentang Percepatan Pembangunan Perdesaan melalui Perguruan Tinggi.

Ariza mengatakan, keterlibatan dan partisipasi aktif perguruan tinggi sangat penting untuk mempercepat pembangunan di desa.

Menurutnya, Universitas Indonesia sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia harus dapat merumuskan pemikiran dan menjadi role model k a m p u s - kampus di Indonesia, sehingga dapat terlibat aktif dalam membangun desa.

"Bagaimana ke depan kita harus melibatkan

kan kampus di seluruh Indonesia untuk terlibat aktif membangun desa dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan desa. Kelebihan kampus tentu adalah sumber daya manusia dengan keahlian dan kepakarannya," ujar Ariza Patria.

Ariza mengatakan, dengan jumlah desa yang lebih dari 75 ribu, tentu sangat berat bagi Kementerian Desa PDT dalam melakukan pembangunan jika tidak berkolaborasi dengan pihak lain.

Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak, utamanya perguruan tinggi, akan mengeluarkan ide-ide dan solusi-solusi yang baru dalam mempercepat pembangunan di desa.

"Kita bagi tugas atau membagi beban untuk mikirin desa. Saya optimis jika ada dukungan dan sinergi ke depan akan membantu melakukan percepatan pembangunan desa," ujar Ariza Patria.

Sementara itu, Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah mengatakan, pihaknya akan mendukung program-program yang dilakukan pemerintah.

Menurut Heri, sebagai perguruan tinggi, pihaknya akan memberikan dukungan yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi, baik itu telah pemikiran, penelitian a t a u



pengabdian masyarakat.

"Universitas Indonesia akan mendukung semaksimal mungkin apa yang bisa dilakukan sebagai perguruan tinggi. Kita akan mendukung program yang akan dilakukan pemerintah," ujar Heri.

Sebagai informasi, Universitas Indonesia dan Kemendes PDT telah melakukan kerja sama dari 2020 dan akan berakhir pada Maret 2025. Kerja sama tersebut rencananya akan dilanjutkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan.

Pemuda Desa

Di sisi lain, Ariza juga mendorong para pemuda desa bersama pendamping desa mengambil banyak peran dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di antaranya dengan berinovasi memanfaatkan potensi desa sebagai bahan baku untuk memenuhi kebutuhan gizi generasi Indonesia yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah.

"Kami minta pemuda desa mengambil peran penting mengambil bagian penting dalam program tersebut. Potensi desa harus mampu dikelola dengan baik agar setiap desa dengan segala kelebihan mampu memberikan kontribusi," paparnya saat membuka acara Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa-Pendamping Desa secara daring.

Program makan bergizi gratis dilaksanakan serentak di Indonesia mulai 6 Januari 2025. Dalam merealisasikannya dibutuhkan banyak kontribusi berbagai pihak, khususnya desa, untuk menyuplai bahan baku sesuai standar gizi yang ditentukan pemerintah.

Hal ini menjadi momen penting bagi desa dalam memanfaatkan potensi sekaligus mendapatkan pemasukan untuk desa dalam satu waktu yang sama.

Tidak hanya itu, tenaga kerja di desa juga bisa diserap lebih banyak, sehingga perputaran ekonomi akan terjadi secara cepat dan bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan warga.

"Dana ini (anggaran untuk program makan bergizi gratis) akan mampu mengangkat perekonomian desa, maka setiap desa harus terlibat aktif mempersiapkan, menyuplai, memasok bahan baku program makan bergizi gratis nasional," tutur Ariza.

Ariza juga yakin masyarakat yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Desa dan pendamping desa adalah orang-orang

pilihan yang mampu mengambil momentum mewujudkan desa hingga level mandiri. Tidak terbatas pada itu, namun juga dibutuhkan kontribusi dan kerja sama antara pegiat desa lainnya serta masyarakat secara umum.

Dalam waktu dekat, Kementerian Desa PDT juga akan menyelesaikan modul desa tematik yang memudahkan dalam mengategorikan desa sesuai potensi untuk mendukung makan bergizi gratis ini.

Dengan demikian, maka program pembuka jalan mewujudkan Indonesia Emas 2045 tersebut akan mudah terealisasi berikut dengan semakin bertambahnya desa mandiri dan kesejahteraan warga.

bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan kesejahteraan masyarakat desa.

"Tidak hanya kebutuhan pangan yang pasti terpenuhi, Desa Tematik juga dapat meningkatkan kualitas SDM serta kesejahteraan masyarakat desa," katanya.

Sebagai contoh, desa yang memiliki potensi di bidang perikanan dapat mengembangkan program berbasis potensi tersebut hingga dikenal sebagai Desa Ikan. Langkah ini sejalan dengan prioritas pemanfaatan Dana Desa yang diatur dalam Permendes Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa 2025.



Menteri Desa PDT, Yandri Susanto, sebelumnya menyatakan, pihaknya akan meluncurkan Modul Desa Tematik pada 14 Januari 2025 di Subang, Jawa Barat, sebagai bagian dari perayaan Hari Desa yang diperingati setiap 15 Januari. Desa Tematik adalah konsep pengembangan desa dengan tema tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan budaya, serta menciptakan identitas desa yang kuat.

Program ini diharapkan berdampak positif pada berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang mendukung swasembada pangan di tingkat nasional.

Selain memenuhi kebutuhan pangan, Yandri menyebutkan Desa Tematik juga

Peraturan tersebut menekankan bahwa salah satu fokus penggunaan Dana Desa adalah untuk mengembangkan potensi lokal desa. Bahkan, Pasal 7 ayat (4) mengatur alokasi minimal 20 persen Dana Desa harus digunakan untuk program ketahanan pangan.

"Kita sudah mencantumkan di Pasal 7 ayat (4) Permendes 2/2024 bahwa penggunaan Dana Desa sekurang-kurangnya 20 persen. Jadi, lebih boleh," tambah Yandri.

Peluncuran Modul Desa Tematik ini menjadi bagian dari strategi besar Kemendes PDT untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan dan berdaya saing, sekaligus memastikan optimalisasi Dana Desa untuk kepentingan masyarakat desa. ●

MAKAN BERGIZI UNTUK LANSIA

Kementerian Sosial berkomitmen memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Salah satunya dilakukan Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, saat melakukan kunjungan ke Sidoarjo, Jawa Timur, pada Kamis, 9 Januari 2025.

Agus Jabo berkunjung ke kediaman dua lansia di Sidoarjo dan sempat berdialog serta memberikan bantuan. Agus mengunjungi rumah Mbarti (85) di Kelurahan Bulusidokare, Kecamatan Sidoarjo yang merupakan penerima manfaat permakanan lansia sejak 2023.

Saat ini, Mbarti tinggal sendiri di rumahnya yang tak layak huni. Adapun rumah anaknya hanya dipisahkan jalan kecil. Anak Mbarti, Umi Nadiroh (52) merupakan ibu rumah tangga dengan 5 anak yang berjualan ikan pepes kelil-

makanan dua kali sehari.

"Jadi kalau pemerintah sekarang sedang memulai program makan bergizi gratis, Kemensos sudah melaksanakan itu, tapi untuk lansia dan disabilitas," kata Agus Jabo.

Menurutnya, Kementerian Sosial juga memberikan bantuan lainnya. Adapun rinciannya antara lain sembako selama 5 hari, nutrisi, alat kebersihan diri, sandang, sarana, kamar, lemari, dan rak piring.

"Ada makanan-makanan bernutrisi, kemudian kita memberikan tempat tidur, supaya kasur nyampuh (nyaman),



ing. Sementara, menantunya hanya kuli batu yang saat ini kerap mengalami sakit lambung.

Cucu Mbarti kerap datang dan menginap untuk menemani neneknya. Sebelum menerima bantuan permakanan, anak Mbarti mengirimkan makanan untuk ibunya setiap hari. Agus Jabo memberikan bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) berupa permakanan lansia. Nantinya, Mbarti akan dikirimkan

tidurnya amblek, nyenyak," kata Agus Jabo.

Agus mengatakan Kemensos tak hanya memberikan bantuan untuk Mbarti, tapi juga anak Mbarti, Umi Nadiroh (52). Bantuan yang diberikan berupa ATENSI Kewirausahaan.

"Ini bisa menjadi usaha yang produktif. Karena memang programnya Kemensos sekarang ini adalah pemberdayaan. Jadi masyarakat tidak hanya menerima

bansos, menerima PKH ya, tapi juga bisa kemudian berdaya,” katanya.

Adapun bantuan dukungan keluarga wirausaha diberikan Kemensos melalui Sentra Margo Laras Pati. Bantuan yang diberikan antara lain bahan makanan dan peralatan kewirausahaan, etalase, dan magicom. Dukungan keluarga wirausaha lontong. Total bantuan sebesar Rp4.150.000. Menurutnya, agar masyarakat bisa berdaya maka harus memproduksi. Pekerja harus dicarikan lapangan pekerjaan.

“Yang ingin usaha kita bantu di unit usahanya. Sehingga masyarakat kita bisa mandiri, bisa graduasi,” katanya.

Agus Jabo memastikan Kemensos hadir sesuai perintah Presiden Prabowo yang berpesan agar rakyat bisa tersenyum. “Ini mau diperbaiki rumahnya nanti. Ini kan mau dikasih paling nggak ada lantai lah Pak. Lantai, ventilasi,” katanya.

Pada kesempatan terpisah, anak Mbarti, Umi mengatakan akan berjualan lontong untuk memulai wirausahanya. Ia akan berjualan di depan rumah ibunya. “Terima kasih Kemensos, Insya Allah bisa jualan sambil nunggu ibu,” katanya.

Agus Jabo juga mengunjungi rumah pemulung lansia, Abdul Malik (75), yang memiliki anak penyandang disabilitas rungu wicara, Siti Maulana (39), di Desa Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo. Dia mengajak Siti agar lebih berdaya dan mandiri melalui pelatihan yang diberikan Kementerian Sosial dan memberikan bantuan permakanan lansia untuk Malik.

Malik berjuang memenuhi kebutuhan hariannya dengan menjadi tukang becak dan memulung hingga dini hari. Seiring usia yang bertambah tua, penglihatan Malik mengalami penurunan meski telah tiga kali dioperasi.

Sementara itu, anak Malik, Siti Maulana hanya sendiri di rumah tanpa pintu saat ayahnya bekerja. Rumahnya, hanya dibangun dari kayu dan bambu.

“Pada hari ini kita menawarkan ke Pak Malik dan Mbak Siti untuk ikut pelatihan, jadi Kemensos di samping memberikan ATENSI permakanan, bantuan sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) kita juga melatih ya,” kata Agus Jabo.

Ia mengatakan pelatihan untuk kelompok disabilitas dan produktif merupakan hal baik yang diperlukan agar bisa beru-

saha dan mandiri. Ia pun mengajak Malik dan Siti untuk tinggal di Sentra Margo Laras Kemensos.

“Sentra itu instrumennya Kemensos yang ada di daerah, Mbak Siti mau untuk dilatih, dilatih wirausaha dan nanti bapaknya karena mereka tidak mau dipisah, mau ikut, diikutkan di Pati,” katanya.

Agus Jabo menuturkan perpindahan dan pelatihan keduanya akan diproses secepatnya agar ada perubahan kualitatif dalam kehidupan sehari-harinya. Karena itu, Kemensos hadir untuk mem-

bantuan alat kebersihan diri, bantuan sarana kamar.

Dia menjelaskan, Kemensos tak hanya memberikan bantuan PKH dan bantuan sosial, tapi juga melakukan program pemberdayaan lewat bantuan wirausaha.

“Kita membantu mengubah mindset mereka supaya tidak tergantung sama Bansos terus, supaya tidak tergantung sama PKH terus, supaya mereka bisa produktif,” katanya.

Agus Jabo juga meminta agar pemer-



berikan akses ke Sentra dalam rangka pembangunan kapasitas ya di kewirausahaan.

“Kita juga memberikan bantuan ATENSI. Ada permakanan, ada makanan, nutrisi, kasur, peralatan rumah tangga,” katanya.

Adapun rincian bantuannya antara lain bantuan permakanan dalam bentuk sembako selama 15 hari, bantuan nutrisi,

intah daerah memberikan tempat untuk Siti berwirausaha usai pelatihan di Sentra.

“Kemensos Sowen ke panjenengan (kamu) supaya panjanengan diurus oleh negara. Jadi, Kemensos selalu ada, negara selalu ada di tengah-tengah masyarakatnya yang membutuhkan, perintah Bapak Presiden Prabowo seperti itu,” katanya. ●

DIPLOMAT

Gunawan Effendi

Kepergian Dr Hasjim Djalal, diplomat terkemuka Indonesia yang aktif di Abad XX, layak mendapat catatan penting. Kepergian almarhum berada dalam konteks perubahan dan kesinambungan dalam politik luar negeri Indonesia di abad berikutnya. Hasjim Djalal wafat pada usia 90 tahun di Jakarta pada Minggu, 12 Januari petang dikelilingi oleh istri, anak, cucu serta kerabat dekatnya.

Usianya yang hampir menyentuh satu abad juga merupakan karunia yang memungkinkannya masih sempat menyaksikan 25 tahun pertama Abad XXI yang mengalami perubahan di samping kesinambungan masa Perang Dingin antara blok komunis dan non-komunis pasca Perang Dunia II. Alumni University of Virginia Amerika Serikat itu dikarunia tiga anak yakni Dino Patti Djalal, Iwan Djalal dan Dini Djalal.

Sejatinya Hasjim adalah ahli hukum, khususnya hukum laut. Ia tercatat sebagai salah satu diplomat Indonesia yang berperan dalam penyusunan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang disahkan pada 1982. Pada awal 80-an itu ia juga menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (1981-1983). Kemudian pada 1983-1985 ia mengemban amanah sebagai Duta Besar RI untuk Kanada dan pada 1990-1993 menjadi Duta Besar RI di Jerman.

Karirnya di Kementerian (dulu Departemen) Luar Negeri dimulai dengan memasuki pendidikan di Akademi Luar Negeri pada 1956. Selanjutnya ia terpilih sebagai penerima beasiswa dari pemerintah untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi di University Of Virginia, Amerika Serikat. Ia berhasil meraih gelar Master dan Doktor pada studi hukum internasional mengenai isu kelautan.

Jelas pendidikan yang menunjang karirnya sebagai diplomat. Latar belakang pendidikan sekaligus pengalaman yang kuat selama menjabat di Deplu, Hasjim Djalal memperkenalkan pemikirannya mengenai tantangan global yang semakin kompleks sekaligus memberikan kontribusi terhadap perkembangan diplomasi Indonesia dalam pergaulan global.

Pada 1964 Hasjim Djalal tercatat duduk sebagai Sekretaris II Bidang Politik di Kedutaan Besar RI di Beograd, Yugoslavia. Selanjutnya ia pindah ke kawasan Afrika di Guinea sekaligus mendapat kesempatan untuk mendalami kajian benua itu hingga diakui sebagai salah satu pakar Afrika di Kementerian Luar Negeri. Karier gemilangnya memuncak di tahun 1969 dengan menjadi Kepala Dinas Hukum Internasional dengan memberikan fokus terbaik untuk dirinya dalam menghadapi isu-isu hukum laut.

Jangan lupa pula Hasjim yang lahir pada 10 Februari 1934 di Ampang Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, per-

nah menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Luar Negeri pada 1985-1990. Dengan begitu ia adalah diplomat karir yang telah menempuh perjalanan dinas relatif lengkap di berbagai wilayah diplomasi. Termasuk kajian dan pengembangan kementerian ke depan. Lima tahun sebagai Kepala Litbang bukanlah waktu yang singkat di masa pasca Perang Dingin hingga pecahnya Uni Soviet dan bersatunya Jerman Barat dan Timur.

Saya juga mencatat Hasjim Djalal pernah aktif di Pusat Segitiga Terumbu Karang (Coral Triangle Center) yang mencakup lebih dari separuh kawasan kelautan dan perikanan Indonesia. Belakangan Amerika Serikat dan Indonesia menandatangani kesepakatan pengalihan utang (debt swap) yang melibatkan sejumlah organisasi konservasi pada 3 Juli

2024. Penandatanganan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengalihkan utang senilai 35 juta dolar AS menjadi investasi bagi konservasi terumbu karang Indonesia selama sembilan tahun ke depan.

Konservasi terumbu karang ini akan dilaksanakan di Bentang Laut Sunda yang memiliki 48 kawasan konservasi seluas 5,7 juta hektar yang dapat melindungi terumbu karang dengan potensi seluas 106.000 hektar. Lalu di area Banda yang memiliki 47 kawasan konservasi seluas 6,3 juta hektar

dan melindungi terumbu karang dengan potensi seluas 701.000 hektar. Lalu di area Kepala Burung yang memiliki 17 kawasan konservasi seluas 5,1 juta hektar yang melindungi terumbu karang seluas 253.000 hektar.

Nah, sebenarnya sejak lama saya menantikan memoar pribadi Hasjim Djalal sebagai diplomat karir dan kegiatannya pasca pensiun. Sejak menghadiri kuliah umumnya di Kampus Universitas Indonesia Depok pada pertengahan 1980-an. Terlebih keterampilan menulisnya pun di atas rata-rata diplomat Indonesia lainnya. Keterampilan yang sama tampaknya menurun kepada putra-putrinya Dino Patti dan Dini Djalal. Mungkin suatu saat putra-putrinya akan mengkompilasi perjalanan hidup ayahnya yang luar biasa dalam sebuah buku yang dapat memberi perspektif lebih lengkap tentang diplomat Indonesia di masa pasca Perang Dunia II hingga perubahan tatanan global yang ditandai oleh Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat mengubah dunia pada Abad XXI.

Dokumentasi tentang sepak-terjang diplomat Indonesia di pentas global agaknya bukan hal yang berlebihan mengingat perubahan yang begitu cepat dengan skala luas yang terjadi pada 25 tahun pertama Abad XXI. Selanjutnya paruh pertama Abad XXI.

Kali ini kita baru bisa berharap. Sambil melepas kepergian Hasjim Djalal dengan untai doa terbaik. ●





CATATAN AWAL PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Program makan bergizi gratis mulai bergulir sejak 6 Januari 2025. Terlalu dini mengemukakan penilaian (assessment) untuk program, kegiatan yang mencakup skala masal dengan rentang waktu relatif panjang dibandingkan misalnya sebuah proyek. Berikut catatan awal pelaksanaannya.



• INFO KHUSUS

Di hari-hari pertama penyelenggaraan program makan bergizi gratis, tentu beragam kisah muncul di berbagai lokasi, terutama sekolah, tempat program itu mengambil tempat pelaksanaannya. Saat meninjau pelaksanaan program makan siang gratis bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Sumatera Selatan, Adrianus Amri, di SMP Negeri 19 Palembang, para pelajar terlihat antusias.

Siswa yang berada di dalam kelas mendapat paket makan siang bergizi sekitar pukul 12.00 WIB.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Adrianus Amri mengatakan, pembagian makanan gratis hari pertama pada 2025 menyasar lima sekolah dengan jumlah 2.928 porsi. "Ya Alhamdulillah, hari ini lancar lima sekolah yang kita bagikan yakni SMP N 19 Palembang sebanyak 1.098 siswa, SMP N 33 Palembang 594 siswa, SD N 25 Palembang se-

seimbangan gizi yang dikenal sebagai menu seimbang.

Selain faktor menu seimbang, urusan hygiene dan sanitasi (kualitas kesehatan dan lingkungan) program makan bergizi gratis ini memerlukan perhatian serius pula. Mulai dari hal sederhana seperti makanan segar (belum basi) hingga pengelolaan limbah sisa makanan yang telah dikonsumsi berikut kemasannya.

Yang pasti, Badan Gizi Nasional (BGN) sudah memulai Program Makan Bergizi



Mereka langsung memakan makan siang yang dibagikan secara bersama-sama di SMP Negeri 19 berlokasi di Jalan Srijaya Km 5,5 Palembang ini. Menu yang disajikan memenuhi kriteria empat sehat yakni nasi, sayur buncis, tempe masak kecap, pentol ikan, dan pisang.

Porsi makan siang yang dibagikan ke sekolah ini berjumlah sekitar 1.098 paket. Makanan tiba di SMP Negeri 19 Palembang pada pukul 10.00 WIB, menggunakan mobil pikap terbuka.

banyak 606 siswa, SD N 24 Palembang sebanyak 604 siswa, dan TK Panca Bhakti I sebanyak 26 siswa," kata Amri.

Boleh jadi suatu hari pempek, kuliner khas Palembang, akan menjadi salah satu menu makan bergizi gratis di ibu kota Sumatera Selatan itu. Begitu juga dengan kuliner lokal di masing-masing daerah. Katakanlah gado-gado di Jakarta atau karedok di Jawa Barat untuk jenis sayur-mayur, tinggal mengkombinasi dengan protein untuk mencapai ke-

Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah.

Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25 persen kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35 persen. BGN juga menargetkan wilayah

terpencil, terdepan, dan terluar (3T) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program.

Program MBG bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standard Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian. Selain itu, program ini juga mem-

lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Makan Bergizi Gratis (MBG)—seperti yang dikatakan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana—merupakan program pemberian makanan bergizi gratis satu kali per hari untuk memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian. Program ini bertujuan antara lain meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mencukupi gizi anak-anak di Indonesia,

tu program ini akan mendapat penilaian (assessment)

Buku II Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 menjelaskan, Makan Bergizi Gratis merupakan program yang didesain untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) bermutu dan berdaya saing. Program Makan Bergizi Gratis yang dilakukan melalui pemberian makanan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, dan ibu hamil/menyusui



prioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.

Melalui Program MBG, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi

mencegah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak (stunting), hingga berdampak luas untuk memberdayakan UMKM dan meningkatkan ekonomi di daerah.

Jika berjalan sesuai dengan perencanaan dan tepat sasaran maka program ini tidak hanya dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, tapi juga menjadi motor penggerak bagi perekonomian nasional, khususnya dalam sektor pertanian dan peternakan. Pada saatnya ten-

dengan risiko anak stunting.

Pada usia sekolah, selain menjadi penambah nutrisi, Program MBG diharapkan dapat mendorong kehadiran siswa di sekolah sehingga akan sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, untuk mengurangi angka absensi atau putus sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM. Program Makan Bergizi Gratis juga diharapkan dapat berdampak positif terhadap kesehatan dan prestasi akademis

para murid.

Untuk mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah telah menyiapkan alokasi dana sebesar Rp71 triliun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Tentu untuk merealisasikan dan menyukseskan program ini bukan hal mudah. Dengan alokasi awal sebesar Rp71 triliun, program ini harus dikelola dengan sangat hati-hati.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memastikan bahwa alokasi dana ini tidak akan membuat defisit anggaran 2025 membengkak di luar kisaran target pemerintah, yaitu antara 2,29 persen dan 2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Mengenai pemberian waktu makan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hin-

Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengapresiasi dampak positif program MBG yang mulai berjalan sejak Senin, 6 Januari 2025. Program ini dinilai memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan komunitas pedesaan.

Dalam konferensi pers di Jakarta, pada Kamis, 9 Januari 2025, Luhut menyebut bahwa program ini membuat anak-anak sekolah lebih bahagia karena mendapatkan makanan bergizi tanpa mengorbankan uang jajan mereka. "Anak-anak sangat menikmati makan bergizi ini. Mereka bilang sebelumnya hanya membawa uang jajan untuk membeli makanan yang tidak jelas gizinya. Dengan program ini, mereka bisa makan sehat dan senang," ujar mantan Menteri Mar-

langsung mengurangi beban konsumsi rumah tangga. Setiap anak mendapatkan makanan senilai Rp 10.000 per hari, yang jika dihitung untuk dua anak dalam satu keluarga selama 20 hari, mencapai Rp 400.000.

"Jumlah ini hampir setara dengan satu kali garis kemiskinan. Walaupun sifatnya universal, dampaknya sangat progresif. Ini adalah bentuk redistribusi pendapatan yang langsung terasa," ungkap Arief.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa dampak jangka menengah dari program ini juga signifikan. "Dalam satu tahun ke depan, program ini dapat membantu rumah tangga yang mengalami kesulitan ekonomi. Rp 400.000 per bulan itu besar, hampir setara dengan satu kali garis kemiskinan," tegasnya.

Program Makan Bergizi Gratis tidak



dayana menegaskan bahwa program ini akan dibagi dalam dua jadwal namun tiap anak tetap menerima satu kali makan gratis. Makan Bergizi Gratis diberikan satu kali kepada tiap anak. Namun, menu makan yang diberikan akan memenuhi sepertiga kebutuhan kalori tiap anak. Dadan juga menjelaskan, anak PAUD hingga sekolah dasar (SD) akan diberikan makan gratis sebagai makan pagi. Sementara siswa sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) menerima makan gratis sebagai makan siang.

Tak kurang Ketua Dewan Ekonomi

itim dan Investasi itu

Luhut juga menyoroti efek ekonomi dari program ini, yang berhasil menggerakkan perekonomian desa. Pelibatan masyarakat dalam penyediaan makanan menciptakan peluang usaha baru, seperti produksi sayur-mayur dan bahan makanan lainnya. "Uang yang berputar di desa meningkat. Ada kegiatan ekonomi baru, orang jadi membuat sayur, makanan, dan lainnya. Padahal ini baru berjalan satu minggu," tambahnya.

Sedangkan Anggota Dewan Ekonomi Nasional, Arief Anshory Yusuf, menjelaskan bahwa program ini secara tidak

hanya meningkatkan kesehatan anak-anak sekolah tetapi juga memperkuat ekonomi pedesaan dan meringankan beban keluarga miskin. Dengan pelaksanaan yang melibatkan berbagai pihak, program ini menjadi contoh nyata kebijakan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan data yang dibagikan BGN, tercatat 190 titik dapur SPPG yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah titik lokasi SPPG terbanyak dengan total 57 titik lokasi SPPG yang dioperasikan. Dapur itu bekerja sama dengan satuan

koperasi, yayasan, hingga perusahaan perseroan terbatas.

Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung BGN. Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan, dapur atau SPPG penyedia mbg menerapkan standard operational procedurr (SOP) yang ketat. "Menurut saya luar biasa, SOP-nya sangat ketat. Masuk ke dalam harus ganti baju, pakai tutup kepala, pakai masker, dan bagaimana makanan tadi dipersiapkan di sana," ujarnya usai meninjau SPPG Tanah Sareal Kota Bogor di Lapangan Denpal III/Bogor, Senin,

Nasional telah menyiapkan sistem pengelolaan limbah yang baik. "Teman-teman bisa lihat tidak ada sampah. Sampai pengelolaannya dipikirkan oleh mereka. Sampah pun di SPPG sudah dipisah, seperti sampah plastik, sisa makanan, di dapur sudah dipisah. Yang keluar tidak akan menjadi problem," kata Hasan Nasbi.

Dia mengungkapkan informasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), bahwa tercatat 190 SPPG atau Dapur MBG telah beroperasi. Dapur-dapur tersebut tersebar di 26 provinsi. Mulai dari Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIJ, dan Gorontalo.

Selanjutnya Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi

limbah di setiap Dapur MBG dengan ketat. "BGN berkomitmen untuk meminimalkan limbah. Bahkan, untuk mendukung keberlanjutan, nampun penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang," ujar Hasan.

Seperti disampaikan oleh Presiden Prabowo, lanjut Hasan, pemerintah tidak libur pada Tahun Baru termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memastikan kelancaran program MBG. Momentum dimulainya program ini juga bertepatan dengan dimulainya kegiatan belajar mengajar pada awal 2025.

Pemerintah menempatkan kesiapan Dapur MBG sebagai prioritas utama agar layanan dapat berjalan maksimal. Pada tahap awal, 190 Dapur MBG mulai beroperasi pada Senin ini dan jumlah terse-



6 Januari 2025.

SPPG Tanahsareal merupakan satu dari dapur MBG yang tersedia di Kota Bogor. Satu SPPG lainnya berlokasi di Yayasan Bosowa Bina Insani yang melayani 10 sekolah dengan jumlah 2.983 siswa. Kepala SPPG Tanah Sareal Ayu Pertiwi menjelaskan dapur MBG yang ia pimpin melayani 15 sekolah di Kota Bogor dengan jumlah 3.018 siswa per hari.

Hasan memastikan bahwa dapur yang menyajikan makanan 3.000 porsi per hari itu dalam kondisi bersih. Sebab, pihak pengelola di bawah Badan Gizi

Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan. Setiap Dapur MBG dikelola oleh seorang kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh BGN. Kepala SPPG ini bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Selain memastikan kecukupan gizi dalam setiap porsi makanan, SPPG juga bertugas mengawasi standard kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan

but akan terus meningkat setiap harinya. Diharapkan target 937 Dapur MBG dapat tercapai pada akhir Januari 2025, dengan pelaksanaan yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah.

Antusiasme masyarakat terhadap program ini tampak sangat tinggi. Pada tahap awal, 140 UMKM telah terlibat dalam rantai pasok program MBG, dan jumlah tersebut diproyeksikan akan terus bertambah. Ribuan UMKM, koperasi, dan BUMDes lainnya telah mendaftar dan sedang melalui proses evaluasi. Semoga bukan sekadar ramai di permulaan. •



KRITIK DAN SARAN JADI PERHATIAN

Di balik keriuhan program makan bergizi gratis bagi anak usia sekolah dan ibu-ibu hamil serta menyusui, muncul pengakuan masih ada sebagian kecil pembiayaan yang menggunakan dana pribadi Presiden Prabowo Subianto. Berbagai tanggapan saling bersahutan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengakui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kendari, Sulawesi Tenggara, masih menggunakan dana pribadi dari Presiden Prabowo Subianto. Ia mengemukakan hal ini terjadi karena Kendari masih memiliki sisa anggaran dari dana pribadi Prabowo untuk uji coba pada 2024 lalu.

"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," kata Hasan Nasbi kepada wartawan, Senin, 6 Januari 2025

Setelah sisa anggaran dari dana pribadi Prabowo habis, Hasan memastikan

pelaksanaan program MBG di Kendari akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025. "Ya, setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN," kata Hasan.

Selain soal anggaran, Kepala BGN Dadan Hindayana mengemukakan, pemilihan lokasi pelaksanaan program MBG didasarkan pada tingkat kesiapan masing-masing daerah, termasuk ketersediaan infrastruktur yang memadai. "Karena kami kan mengedepankan kualitas. Pak Presiden Prabowo Subianto berpesan berkali-kali, jangan mengejar kuantitas tapi kualitas," kata Dadan usai

rapat bersama Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 6 Januari 2025.

Dadan menyebutkan bahwa pada hari pertama peluncuran, paket-paket Makanan Bergizi Gratis telah berhasil disalurkan kepada 400 hingga 600 ribu penerima manfaat di lokasi-lokasi tersebut. Ia juga menargetkan jumlah penerima manfaat akan terus meningkat hingga mencapai tiga juta orang selama periode Januari hingga April 2025.

Untuk memastikan keberlanjutan program, pihaknya berkomitmen untuk secara rutin mengevaluasi kinerja SPPG yang bertugas. "Tentu kami akan evaluasi setiap hari, dan seperti yang sudah saya sampaikan bahwa target kami dari Januari sampai April kan akan

mencakup tiga juta penerima manfaat,” katanya.

Nah, di mata peneliti kebijakan publik Nuri Ikawati, penggunaan dana pribadi Presiden Prabowo dalam program MBG bukanlah yang pertama dalam kegiatan pemerintahannya. Menurut Nuri, Prabowo sebelumnya pernah pula menggunakan dana pribadinya untuk berbagai kegiatan, seperti acara Retreat Kabinet Merah Putih.

Selain itu, kata Nuri, Prabowo juga pernah membagikan uang tunai Rp 100 ribu kepada warga di Desa Babakan Karet, Cianjur, melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

Toh sambung Nuri, penggunaan dana pribadi untuk program MBG justru dinilai kurang transparan, meskipun tujuannya baik. Ia menegaskan bahwa negara seharusnya mengutamakan penggunaan anggaran pemerintah agar lebih mudah diawasi dari segi transparansi dan akuntabilitas.

“Negara harus memegang prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mengutamakan penggunaan anggaran pemerintah,” kata Nuri yang aktif di Institute for Demographic and Affluence Studies (Ideas).

Terlepas dari tujuan baiknya, kata dia, penggunaan dana pribadi dalam program ini memerlukan kajian lebih mendalam agar tidak menciptakan preseden yang membingungkan dalam tata kelola keuangan publik. Apalagi, program makan bergizi gratis akan melibatkan berbagai mitra penyelenggara dari sektor lain, yang berisiko menimbulkan penyimpangan dalam proses seleksi mitra.

“Publik juga harus mendapatkan penjelasan mengenai anggaran makan bergizi gratis, termasuk biaya operasional hingga biaya produksi per porsi makan yang mencerminkan status gizi seimbang,” kata Nuri.

Selain itu, Nuri mengingatkan bahwa jika ada realokasi anggaran dari program strategis lain untuk menutupi kekurangan anggaran makan bergizi gratis, pemerintah wajib memberikan penjelasan kepada publik tentang akibat dari perubahan prioritas anggaran tersebut.

Sedangkan peneliti hukum dari Center of Economic and Law Studies

(Celios), Muhammad Saleh menilai, penggunaan dana pribadi berpotensi menjadi penyimpangan serius terhadap prinsip dasar pengelolaan keuangan negara. Saleh merujuk Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17/2003 (UU Keuangan Negara) yang mengatur bahwa semua penerimaan dan pengeluaran negara harus dikelola dalam mekanisme resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut dia, pengelolaan keuangan negara yang baik menuntut transparansi, efisiensi, dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Negara. Ketika seorang pejabat menggunakan dana pribadi untuk membiayai program negara, sambungnya, transparansi pengelolaan menjadi kabur karena tidak dapat diaudit secara resmi. “Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi dasar akuntabilitas publik terhadap

penggunaan keuangan negara,” ujar Saleh dalam keterangannya, Selasa, 7 Januari 2025.

Berkaitan dengan itu Saleh mengemukakan, program pemerintah yang dibiayai uang pribadi akan membuka ruang bagi potensi penyalahgunaan wewenang dan mengaburkan garis tegas antara kepentingan pribadi dan publik. “Tindakan ini mengabaikan mekanisme formal yang telah diatur dan mengirimkan sinyal bahwa pelanggaran terhadap aturan administratif dapat ditoleransi demi alasan pragmatis,” jelasnya.

Ia menambahkan keputusan dan tindakan pejabat harus tunduk pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Apabila pejabat negara melanggar asas itu mencederai kepercayaan publik sekaligus merusak legitimasi institusi pemerin-



tahan itu sendiri.

Terlebih lagi, sambungnya, penggunaan dana pribadi untuk program negara juga berpotensi menciptakan konflik kepentingan. "Tindakan menggunakan dana pribadi untuk membiayai program pemerintah mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memastikan alokasi anggaran yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan," lanjut Saleh.

Jika memang terdapat hambatan administratif dalam penggunaan anggaran resmi maka seharusnya pemerintah harus mencari solusi legal seperti revisi anggaran atau percepatan birokrasi—

(APBN). Alasannya, biaya yang diperlukan bernilai fantastis.

"Tentunya kalau hanya rely on (bergantung) pada APBN, ini akan menjadi berat ya buat APBN. Sementara program pemerintah yang lain kan tidak hanya MBG. Ada IKN, kemudian infrastruktur lainnya," kata Esther, Selasa, 7 Januari 2025.

Terlebih, sambungnya, pemerintah menargetkan jumlah penerima manfaat Makan Bergizi Gratis harus mencapai 15 hingga 20 juta orang hingga akhir 2025. "Cukup fantastis ya memang. Kalau kita lihat angka di APBN ini kurang lebih seki-

dengan target yang ditetapkan, tetapi bukan dari utang," ujarnya.

Sebagai sumber tambahan pembiayaan MBG, Esther mengusulkan agar pemerintah dapat meningkatkan penerimaan negara. Salah satunya melalui investasi asing maupun domestik. "Dengan investasi tersebut maka diharapkan ada penciptaan lapangan pekerjaan di sini, di Indonesia. Kemudian menghasilkan produk. Kalau bisa produknya diekspor. Terus impornya juga direm, tidak semuanya harus diimpor. Ini yang terkait dengan program makan bergizi gratis," katanya.



bukan dengan mengandalkan dana pribadi pejabat. Saleh menyarankan pula jika Prabowo ingin menyumbangkan dana pribadi untuk program pemerintahan maka dana tersebut harus diserahkan ke kas negara melalui mekanisme penerimaan negara dan didaftarkan sebagai sumbangan atau hibah sehingga tercatat dalam administrasi keuangan negara.

Nah, dalam pandangan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, kebutuhan makan bergizi gratis memang sulit untuk mengandalkan sepenuhnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

tar Rp 71 triliun untuk tahap pertama, tahun pertama ini. Tentunya ini bukan angka atau anggaran yang kecil," kata Esther.

Ia menilai, pemerintah perlu melakukan penghematan anggaran atau meningkatkan penerimaan negara sehingga APBN akan mampu membiayai program unggulan Prabowo secara berkelanjutan. "Pemerintah mengecilkan anggaran program-program lainnya, ini yang terjadi gitu. Nah kedepannya ya memang harus dievaluasi. Kecuali pemerintah bisa men-generate income lebih banyak untuk bisa men-deliver program makan bergizi gratis ini sesuai

Sedangkan Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Prita Laura menjelaskan sumber biaya program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari APBN dengan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha. "Jadi ini bisa dikatakan bagian dari APBN tentunya, namun skemanya adalah perjanjian kerja sama, di mana skema perjanjian kerja sama ini adalah satu skema yang wajar dan umum dilakukan antara pemerintah dengan badan usaha," katanya saat meninjau pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Jumat, 10 Januari 2024.

la menjelaskan penggunaan APBN dengan skema perjanjian kerja sama dibayarkan sesuai dengan tenggat waktu dari masing-masing perjanjian kerja sama. "Misalnya UMKM, tentu perjanjian kerja sama dan tenggat waktunya tidak bisa serentak karena ada kemampuan ekonomi dari masing-masing UMKM sendiri, jadi itu menjadi bahan pertimbangan," ujar dia.

Prita juga menjelaskan masyarakat dapat memberikan masukan terkait MBG di aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor, dan apabila ada keluhan, utamanya terkait menu makan bergizi gratis, dapat langsung menuju Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdekat masing-masing.

"Kita juga terus menerima masukan-masukan dari masyarakat, misalnya, masukan masyarakat bisa diberikan di mana? Di SP4N Lapor, atau paling mudah diberikan masukan kepada SPPG-nya langsung karena SPPG-nya ini memang didesain untuk erat dan dekat dengan para penerima manfaat, jadi bisa memberikan masukan, oh ini begini, begitu, silakan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu Prita meninjau pendistribusian MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di SPPG Ciracas bersama Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamen-dukbangga)/Wakil Kepala BKKBN Ratu Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (WamenPPPA) Veronica Tan, tepatnya di Posyandu Anyelir dan Dahlia.

Di Posyandu Anyelir, terdapat empat ibu hamil, tiga ibu menyusui dan 23 balita yang menjadi penerima paket MBG. Sedangkan di Posyandu Dahlia, tercatat sebanyak 10 ibu hamil, 9 ibu menyusui, dan 26 balita, total 45 paket MBG

Dari sisi politik, Partai Gerindra asal Presiden Prabowo Subianto menyatakan sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai

program ini telah berjalan dengan baik dan mendapat sambutan positif dari masyarakat, meskipun masih ada kendala teknis yang harus diperbaiki.

"Secara keseluruhan, pelaksanaan MBG alhamdulillah berjalan baik. Rata-rata laporan menunjukkan masyarakat



Terus impornya juga direm, tidak semuanya harus diimpor. Ini yang terkait dengan program makan bergizi gratis.

menikmati program ini. Meski begitu, beberapa masalah teknis yang muncul akan menjadi catatan untuk perbaikan di hari-hari berikutnya," ujar Muzani Selasa, 7 Januari 2025.

Kendala teknis dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dilaporkan, mencakup makanan yang kurang rasa, kekurangan lauk, hingga tidak tersedianya susu dalam paket makanan. "Masalah seperti susu yang belum tersedia tetap menjadi perhatian kami. Namun, secara umum, program MBG berjalan cukup baik, dan masyarakat menyambutnya dengan antusias," lanjut Muzani.

la juga memastikan Presiden Prabowo Subianto terus memantau perkembangan program ini. la menambahkan, sejumlah menteri kabinet turut terjun langsung ke lapangan untuk memastikan pelaksanaan berjalan lancar. "Pak Prabowo, bersama para menteri, akan terus memantau program ini secara menyeluruh. Kami ingin memastikan program ini memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat," kata Muzani.

Program makan bergizi gratis ini menargetkan 3 juta penerima manfaat pada tahap awal, meliputi anak-anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Sebanyak 190 dapur penyedia makanan bergizi telah disiapkan di 26 provinsi dengan kapasitas produksi hingga 3.500 paket makanan per hari. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk menjamin keberlanjutan program ini pada 2025.

Masih akan banyak kisah terkait makan bergizi gratis. Setidaknya 100 hari pertama pelaksanaannya dapat menjadi bahan penilaian awal. ●





AGAR BUKAN SEKADAR OMON-OMON

Pada umumnya di berbagai bagian dunia, makan bergizi gratis melayani anak sekolah. Di Indonesia mencakup pula ibu hamil dan menyusui.

Dukungan kesinambungan makan bergizi gratis (MBG) di Indonesia datang dari dalam dan luar negeri. Dari dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengemukakan anggaran untuk MBG mungkin saja bertambah sebesar Rp140 triliun pada 2025.

"Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, kalau dilihat APBN, menambah Rp140 triliun di bulan Juli atau Agustus. Ditambah Rp140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang pelajar akan dapat makan siang bergizi," ujar Zulkifli Hasan atau Zulhas, di Pendopo Gubernur Banten, Serang, Jumat, 10 Januari 2024.

Zulhas mengemukakan anggaran MBG yang sudah disetujui DPR RI pada

2025 sebanyak Rp71 triliun. Pada pelaksanaannya, kata Pak Menko Pangan, dalam periode Januari hingga April 2025, sekitar 100 hari, program MBG akan menjangkau sekitar tiga juta pelajar yang menerima manfaat.

Selanjutnya, pada periode April hingga Agustus 2025, pelajar yang menerima manfaat MBG diproyeksikan meningkat hingga mencapai enam juta. "Agustus-Desember itu 15 juta sampai 17.500.000 pengguna manfaat. Itu anggaran yang Rp71 triliun. Nah sekarang lagi berusaha," kata dia lagi.

Sejauh ini MBG yang merupakan salah satu program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai meluncur sejak Senin, 6 Januari 2025 di sekolah-sekolah dan posyandu yang menyebar di 26 provinsi di Indonesia.

Penerima manfaat itu terdiri dari balita, santri, siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, ibu hamil, serta ibu menyusui.

Dari luar negeri, dukungan terbaru untuk kesinambungan program MBG datang dari Jepang. Perdana Menteri (PM) Jepang Shigeru Ishiba yang sedang berkunjung ke Indonesia menawarkan kerja sama kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk terlibat dalam berbagai program pemerintah, yakni swasembada pangan dan energi, hingga program MBG.

"Saya ingin berkontribusi dan bekerja sama dengan Indonesia tentang hal-hal yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Presiden antara lain swasembada pangan dan energi sumber daya alam, hilirisasi dan industrialisasi, serta makan bergizi untuk masyarakat



dan (kerja sama) bidang keamanan," kata PM Ishiba pada pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Jepang di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu, 11 Januari 2025.

PM Ishiba mengemukakan, Jepang dan Indonesia memiliki banyak kesamaan, salah satunya merupakan negara kepulauan atau maritim dan menggantungkan perekonomian pada sektor perdagangan. "Kita juga berada di tengah negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan China. Maka kita perlu memperhatikan keseimbangan dalam kebijakan diplomasi," kata PM Ishiba.

Dalam pertemuan bilateral itu, delegasi Indonesia yang mendampingi Presiden Prabowo, yakni sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan P. Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Komunikasi

dan Digital Meutya Hafid, dan Sekretaris Kabinet Mayor Inf. Teddy Indra Wijaya.

Sementara itu, delegasi Jepang diwakili antara lain oleh Wakil Kepala Sekretariat Kabinet Aoki Kazuhiko, Sekretaris Jenderal Sekretariat Keamanan Nasional Akiba Takeo, Penasihat Khusus untuk Perdana Menteri Mori Masahumi, Penasihat Khusus Kabinet Iijima Isao, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masaki Yasushi, kemudian Direktur Jenderal Wilayah Asia Tenggara dan Asia Barat Daya Kementerian Luar Negeri Jepang Nakamura Ryo, dan Sekretaris PM Kaihara Kentaro.

Tentu pertemuan bilateral itu membicarakan banyak hal. Namun, soal pangan dan MBG yang masuk di agenda pembicaraan menunjukkan persoalan kesetaraan kualitas sumber daya manusia di tingkat regional dan internasional menjadi kesadaran bersama untuk memudahkan saling pengertian antarnegara. Sekadar informasi, makan bergizi untuk pelajar sekolah sudah dipraktikkan di hampir 100 negara di dunia termasuk Jepang.

Khusus kerja sama Indonesia dengan Jepang, sebelum kunjungan PM Ishiba ke Indonesia pada awal 2025, Badan



Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) dan Kementerian Kesehatan bekerja sama dalam pelatihan pendidikan makanan dan gizi atau shokuiku pada 3-12 September 2024 di Tokyo dan Nagasaki. Sembilan peserta dari kementerian dan organisasi mengikuti pelatihan tersebut dengan tujuan mempelajari pengalaman Jepang dalam mempromosikan kebiasaan makan sehat di kalangan anak-anak melalui makan bergizi di sekolah yang telah berjalan selama 100 tahun lebih.

"Meningkatkan gizi anak-anak merupakan komponen kunci dalam pembangunan nasional," ujar Senior Representative dari JICA Indonesia Okamura Kenji dalam keterangannya di Tokyo, Jumat, 13 September 2024.

Okamura juga datang ke Nagasaki dalam kesempatan tersebut. "Jepang memiliki pengalaman lebih dari satu abad dalam menangani masalah gizi pada anak sekolah. Kami dengan senang hati akan menawarkan pengetahuan, praktik terbaik, dan dukungan mengenai cara mengadaptasikannya ke dalam konteks Indonesia," katanya.

Peserta pelatihan antara lain dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Agama, Badan Pembangunan Nasional, Badan Pangan Nasional, serta organisasi khusus gizi seperti Southeast

Asian Ministers of Education Organization - Regional Centre for Food and Nutrition (SEAMEO-RECFON), dan Indonesia Food Security Review (IFSR).

Pelatihan itu dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi Tokyo di mana para peserta belajar mengenai sistem dan kebijakan makanan bergizi di sekolah di tingkat



Kalau nanti Presiden memutuskan menambah, kalau dilihat APBN, menambah Rp140 triliun di bulan Juli atau Agustus. Ditambah Rp140 triliun, maka nanti penerima manfaat akan mencakup 82,9 juta orang pelajar akan dapat makan siang bergizi.

nasional. Sedangkan di sesi Nagasaki para peserta mendapatkan pengalaman langsung dengan mengamati implementasi pemberian makanan bergizi ini di sekolah dasar, dan mengunjungi ber-

bagai tempat yang mendukung sistem makanan sekolah di Jepang.

Karena shokuiku di Jepang merupakan kolaborasi multisektor, materi yang didapatkan para peserta pun beragam, mulai dari sistem guru gizi, peran institusi kesehatan dalam penyelenggaraan makanan bergizi di sekolah, manajemen dan sumber daya manusia, serta pengadaan produk lokal untuk konsumsi masyarakat setempat.

Mereka juga mengunjungi berbagai tempat yang berkaitan dengan sistem makanan bergizi sekolah di Tokyo dan Nagasaki, seperti pusat makanan bergizi, pertanian kota, dan koperasi susu, untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang ekosistem makanan bergizi sekolah di Jepang. Pelatihan ini juga dihadiri oleh empat pejabat tinggi dari Kementerian Kesehatan, Badan Pembangunan Nasional, dan Badan Gizi Nasional yang baru saja dibentuk, yang datang di sesi Nagasaki.

Dengan dukungan dari dalam dan luar negeri sebagaimana telah terjalin, program MBG di Indonesia agaknya akan berkesinambungan. Dengan catatan, perlu ada perbaikan pengelolaan agar sasaran mencapai Visi Indonesia Emas 2045 yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045 bukan sekadar omon-omon. ●



info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**

**PRESIDEN
PUJI PJ GUBERNUR
SUMSEL SOAL
PENGENDALIAN
INFLASI**

